



KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
(Unaudited)

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Neraca; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Laporan Arus Kas (LAK); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.



Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal selama satu periode Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (Tahun Anggaran 2025).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 630);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 18) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 110);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3)
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 189);
- 33) Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 31);
- 34) Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 43);
- 35) Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
- 36) Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;



1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2025 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Bab II berisi Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD, yang menyajikan diskripsi ekonomi makro/ekonomi regional, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD;
3. Bab III berisi Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
4. Bab IV berisi Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan tentang entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP, serta kebijakan akuntansi tertentu;
5. Bab V berisi Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK);
6. Bab VI, berisi Penjelasan Atas Informasi-informasi non keuangan, yang menjelaskan tentang gambaran umum daerah;
7. Bab VII, berisi Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal pada periode pertama RPJPD 2025-2045 difokuskan pada penguatan fondasi dan landasan kebijakan di berbagai sektor untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Aspek sumber daya manusia (SDM), pembangunan diarahkan pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan formal dan nonformal (PAUD-SMA sederajat), perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM guna membentuk masyarakat yang produktif dan berpendidikan tinggi. Arah kebijakan pada sektor ekonomi, fokus utamanya adalah pengembangan industri pengolahan, perdagangan (termasuk UMKM), pertanian, serta sektor yang tumbuh pesat seperti TIK, jasa (termasuk pariwisata), dan konstruksi melalui digitalisasi, riset inovasi, serta penguatan kemitraan pembangunan di kawasan perdesaan.

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 dengan visi "**Menuju Tegal Maju dan Tangguh**" menjadi pedoman utama dalam merancang kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan sehingga tercapai kondisi di mana "**Tegal Luwih Apik**". Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan strategis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Memfokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, RPJMD ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Sebagai periode lima tahun pertama dari perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 juga menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi besar Kabupaten Tegal "**Menakjubkan 2045**". Periode pertama ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan di tahun-tahun berikutnya, sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan harus selaras dengan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 akan mampu membentuk ekosistem pembangunan yang adaptif terhadap perubahan zaman, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Data ekonomi makro kabupaten tegal tiga tahun terakhir yang meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan tingkat inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Ekonomi Makro

No.	Indikator Ekonomi Makro	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Tingkat Kemiskinan			
	a. Jumlah penduduk Miskin (ribu orang)	105,03	98,02	88,7
	b. Persentase Penduduk Miskin (%)	7,3	6,81	6,16
	c. Persentase Kemiskinan Ekstrim (%)	0,73	0,24	0,05
	d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,88	0,97	0,73
	e. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,22	0,12
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,6	7,53	7,61
3.	Rasio Gini (<i>Gini Ratio</i>)	0,358	0,329	Disamakan
4.	Indeks Pembangunan Manusia	71,12	71,7	72,36

Sumber: *(BPS - Kab. Tegal dalam angka 2026)

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diketahui dari tabel di atas yang menyajikan data persentase jumlah penduduk miskin Tahun 2025 sebanyak 6,16% menurun dibanding Tahun 2024 dan 2023. Demikian juga jika dilihat dari persentase kemiskinan ekstrim, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Semakin tinggi indeks P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara, semakin tinggi indeks P2, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 sebesar 7,61% naik dibandingkan Tahun 2024 sebesar 7,53% dan 2023 sebesar 8,60% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi (i) yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3. Indeks Gini (*Gini Ratio*) atau tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Tahun 2025 sampai bulan maret 2026 belum dirilis BPS Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar 0,329 dan Tahun 2023 sebesar 0,358. Indeks Gini adalah alat analisis untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 s.d. 1. Indeks Gini dengan nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sementara Indeks Gini dengan nilai 1 menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu saja.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 sebesar 72,36 meningkat dibanding Tahun 2024 sebesar 71,70 dan Tahun 2023 sebesar 71,12. IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata Harapan Sekolah), dan kelayakan hidup (pengeluaran per kapita). **(BPS - Kab. Tegal dalam angka 2026).*

2.2. Kebijakan Keuangan

Disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun 2025 yang merupakan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan DPRD Kabupaten Tegal Nomor $\frac{900/25/B1193/2024}{170/03/2024}$ tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 dan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan DPRD Kabupaten Tegal Nomor $\frac{900/25/B1194/2024}{170/04/2024}$ tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun 2025 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025. KUA disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.



2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023;
 2. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
 3. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan pihak ketiga dan pemanfaatan media sosial;
 4. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah;
 5. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan);
 6. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMD yaitu PDAM Tirta Ayu, BPR-BKK dan PT. Bank Tegal berupa perolehan laba maupun penyertaan modal;
 8. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek Retribusi Daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
 9. Penguatan kinerja BUMD dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
 10. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan Perangkat Daerah (PD) serta mengembangkan potensi usaha;
 11. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain dengan pendayagunaan asset tersebut, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha;
 12. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;



13. Meningkatkan komitmen seluruh *Stakeholder* agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
 14. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
- b. Kebijakan Umum Dana Perimbangan
- Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD):
- 1) Pemenuhan *readiness criteria*, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (*Terms of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal;
 - 2) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah;
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan;
 - 4) Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk pemenuhan belanja rutin perangkat daerah dan mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap perangkat daerah melalui pemberian honorarium ataupun jasa kepada PNS atau Non PNS, dan komponen belanja barang dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2025 digunakan untuk mendukung program prioritas daerah;
- 4) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2025 diantaranya untuk menangani masalah sosial dan kemsiskinan;
- 5) Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Permukiman.
- c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan.

Sedangkan yang termasuk dalam keadaan mendesak meliputi:

- a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
 - d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- d. Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Bagi Hasil;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pencapaian target, sasaran dan program unggulan Perubahan RPJMD 2025-2029;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 2) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- 3) Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 4) Belanja daerah diarahkan untuk dapat memenuhi standar pelayanan minimal dan pelayanan publik Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dibidang sanitasi;
- 5) Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal;
- 6) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan;
- 7) Dukungan implementasi kebijakan penanganan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tegal;
- 8) Alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan terkait mandatori belanja untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi infrastruktur. Sedangkan anggaran untuk fungsi pendidikan dan pelatihan ASN, paskibraka dan fungsi pengawasan (APIP) dan mandatori lainnya akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan;
- 9) Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemasang, khususnya untuk Pembangunan Pasar Tradisional di Kabupaten Tegal;



- 10) Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
- 11) Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
- 12) Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 adalah penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah Penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 adalah :

- a. Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari program KURDA Bank TGR.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2025 adalah:

- a. Penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Ayu dan PT BPR Tegal Gotong Royong sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Ayu dan Penyertaan Modal kepada BUMD;
- b. Pemberian Pinjaman Daerah kepada PT BPR Tegal Gotong Royong untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat.

2.3. Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan, yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
- b. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing PD penghasil/pengelola pendapatan;
- d. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing-masing PD penghasil;
- e. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;
- f. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir;
- h. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
- i. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
- j. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- k. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- l. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;
- m. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
- n. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- o. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah;
- p. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;
- q. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan;
- r. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :
 - 1. Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - 2. Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
 - 3. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.123.726.765.805,00 sedangkan realisasinya adalah Rp3.110.318.788.047,02 atau 99,57% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp13.407.977.757,98 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp732.724.279.000,00 dengan realisasi sebesar Rp731.692.733.050,02 atau 99,86% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.031.545.949,98, Rincian PAD terdiri dari:
 - a) Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp349.087.633.000,00 yang terealisasi sebesar Rp319.347.822.179,00 atau 91,48% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp29.739.810.821,00.
 - b) Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp347.307.181.000,00 yang terealisasi sebesar Rp365.021.543.160,02 atau 105,10% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp17.714.362.160,02.
 - c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp20.387.603.000,00 yang terealisasi sebesar Rp22.993.196.214,00 atau 112,78% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp2.605.593.214,00.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp15.941.862.000,00 yang terealisasi sebesar Rp24.330.171.497,00 atau 152,62% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp8.388.309.497,00.
2. Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp2.391.002.486.805,00 dengan realisasi sebesar Rp2.378.626.054.997,00 atau 99,48% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp12.376.431.808,00. Pendapatan transfer terdiri dari:
 - a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.895.620.984.305,00 yang terealisasi sebesar Rp1.886.042.182.217,00 atau 99,49% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp9.578.802.088,00 yang berasal dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 1) Dana Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp39.442.862.000,00, terealisasi sebesar Rp33.709.756.600,00 atau 85,46% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp5.733.105.400,00;
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.305.134.049.000,00 terealisasi sebesar Rp1.303.491.093.061,00 atau 99,87% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.642.955.939,00;
 - 3) Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp551.044.073.305,00. terealisasi sebesar Rp548.841.332.556,00 atau 99,60% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp2.202.740.749,00.
- b) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dianggarkan sebesar Rp329.102.117.000,00 terealisasi sebesar Rp328.961.888.000,00 atau 99,96% sehingga tidak terdapat selisih kurang Rp140.229.000,00 yang berasal dari:
- 1) Dana Desa dianggarkan sebesar Rp321.870.852.000,00. terealisasi sebesar Rp321.730.623.000,00 atau 99,96%.
 - 2) Insentif Fiskal dianggarkan sebesar Rp7.231.265.000,00. terealisasi sebesar Rp7.231.265.000,00 atau 100,00%.
- c) Transfer Pemerintah - Provinsi dianggarkan sebesar Rp166.279.385.500,00 terealisasi sebesar Rp163.621.984.780,00 atau 98,40% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp2.657.400.720,00 yang berasal dari:
- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp157.348.732.000,00 terealisasi sebesar Rp154.873.323.614,00 atau 98,43% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp2.475.408.386,00.
 - 2) Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp8.930.653.500,00 terealisasi sebesar Rp8.748.661.166,00 atau 97,96% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp181.992.334,00.

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang pada setiap Perangkat Daerah (PD) dapat dilihat pada lampiran 3.1.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

b. Anggaran Belanja

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp2.089.944.502.728,00 dan realisasi Rp1.977.810.035.696,00 atau 94,63% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp112.134.467.032,00.
2. Belanja urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp215.583.909.833,00 dan realisasi sebesar Rp197.128.065.574,00 atau 91,44% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp18.455.844.259,00.
3. Belanja urusan pemerintahan pilihan dengan anggaran sebesar Rp52.991.232.990,00 dan realisasi sebesar Rp48.611.258.564,00 atau 91,73% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.379.974.426,00.
4. Belanja unsur pendukung urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp171.511.572.982,00 dan realisasi sebesar Rp162.682.425.640,00 atau 94,85% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp8.829.147.342,00.
5. Belanja unsur penunjang urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp670.602.635.619,00 dan realisasi sebesar Rp643.895.502.574,00 atau 96,02% sehingga terdapat selisih sebesar Rp26.707.133.045,00.
6. Belanja unsur pengawasan urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp13.350.981.407,00 dan realisasi sebesar Rp11.012.673.321,00 atau 82,49% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp2.338.308.086,00.
7. Belanja unsur kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp60.714.878.114,00 dan realisasi sebesar Rp55.528.750.725,00 atau 91,46% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp5.186.127.389,00.
8. Belanja unsur pemerintahan umum dengan anggaran sebesar Rp10.379.413.164,00 dan realisasi sebesar Rp8.922.861.364,00 atau 85,97% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.456.551.800,00.

Rincian anggaran belanja berdasarkan urusan pemerintahan pada setiap Perangkat Daerah (PD) dapat dilihat pada *lampiran 3.2*.

Anggaran belanja daerah pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp3.285.079.126.837,00 dengan realisasi Rp3.105.591.573.458,00 atau 94,54% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp179.487.553.379,00 yang diklasifikasikan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.368.203.152.339,00 dengan realisasi sebesar Rp2.215.332.470.671,00 atau 93,54%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp152.870.681.668,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.271.343.359.377,00 dengan realisasi sebesar Rp1.199.553.911.642,00 atau 94,35%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp71.789.447.735,00.
 - b) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp981.231.242.462,00, dengan realisasi sebesar Rp900.910.267.590,00 atau 91,81% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp80.320.974.872,00.
 - c) Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp93.078.150.500,00 dengan realisasi sebesar Rp92.587.598.939,00 atau 99,47% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp490.551.561,00.
 - d) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp22.550.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.280.692.500,00 atau 98,80% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp269.707.500,00.
2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp417.124.245.498,00 dengan realisasi sebesar Rp399.297.238.516,00 atau 95,73% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp17.827.006.982,00 yang terdiri dari:
- a) Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp8.943.287.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.749.375.000,00 atau 41,92% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp5.193.912.000,00.
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp117.276.749.270,00 dengan realisasi sebesar Rp112.650.087.395,00 atau 96,05% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.626.661.875,00.
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp84.039.745.152,00 dengan realisasi sebesar Rp80.023.255.964,00 atau 95,22% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.016.489.188,00.
 - d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp180.149.820.558,00 dengan realisasi sebesar Rp176.193.275.755,00 atau 97,80% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp3.956.544.803,00.
 - e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp26.371.364.438,00 dengan realisasi sebesar Rp26.388.086.692,00 atau 100,06% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp16.722.254,00.
 - f) Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp343.279.080,00 dengan realisasi sebesar Rp293.157.710,00 atau 85,40% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp50.121.370,00.
3. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.665.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.151.147.271,00 atau 80,72% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp513.852.729,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp497.086.729.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp488.810.717.000,00 atau 98,34% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp8.276.012.000,00. Transfer merupakan Transfer Bagi Hasil ke Desa yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.
 - a) Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp21.357.032.400,00 dengan realisasi sebesar Rp14.183.853.900,00 atau 66,41% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp7.173.178.500,00.
 - b) Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp4.542.967.600,00 dengan realisasi sebesar Rp3.587.363.100,00 atau 78,96% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp955.604.500,00.
 - c) Belanja Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp471.186.729.000,00 dengan realisasi sebesar Rp471.039.500.000,00 atau 99,97% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp147.229.000,00.

c. Anggaran Pembiayaan

Untuk realisasi anggaran pembiayaan daerah Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp169.852.361.032,00 dengan realisasi sebesar Rp169.853.492.396,63 atau 100% yang terdiri dari:
 - a) Penggunaan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp168.352.361.032,00 dengan realisasi sebesar Rp168.352.361.032,63 atau 100%;
 - b) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.501.131.364,00 atau 100% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.131.364,00.
2. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.500.000.000,00 atau 98,36% atau 100% yang terdiri dari:
 - a) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 100%;
 - b) Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00%.

Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan neto yang dianggarkan sebesar Rp161.352.361.032,00 terdapat realisasi sebesar Rp161.353.492.396,63 atau 100% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.131.364,63.



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar Rp166.080.706.985,65 yang merupakan selisih antara realisasi defisit sebesar Rp4.727.214.589,02 dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp161.353.492.396,63.

3.2. Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola daerah meliputi:

a. Pendidikan

Mandatory spending alokasi pendidikan, sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar minimal 20% dari APBD.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan TA 2025 sebesar Rp1.121.610.353.725,00 atau 34,14% dari total belanja daerah TA 2025 sebesar Rp3.285.079.126.837,00 dengan perhitungan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 *Mandatory Spending* Alokasi Pendidikan

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Anggaran Fungsi Pendidikan:		
	1. Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.106.131.208.176,00	1.079.978.066.404,00
	2. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan	15.479.145.549,00	14.998.963.492,00
	Total Anggaran Fungsi Pendidikan	1.121.610.353.725,00	1.094.977.029.896,00
B	Total Belanja Daerah	3.285.079.126.837,00	3.105.591.573.458,00
C	Rasio Anggaran Pendidikan = (A/B) x 100 %	34,14	35,26

Untuk realisasi belanja pendidikan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.094.977.029.896,00 atau sebesar 97,63% dari anggaran pendidikan Rp1.121.610.353.725,00 Sedangkan jika diperbandingkan dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp3.105.591.573.458,00 maka realisasi belanja pendidikan mencapai sebesar 35,26%.

b. Pengawasan

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 untuk fungsi pengawasan dianggarkan sebesar Rp0,50% untuk yang APBDnya diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan sebesar 0,26 % dari total belanja daerah atau sebesar Rp8.651.022.255,00 untuk fungsi pengawasan. Sedangkan realisasinya sebesar 77,70% atau Rp6.722.267.611,00 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 *Mandatory Spending* Alokasi Pengawasan

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Anggaran Pengawasan		
	Belanja pada Inspektorat	13.372.041.407,00	11.012.673.321,00
	Belanja Gaji ASN Pada Inspektorat	4.721.019.152,00	4.290.405.710,00
	Anggaran Pengawasan	8.651.022.255,00	6.722.267.611,00
B	Total Belanja Daerah	3.285.079.126.837,00	3.105.591.573.458,00
	Gaji ASN	771.735.036.463,00	723.994.644.932,00
	Total Belanja Daerah di Luar gaji ASN	2.513.344.090.374,00	2.381.596.928.526,00
	Rasio Alokasi Anggaran Pengawasan Terhadap Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (A/B) x 100%	0,41	0,35

c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa

Mandatory spending untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima kabupaten/kota dalam APBD sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa sebesar Rp25.900.000.000,00 atau 6,80% dari total penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp380.942.517.000,00.

Tabel 3.3 *Mandatory Spending* Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	25.900.000.000,00	17.771.217.000,00
2.	Pajak Daerah	349.087.633.000,00	207.215.490.936,00
3.	Retribusi Daerah	31.854.884.000,00	43.881.729.256,00
4.	Total Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (2+3)	380.942.517.000,00	251.097.220.192,00
5.	Rasio Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (1/4) x 100%	6,80	7,08

Realisasi bagi hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah ke desa sebesar Rp17.771.217.000,00 dari anggarannya sebesar Rp25.900.000.000,00 dan 7,08 % dari realisasi total penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp251.097.220.192,00.



Alasan pemerintah Kabupaten Tegal kurang dalam menganggarkan *mandatory spending* untuk bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 paling sedikit 10% disebabkan antara lain:

- 1) Keterbatasan Fiskal Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal lebih fokus pada belanja infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan, sehingga alokasi anggaran bagi hasil ke desa belum maksimal.
- 2) Bahwa perhitungan anggaran Bagi Hasil dan Pajak Retribusi Tahun 2025 baru mengalokasikan 7,08% dari ketentuan 10%.

d. Alokasi Dana Desa (ADD)

Mandatory spending untuk ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tegal mengalokasikan ADD sebesar Rp129.532.000.000,00 atau 9,63% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK fisik dan non fisik sebesar Rp1.344.576.911.000,00.

Tabel 3.4 *Mandatory Spending* untuk ADD

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	129.532.000.000,00	129.525.000.000,00
2.	Dana Perimbangan	1.895.620.984.305,00	1.886.042.182.217,00
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	551.044.073.305,00	548.841.332.556,00
4.	Dana Perimbangan-DAK (2-3)	1.344.576.911.000,00	1.337.200.849.661,00
5.	Rasio Anggaran ADD $(1/4) \times 100\%$	9,63	9,69

Realisasi anggaran ADD sebesar Rp129.525.000.000,00 atau 100% dari anggaran ADD sebesar Rp129.525.000.000,00 dan 9,69% dari realisasi total Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp1.337.200.849.661,00.

e. Infrastruktur

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 bahwa pemerintah daerah menganggarkan minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur. Belanja *Mandatory spending* untuk infrastruktur terdiri dari *mandatory spending* infrastruktur pelayanan publik dan *mandatory spending* infrastruktur daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pemerintah Kabupaten Tegal menganggarkan *mandatory spending* infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.115.196.959.134,80 dari total belanja daerah atau sebesar Rp3.285.079.126.837,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp1.046.712.342.583,20 atau 33,70% sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 *Mandatory Spending* untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Total Belanja Daerah	3.285.079.126.837,00	3.105.591.573.458,00
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	497.086.729.000,00	488.810.717.000,00
	Belanja Bagi Hasil	25.900.000.000,00	17.771.217.000,00
	Bantuan Keuangan	471.186.729.000,00	471.039.500.000,00
3	selisih (1-2)	2.787.992.397.837,00	2.616.780.856.458,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.115.196.959.134,80	1.046.712.342.583,20
	(40% x selisih)	33,95	33,70

Pemerintah Kabupaten Tegal menganggarkan *mandatory spending* infrastruktur daerah sebesar Rp582.405.224.519,40 dari total belanja daerah atau sebesar Rp3.285.079.126.837,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp561.784.541.850,00 atau 23,59% sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.1. *Mandatory Spending* untuk Infrastruktur Daerah

No.	Anggaran Fungsi Infrastruktur	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal	417.124.245.498,00	399.297.238.516,00
	Belanja Pemeliharaan	49.652.428.521,40	47.619.011.895,00
2	Belanja Hibah	93.078.150.500,00	92.587.598.939,00
	Belanja Bansos	22.550.400.000,00	22.280.692.500,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	582.405.224.519,40	561.784.541.850,00
4	Total Belanja Daerah	3.285.079.126.837,00	3.105.591.573.458,00
5	Total Belanja Daerah di Luar gaji ASN	2.513.344.090.374,00	2.381.596.928.526,00
	Rasio Anggaran Infrastruktur (3/5*100)	23,17	23,59

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mencukupi ketentuan 40% anggaran infrastruktur dalam 5 (lima) tahun ke depan.



3.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Pada Pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Perangkat Daerah menunda pelaksanaan kegiatan sampai dengan terbitnya Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal;
- b. Kesulitan dan lambatnya akses aplikasi SIPD RI;
- c. Peralihan penggunaan E_Katalog LKPP Versi 6;
- d. Ada beberapa Harga Satuan yang melampaui Standar Harga Satuan (SHS) berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Dalam hal ini yang dimaksud entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) .

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini yang dimaksud entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Tegal dengan alamat di Jl Dr Soetomo No 1 Slawi, rincian entitas akuntansi disajikan pada Bab VI angka 7.2 Struktur Organisasi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah menggunakan 2 (dua) basis akuntansi, yaitu Basis Kas dan Basis AkruaI.

Basis kas dipergunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Penggunaan basis kas dikarenakan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Penyusunan LRA menggunakan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran disebut sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis akruaI dipergunakan untuk menyusun laporan finansial yang terdiri dari Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Basis akruaI untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada



saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampirannya;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- g. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2022 tentang Bagan Akun Standar;
- h. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- i. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah.



4.4. Kebijakan Akuntansi Akun

Untuk mengungkapkan pos-pos yang disajikan pada laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, maka disusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arua Kas. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah, beberapa akun yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

a. Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang, harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

b. Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.



Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization threshold*). Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization threshold*) adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya.

d. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau



2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi diakui sebagai Aset pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu Aset harus memenuhi kriteria:

1. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari Aset properti investasi; dan
2. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Properti investasi disajikan sebagai Aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti investasi disajikan pada neraca terpisah dari kelompok Aset tetap dan Aset lainnya.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LRA

5.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan dalam TA 2025 serta realisasi TA 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah(PAD)	732.724.279.000	731.692.733.050	99,86	602.836.541.784,47
2 Pendapatan Transfer	2.391.002.486.805,00	2.378.626.054.997,00	99,48	2.387.793.407.306,00
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	3.071.648.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	3.123.726.765.805,00	3.110.318.788.047,02	99,57	2.993.701.597.090,47

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp2.993.701.597.090,47 maka realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp3.110.318.788.047,02 mengalami kenaikan sebesar Rp116.617.190.956,55 atau 3,90%. Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

5.1.1.a. Pendapatan Asli Daerah

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2025 sebesar Rp731.692.733.050,02 dan TA 2024 sebesar Rp602.836.541.784,47 dengan rincian PAD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Pajak Daerah	349.087.633.000,00	319.347.822.179,00	91,48	208.450.106.295,00
2 Pendapatan Retribusi Daerah	347.307.181.000,00	365.021.543.160,02	105,10	356.132.261.707,47
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.387.603.000,00	22.993.196.214,00	112,78	19.597.159.894,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.941.862.000,00	24.330.171.497,00	152,62	18.657.013.888,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	732.724.279.000,00	731.692.733.050,02	99,86	602.836.541.784,47

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024, maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp128.856.191.265,55 atau 21,37%. Untuk Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp110.897.715.884,00 atau 53,20%,



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp8.889.281.452,55 atau 2,50%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp3.396.036.320,00 atau 17,33% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp5.673.157.609,00 atau 30,41%. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2025 dan 2024, tersaji sebagai berikut:

5.1.1.a.1 Pajak Daerah

Tarif pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, realisasi TA 2025 sebesar Rp319.347.822.179,00 dan TA 2024 sebesar Rp208.450.106.295,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.3. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	4.584.576.117,00	101,88	4.338.409.505,00
2	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.236.356.120,00	88,31	907.449.940,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	8.000.000,00	2.500.000,00	31,25	3.000.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.730.157.000,00	2.054.785.010,00	43,44	365.278.940,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	59.176.600.000,00	60.749.167.013,00	102,66	57.182.914.008,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	47.246.000.000,00	37.841.830.663,00	80,10	49.722.021.979,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	101.734.760.000,00	100.746.305.013,00	99,03	95.530.263.923,00
8	Opsen PKB	70.992.863.000,00	66.046.969.243,00	93,03	400.768.000,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	59.299.253.000,00	46.085.333.000,00	77,72	0,00
Jumlah pendapatan pajak daerah		349.087.633.000,00	319.347.822.179,00	91,48	208.450.106.295,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2024, maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 53,20% atau Rp110.897.715.884,00.

5.1.1.a.2 Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Pendapatan retribusi daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah penghasil, dengan realisasi selama TA 2025 sebesar Rp365.021.543.160,02 dan TA 2024 sebesar Rp356.132.261.707,47 Rincian pendapatan retribusi dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.4. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah :		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	315.622.297.000,00	321.259.123.904,02	101,79	318.857.419.449,47
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan /Persampahan	3.829.405.000,00	3.066.452.500,00	80,08	4.278.580.437,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	811.200.000,00	603.929.200,00	74,45	622.180.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	7.381.371.000,00	7.167.128.906,00	97,10	6.740.545.595,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	508.414.000,00	451.030.000,00	88,71	439.112.500,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.994.305.000,00	1.294.576.677,00	64,91	722.589.613,00
7	Retribusi Tempat Pelelangan	120.000.000,00	59.095.720,00	49,25	82.666.140,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	635.308.000,00	785.396.000,00	123,62	753.557.000,00
9	Rumah Potong Hewan	53.340.000,00	58.015.000,00	108,76	54.020.000,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	11.314.848.000,00	13.015.503.300,00	115,03	10.783.792.400,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	16.500.000,00	15.309.500,00	92,78	7.207.500,00
12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	0,00	0,00	132.795.145,00
13	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	125.000.000,00	123.003.600,00	98,40	107.137.000,00
14	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.405.193.000,00	2.136.581.720,00	152,05	4.142.493.037,00
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.950.000.000,00	11.691.303.451,00	396,32	6.826.792.765,00
16	Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	540.000.000,00	3.295.093.682,00	610,20	1.581.348.126,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		347.307.181.000,00	365.021.543.160,02	105,10	356.132.261.707,47

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2024, maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,50% atau sebesar Rp8.889.281.452,55.

5.1.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD yang berasal dari kegiatan pembiayaan/investasi berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan bank. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2025 sebesar Rp22.993.196.214,00 dan TA 2024 sebesar Rp19.597.159.894,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.5. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah :		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bank Jateng	13.906.049.000,00	16.511.639.159,00	118,74	13.660.254.876,00
2	PDAM	4.124.163.000,00	4.124.163.783,00	100,00	3.677.502.043,00
3	BPR BKK Talang	308.593.000,00	308.593.653	100,00	425.734.524,00
4	Bank TGR	1.368.019.000,00	1.368.019.817,00	100,00	1.130.320.094,00
5	BPR BKK Jateng	680.779.000,00	680.779.867,00	100,00	703.348.357,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		20.387.603.000,00	22.993.196.214,00	112,78	19.597.159.894,00

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2024, maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 17,33% atau Rp3.396.036.320,00.

5.1.1.a.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2025 sebesar Rp24.330.171.497,00 dan TA 2024 sebesar Rp18.657.013.888,00 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6. Lain-lain PAD yang sah

Lain – Lain PAD yang Sah :		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	138.862.000,00	367.682.200,00	264,78	1.436.779.570,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	719.098.773,00	0,00	719.235.120,00
3	Jasa Giro	1.300.000.000,00	1.466.237.073,00	112,79	2.178.867.317,00
4	Pendapatan Bunga	4.500.000.000,00	7.796.438.278,00	173,25	8.512.829.227,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	6.300.000,00	-	7.155.000,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	416.666.736,00	-	441.287.840,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	86.614.965,00	-	2.384.307.605,00
8	Pendapatan Denda Pajak	0,00	1.033.280.093,00	-	1.168.949.176,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	50.512.377,00	-	0,00
10	Pendapatan dari pengembalian	10.000.000.000,00	12.385.841.002,00	123,86	1.804.499.833,00
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00	3.103.200,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		15.941.862.000,00	24.330.171.497,00	152,62	18.657.013.888,00

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.673.157.609,00 atau 30,41% adapun rincian dari Pendapatan Lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp367.682.200,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.436.779.570,00, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp1.069.097.370,00 atau 74,41% dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan :		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan mesin	0,00	270.407.200,00	-	1.104.679.570,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	118.862.000,00	45.681.000,00	38,43	114.200.000,00
3	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	196.500.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	7.500.000,00	-	19.700.000,00
5	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	20.000.000,00	44.094.000,00	220,47	1.700.000,00
Jumlah		138.862.000,00	367.682.200,00	264,78	1.436.779.570,00

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp367.682.200,00 terdiri dari Pendapatan dari hasil penjualan kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp270.407.200,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Penjualan Barang Milik Daerah berupa sisa material bongkaran sebesar Rp45.681.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Pendapatan dari pemanfaatan aset daerah berupa ternak sebesar Rp7.500.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Penjualan Aset Lain-Lain sebesar Rp44.094.000,00.

- b. Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah TA 2025 sebesar Rp719.098.773,00 dan TA 2024 sebesar Rp719.235.120,00, dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp136.347,00. Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah TA 2025 sebesar Rp719.098.773,00 merupakan dana kompensasi/imbal jasa kepada Pemerintah Daerah Kab. Tegal atas Sumber Mata Air pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- c. Realisasi pendapatan Jasa Giro TA 2025 sebesar Rp1.466.237.073,00 pada Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan TA 2024 sebesar Rp2.178.867.317,00, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp712.630.244,00 atau 32,71%.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- d. Realisasi Pendapatan Bunga TA 2025 sebesar Rp7.796.438.278,00 pada Penempatan Uang Pemerintah Daerah merupakan pendapatan dari bunga deposito pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan TA 2024 sebesar Rp8.512.829.227,00, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp716.390.949,00 atau 8,42%.
- e. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2025 sebesar Rp6.300.000,00 pada Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan TA 2024 sebesar Rp7.155.000,00, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp855.000,00 atau 11,95%.
- f. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2025 sebesar Rp416.666.736,00 dan TA 2024 sebesar Rp441.287.840,00, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp24.621.104,00 atau 5,58%. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2025 sebesar Rp416.666.736,00 terdiri dari pengembalian bantuan BOP pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp169.839.910,00, pengembalian dari temuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp58.126.286,00 dan kompensasi lahan pemakaman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp188.700.540,00.
- g. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 sebesar Rp86.614.965,00 dan TA 2024 sebesar Rp2.384.307.605,00, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp2.297.692.640,00 atau 96,37%. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 sebesar Rp86.614.965,00 merupakan pendapatan denda keterlambatan pekerjaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp86.614.965,00.
- h. Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2025 sebesar Rp1.033.280.093,00 pada Badan Pendapatan Daerah dan TA 2024 sebesar Rp1.168.949.176,00, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp135.669.083,00 atau 11,61% dengan rincian dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.8 Pendapatan Denda Pajak

	Pendapatan Denda Pajak	TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	5.577.833,00
2	Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	35.657.769,00
3	Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.364.549,00
4	Denda Pajak Reklame	0,00	14.888.197,00	-	6.677.783,00
5	Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.979.137,00
6	Denda Pajak Air Tanah	0,00	2.270.992,00	-	693.622,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	12.500,00	-	2.467.500,00
8	Pendapatan Denda Pajak Minerba	0,00	22.511.798,00	-	4.423.111,00
9	Pendapatan Denda Pajak PBB	0,00	593.849.226,00	-	1.110.107.872,00
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	106.310.880,00	-	0,00
11	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	275.303.000,00	-	0,00
12	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	18.133.500,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	1.033.280.093,00	-	1.168.949.176,00

- i. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2025 sebesar Rp50.512.377,00 dan TA 2024 sebesar Rp0,00.
- j. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 sebesar Rp12.385.841.002,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.804.499.833,00, dibandingkan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar Rp10.581.341.169,00 atau 586,39%. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 sebesar Rp1.804.499.833,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan pendapatan dari pengembalian bantuan sosial sebesar Rp205.800.000,00, pendapatan dari pengembalian bantuan keuangan sebesar Rp28.222.000,00, pendapatan dari pengembalian belanja barang dan jasa sebesar Rp703.484.871,00, pendapatan dari pengembalian belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp1.238.905.396,00, pendapatan dari belanja hibah sebesar Rp9.276.359.235,00 dan pendapatan dari pengembalian belanja modal sebesar Rp933.069.500,00.
- k. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2025 sebesar Rp1.500.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp3.103.200,00, dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp1.603.200,00 atau 51,66%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2025 sebesar Rp1.500.000,00 terdapat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.



5.1.1.b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Realisasi pendapatan transfer dalam TA 2025 sebesar Rp2.378.626.054.997,00 dan TA 2024 sebesar Rp2.387.793.407.306,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.9. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer :		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.895.620.984.305,00	1.886.042.182.217,00	99,49	1.809.126.435.120,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	329.102.117.000,00	328.961.888.000,00	99,96	329.169.928.000,00
3	Transfer Pemerintah - Provinsi	166.279.385.500,00	163.621.984.780,00	98,40	249.497.044.186,00
Jumlah Pendapatan Transfer		2.391.002.486.805,00	2.378.626.054.997,00	99,48	2.387.793.407.306,00

5.1.1.b.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan meliputi Dana Transfer Umum-DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2025 sebesar Rp1.886.042.182.217,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.809.126.435.120,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	39.442.862.000,00	33.709.756.600,00	85,46	38.009.124.000,00
2)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.305.134.049.000,00	1.303.491.093.061,00	99,87	1.235.995.119.000,00
3)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	551.044.073.305,00	548.841.332.556,00	99,60	535.122.192.120,00
Jumlah Pendapatan Transfer PemerintahPusat		1.895.620.984.305,00	1.886.042.182.217,00	99,49	1.809.126.435.120,00

Dasar Hukum Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,25% atau Rp76.915.747.097,00. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:



5.1.1.b.1.1 Dana Transfer Umum -DBH

Realisasi Dana Transfer Umum DBH TA 2025 sebesar Rp33.709.756.600,00 dan TA 2024 sebesar Rp38.009.124.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.11. Dana Transfer Umum DBH

Dana Transfer Umum DBH	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.260.515.000,00	3.084.439.500,00	72,40	4.002.874.000,00
2 DBH PPh Pasal 21	19.252.453.000,00	13.453.641.000,00	69,88	16.903.684.000,00
3 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	753.587.100,00	-	1.276.559.000,00
4 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	14.627.709.000,00	15.045.771.000,00	102,86	13.894.842.000,00
5 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	41.915.000,00	62.783.000,00	149,78	50.970.000,00
6 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	34.464.000,00	-	83.687.000,00
7 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	4.438.000,00	16.831.000,00	379,25	33.217.000,00
8 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	3.783.000,00	-	3.710.000,00
9 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.375.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	337.597.000,00	337.597.000,00	100,00	553.138.000,00
11 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	916.860.000,00	916.860.000,00	100,00	1.206.441.000,00
Jumlah Dana Transfer Umum DBH	39.442.862.000,00	33.709.756.600,00	85,46	38.009.124.000,00

5.1.1.b.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi DAU TA 2025 sebesar Rp1.303.491.093.061,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp1.305.134.049.000,00 atau 99,87% dan TA 2024 sebesar Rp1.235.995.119.000,00.

5.1.1.b.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi DAK TA 2025 sebesar Rp548.841.332.556,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp551.044.073.305,00 atau 99,60% dan TA 2024 sebesar Rp535.122.192.120,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi DAK Fisik TA 2025 sebesar Rp37.844.328.871,00 dan TA 2024 sebesar Rp79.999.415.685,00 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.499.870.000,00	1.344.140.940,00	89,62	1.148.191.500,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	296.297.000,00	195.011.537,00	65,82	5.626.412.230,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	228.000.000,00	210.877.800,00	92,49	18.292.869.468,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	286.796.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	10.355.400.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.824.859.100,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	2.639.690.000,00	2.593.098.800,00	98,23	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	25.810.769.000,00	25.602.025.830,00	99,19	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	5.937.200.925,00
10	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.771.472.393,00
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	14.127.185.200,00
12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	2.336.574.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	2.519.075.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	7.928.293.000,00	7.899.173.964,00	99,63	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.417.000.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	13.356.379.869,00
Jumlah DAK Fisik		38.402.919.000,00	37.844.328.871,00	98,55	79.999.415.685,00

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi DAK Non Fisik TA 2025 sebesar Rp510.997.003.685,00 dan TA 2024 sebesar Rp455.122.776.435,00 sebagai berikut:

Tabel 5.13 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	166.681.927.363,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	4.930.000.000,00
3	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	167.229.745.000,00	167.181.230.478,00	99,97	0,00
4	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	4.332.500.000,00	4.332.500.000,00	100,00	0,00
5	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	185.753.161.704,00
6	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	6.899.751.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
7	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	3.571.124.000,00
8	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	23.020.500.000,00
9	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	7.129.900.000,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.302.889.535,00	14.302.889.535,00	100,00	18.396.959.909,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	668.170.000,00	668.170.000,00	100,00	0,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	14.104.869.038,00	14.104.869.038,00	100,00	12.291.050.080,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	100,00	0,00
14	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	390.760.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00	1.123.000.000,00
16	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	545.689.500,00
17	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	442.320.000,00	442.320.000,00	100,00	375.517.000,00
18	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.221.095.732,00	2.221.095.732,00	100,00	2.286.141.000,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	22.882.752.000,00	22.882.117.000,00	100,00	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00	465.000.000,00
21	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	7.991.880.000,00	7.956.554.000,00	99,56	0,00
22	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
23	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.504.070.000,00	19.097.587.502,00	93,14	21.262.294.879,00
24	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	252.561.845.000,00	252.420.652.500,00	99,94	0,00
25	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	717.000.000,00	705.000.000,00	98,33	0,00
26	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	3.786.358.000,00	3.786.357.900,00	100,00	0,00
Jumlah DAK Non Fisik		512.641.154.305,00	510.997.003.685,00	99,68	455.122.776.435,00

5.1.1.b.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya meliputi Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa dan Insentif Fiskal. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2025 sebesar Rp328.961.888.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp329.169.928.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Desa	321.870.852.000,00	321.730.623.000,00	99,96	316.239.825.000,00
2	Insentif Fiskal	7.231.265.000,00	7.231.265.000,00	100,00	12.930.103.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		329.102.117.000,00	328.961.888.000,00	99,96	329.169.928.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.b.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Realisasi Transfer antar Daerah TA 2025 sebesar Rp163.621.984.780,00 dan TA 2024 sebesar Rp249.497.044.186,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.15. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	157.348.732.000,00	154.873.323.614,00	98,43	226.314.945.686,00
2	Bantuan Keuangan	8.930.653.500,00	8.748.661.166,00	97,96	23.182.098.500,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		166.279.385.500,00	163.621.984.780,00	98,40	249.497.044.186,00

Dibandingkan realisasi TA 2024 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp85.875.059.406,00 atau 34,42%. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

5.1.1.b.3.a Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp154.873.323.614,00 dan TA 2024 sebesar Rp226.314.945.686,00 sesuai dengan Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.16 Pendapatan Bagi Hasil

Bagi Hasil Pajak :		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	5.507.708.000,00	4.952.252.053,00	89,91	45.325.661.584,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	268.512.000,00	3.614.367.740,00	1.346,07	29.186.428.489,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	66.094.381.000,00	62.696.789.728,00	94,86	70.240.681.405,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	250.576.000,00	250.594.521,00	100,01	238.215.426,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi	85.227.555.000,00	83.359.319.572,00	97,81	81.323.958.782,00
Jumlah		157.348.732.000,00	154.873.323.614,00	98,43	226.314.945.686,00

5.1.1.b.3.b Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp8.748.661.166,00 dan TA 2024 sebesar Rp23.182.098.500,00 sesuai dengan Rekomendasi Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota dengan rincian pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.17. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	TMMD	893.500.000,00	893.500.000,00	100,00	660.000.000,00
2	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	0,00	0,00	0,00	9.727.534.000,00
3	Bantuan Sarana Prasarana	8.037.153.500,00	7.855.161.166,00	97,73	12.786.817.000,00
4	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	0,00	0,00	0,00	7.747.500,00
JUMLAH		8.930.653.500,00	8.748.661.166,00	97,96	23.182.098.500,00

5.1.1.c. Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2025 sebesar Rp0,00 dan TA 2024 sebesar Rp3.071.648.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.18. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah :		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	3.071.648.000,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah		0,00	0,00	0,00	3.071.648.000,00

Dibandingkan realisasi tahun 2024 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.071.648.000,00 atau 100,00%.

5.1.2. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT). Dalam TA 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat sebanyak 48 PD yang merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2025 adalah sebesar Rp2.787.992.397.837,00 dan realisasi sebesar Rp2.616.780.856.458,00 serta realisasi TA 2024 sebesar Rp2.594.809.696.551,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.19. Belanja Daerah

Belanja Daerah :		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	2.368.203.152.339,00	2.215.332.470.671,00	93,54	2.228.815.083.770,80
2	Belanja Modal	417.124.245.498,00	399.297.238.516,00	95,73	364.288.585.185,00
3	Belanja Tidak Terduga	2.665.000.000,00	2.151.147.271,00	80,72	1.706.027.596,00
Jumlah		2.787.992.397.837,00	2.616.780.856.458,00	93,86	2.594.809.696.551,80



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.a Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Tegal meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.368.203.152.339,00 dan realisasi sebesar Rp2.215.332.470.671,00 serta realisasi TA 2024 sebesar Rp2.228.815.083.770,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.20. Belanja Operasi

Belanja Operasi		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.271.343.359.377,00	1.199.553.911.642,00	94,35	1.165.882.185.148,00
2	Belanja Barang dan Jasa	981.231.242.462,00	900.910.267.590,00	91,81	903.280.437.788,80
3	Belanja Hibah	93.078.150.500,00	92.587.598.939,00	99,47	130.417.060.834,00
4	Belanja Bantuan Sosial	22.550.400.000,00	22.280.692.500,00	98,80	29.235.400.000,00
Jumlah		2.368.203.152.339,00	2.215.332.470.671,00	93,54	2.228.815.083.770,80

5.1.2.a.1 Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.271.343.359.377,00 dengan realisasi sebesar Rp1.199.553.911.642,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.165.882.185.148,00. Belanja Pegawai per PD dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.21. Belanja Pegawai per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	793.204.033.746,00	763.305.886.409,00	96,23	719.074.029.705,00
2	Dinas Kesehatan	106.238.686.600,00	98.970.108.724,00	93,16	100.448.609.672,00
3	RSUD dr. Soeselo	52.097.840.693,00	46.792.019.823,00	89,82	46.728.296.816,00
4	RSUD Suradadi	10.360.047.000,00	9.362.549.068,00	90,37	9.033.015.139,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.916.539.800,00	10.641.813.371,00	89,30	12.180.110.862,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	3.930.056.500,00	3.483.056.088,00	88,63	3.648.131.861,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.870.822.500,00	2.489.547.217,00	86,72	2.476.766.404,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	5.564.319.800,00	4.984.575.626,00	89,58	5.189.984.092,00
9	Dinas Sosial	2.592.218.300,00	2.282.113.010,00	88,04	2.303.999.398,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	2.475.605.000,00	2.185.143.147,00	88,27	2.652.392.707,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.843.610.800,00	9.218.785.152,00	93,65	9.765.188.867,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.550.349.000,00	4.343.214.696,00	95,45	4.642.236.279,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.769.596.000,00	4.468.819.247,00	93,69	4.697.850.582,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.491.114.000,00	2.369.258.252,00	95,11	2.450.202.466,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
15	Dinas Perhubungan	3.834.061.300,00	3.381.958.455,00	88,21	3.762.173.809,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.065.093.000,00	2.772.080.941,00	90,44	2.688.475.810,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	6.999.109.518,00	6.310.598.829,00	90,16	7.072.305.472,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.484.328.500,00	2.142.821.319,00	86,25	2.074.517.465,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.168.831.800,00	3.365.246.432,00	80,72	3.889.524.296,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.672.808.700,00	2.341.385.076,00	87,60	2.656.268.756,00
21	Dinas Perikanan	2.101.029.700,00	1.883.147.281,00	89,63	2.010.185.859,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	4.216.156.400,00	4.031.186.071,00	95,61	4.418.750.446,00
23	Sekretariat Daerah	12.722.662.300,00	11.639.361.401,00	91,49	11.308.429.323,00
24	Sekretariat DPRD	40.741.204.340,00	40.033.038.798,00	98,26	39.815.970.903,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.237.447.600,00	3.114.201.543,00	96,19	2.956.373.379,00
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	119.995.225.500,00	107.954.845.223,00	89,97	109.864.006.488,00
27	Badan Pendapatan Daerah	14.590.847.000,00	11.874.062.918,00	81,38	12.855.895.046,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.053.654.000,00	3.852.741.433,00	95,04	3.782.867.523,00
29	Inspektorat	4.721.019.152,00	4.290.405.710,00	90,88	4.227.166.450,00
30	Kecamatan Adiwerna	1.494.028.500,00	1.330.059.860,00	89,03	1.358.286.286,00
31	Kecamatan Balapulang	1.282.796.728,00	1.101.951.442,00	85,90	1.120.204.965,00
32	Kecamatan Bojong	1.514.637.200,00	1.396.320.273,00	92,19	1.220.424.682,00
33	Kecamatan Bumijawa	1.620.428.000,00	1.470.663.099,00	90,76	1.361.150.946,00
34	Kecamatan Dukuhturi	1.368.330.000,00	1.190.883.051,00	87,03	1.378.794.670,00
35	Kecamatan Dukuhwaru	1.139.334.300,00	947.599.771,00	83,17	1.160.741.474,00
36	Kecamatan Jatinegara	1.210.917.000,00	1.108.684.735,00	91,56	1.040.702.763,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	1.472.132.400,00	1.333.011.153,00	90,55	1.411.526.596,00
38	Kecamatan Kramat	1.933.367.400,00	1.711.082.753,00	88,50	1.759.924.366,00
39	Kecamatan Lebaksiu	1.387.192.400,00	1.193.679.823,00	86,05	1.302.286.256,00
40	Kecamatan Margasari	1.655.252.500,00	1.509.035.858,00	91,17	1.521.408.662,00
41	Kecamatan Pagerbarang	1.199.911.400,00	1.045.472.424,00	87,13	990.149.181,00
42	Kecamatan Pangkah	1.365.588.800,00	1.154.105.803,00	84,51	1.201.157.830,00
43	Kecamatan Slawi	3.844.896.400,00	3.560.375.924,00	92,60	3.913.212.048,00
44	Kecamatan Suradadi	1.028.467.800,00	878.289.221,00	85,40	1.146.919.816,00
45	Kecamatan Talang	1.281.137.000,00	1.164.627.826,00	90,91	1.239.491.012,00
46	Kecamatan Tarub	1.343.395.600,00	1.226.366.801,00	91,29	1.384.182.288,00
47	Kecamatan Warureja	1.415.923.600,00	1.319.537.269,00	93,19	1.445.277.726,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.277.303.800,00	1.028.193.296,00	80,50	1.252.617.706,00
JUMLAH		1.271.343.359.377,00	1.199.553.911.642,00	94,35	1.165.882.185.148,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Sedangkan untuk rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	771.735.036.463,00	723.994.644.932,00	93,81	727.980.320.245,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	426.464.422.929,00	408.199.721.337,00	95,71	98.005.205.950,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	271.584.499.443,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.827.854.040,00	37.305.287.040,00	98,62	36.672.251.220,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.832.765.852,00	1.276.713.938,00	45,07	1.408.525.266,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.453.120.000,00	1.448.263.400,00	99,67	1.117.696.350,00
7	Belanja Pegawai BLUD	31.030.160.093,00	27.329.280.995,00	88,07	29.113.686.674,00
Jumlah		1.271.343.359.377,00	1.199.553.911.642,00	94,35	1.165.882.185.148,00

a) Belanja Gaji dan tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2025 sebesar Rp723.994.644.932,00 dan TA 2024 sebesar Rp727.980.320.245,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.23. Belanja Gaji dan tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Gaji Pokok	582.154.987.006,00	553.326.720.416,00	95,05	557.268.014.468,00
2	Tunjangan Keluarga	57.177.205.877,00	51.668.261.159,00	90,37	51.878.207.899,00
3	Tunjangan Jabatan	5.217.907.150,00	4.729.754.936,00	90,64	5.351.825.000,00
4	Tunjangan Fungsional	32.521.864.800,00	30.510.647.000,00	93,82	33.696.801.460,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	4.432.744.040,00	3.756.577.000,00	84,75	4.171.812.000,00
6	Tunjangan Beras	33.445.109.980,00	29.894.084.970,00	89,38	29.744.559.740,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.243.787.673,00	10.115.160.930,00	89,96	7.837.131.686,00
8	Pembulatan Gaji	15.052.883,00	7.046.700,00	46,81	7.757.756,00
9	Iuran Jaminan kesehatan	39.540.004.341,00	35.427.881.197,00	89,60	33.450.094.886,00
10	Iuran Jaminan kecelakaan kerja	1.559.370.043,00	1.139.637.091,00	73,08	1.143.534.041,00
11	Iuran Jaminan Kematian	4.427.002.670,00	3.418.873.533,00	77,23	3.430.581.309,00
Jumlah		771.735.036.463,00	723.994.644.932,00	93,81	727.980.320.245,00

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan TA 2025 sebesar Rp408.199.721.337,00 dan TA 2024 sebesar Rp369.589.705.393,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.24. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	108.050.000.000,00	97.299.758.271,00	90,05	97.782.005.950,00
2	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	210.000.000,00	178.500.000,00	85,00	188.700.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	55.200.000,00	55.200.000,00	100,00	34.500.000,00
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	318.149.222.929,00	310.666.263.066,00	97,65	271.584.499.443,00
Jumlah		426.646.422.929	408.199.721.337	95,72	369.589.705.393,00

c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Realisasi Belanja tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp310.666.263.066,00 dan TA 2024 sebesar Rp271.584.499.443,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.25. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.716.911.699,00	7.534.811.706,00	86,44	8.424.784.318,00
2	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.257.462.250,00	831.288.665,00	66,11	938.200.630,00
3	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	187.463.227.330,00	182.308.741.759,00	97,25	208.253.189.980,00
4	Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.335.090.160,00	2.062.821.100,00	88,34	2.116.783.700,00
5	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	526.000.120,00	202.500.000,00	38,50	875.912.500,00
6	Honorarium	0,00	0,00	0,00	11.480.853.189,00
7	Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	1.118.990.000,00
8	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	115.371.494.570,00	115.259.063.036,00	99,90	27.988.509.126,00
9	Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	1.723.536.800,00	1.723.536.800,00	100,00	1.617.026.000,00
10	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	755.500.000,00	743.500.000,00	98,41	8.770.250.000,00
Jumlah		318.149.222.929,00	310.666.263.066,00	97,65	271.584.499.443,00

Pada Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat realisasi pada akun belanja honorarium dan jasa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Kondisi ini terjadi karena adanya penyesuaian klasifikasi belanja, di mana anggaran yang semula dialokasikan pada akun tersebut telah direklasifikasi ke akun belanja jasa.

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 sebesar Rp37.305.287.040,00 dan TA 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp36.672.251.220,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.26. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Uang Representasi	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.112.580.000,00
2	Tunjangan keluarga	119.000.700,00	119.000.700,00	100,00	116.499.600,00
3	Tunjangan Beras	132.890.700,00	132.890.700,00	100,00	134.990.880,00
4	Uang Paket	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.340.000,00
5	Tunjangan Jabatan	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.612.023.000,00
6	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	148.717.800,00	148.717.800,00	100,00	111.172.950,00
7	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00
8	Tunjangan Reses	2.176.527.000,00	2.131.500.000,00	97,93	1.470.000.000,00
9	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota	495.396,00	495.396,00	100,00	412.830,00
10	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota	14.597.864.528,00	14.597.864.528,00	100,00	14.684.528.560,00
11	Tunjangan Transportasi	8.529.372.916,00	8.529.372.916,00	100,00	8.048.188.400,00
12	Uang Jasa Pengabdian	477.540.000,00	0,00	0,00	466.515.000,00
Jumlah		37.827.854.040,00	37.305.287.040,00	98,62	36.672.251.220,00

e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH /WKDH

Realisasi belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH TA 2025 adalah sebesar Rp 1.276.713.938,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.408.525.266,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.27. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Gaji pokok	70.000.000,00	42.900.000,00	61,29	3.900.000,00
2	Tunjangan Keluarga	9.800.000,00	5.148.000,00	52,53	336.000,00
3	Tunjangan Jabatan	140.000.000,00	77.220.000,00	55,16	7.020.000,00
4	Tunjangan Beras	10.080.000,00	4.779.720,00	47,42	506.940,00
5	Tunjangan pph/ Tunjangan Khusus	5.000.000,00	1.039.710,00	20,79	63.421,00
6	Pembulatan Gaji	10.000,00	1.080,00	10,80	0,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan	10.000.000,00	4.555.200,00	45,55	450.240,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	93.600,00	1,87	9.360,00
9	Iuran Jaminan Kematian	7.000.000,00	280.800,00	4,01	28.080,00
10	Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.283.088.301,00	1.084.982.055,00	47,52	1.236.220.564,00
11	Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	292.787.551,00	55.713.773,00	19,03	159.990.661,00
Jumlah		2.832.765.852,00	1.276.713.938,00	45,07	1.408.525.266,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

f) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 sebesar Rp1.448.263.400,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.117.696.350,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.28. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	360.360.000,00
2 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.060.000.000,00	1.055.143.400,00	99,54	757.336.350,00
Jumlah	1.453.120.000,00	1.448.263.400,00	99,67	1.117.696.350,00

g) Belanja Pegawai BLUD

Realisasi belanja Belanja Pegawai BLUD TA 2025 sebesar Rp27.329.280.995,00 dan TA 2024 sebesar Rp29.113.686.674,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.29. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Puskesmas Danasari	257.600.000,00	287.069.161,00	111,44	309.675.500,00
2 Puskesmas Kesamiran	186.400.000,00	157.650.000,00	84,58	216.230.000,00
3 Puskesmas Margasari	444.224.000,00	399.938.000,00	90,03	492.813.000,00
4 Puskesmas Kesambi	319.600.000,00	286.600.000,00	89,67	372.520.000,00
5 Puskesmas Bumijawa	815.400.000,00	756.875.000,00	92,82	789.889.600,00
6 Puskesmas Bojong	486.960.000,00	470.450.000,00	96,61	547.150.000,00
7 Puskesmas Balapulang	913.150.000,00	878.450.000,00	96,20	907.640.000,00
8 Puskesmas Kalibakung	219.800.000,00	199.850.000,00	90,92	271.920.000,00
9 Puskesmas Pagerbarang	438.850.000,00	421.200.000,00	95,98	533.240.000,00
10 Puskesmas Lebaksiu	433.550.000,00	408.400.000,00	94,20	486.010.000,00
11 Puskesmas Kambangan	202.500.000,00	202.500.000,00	100,00	245.060.000,00
12 PuskesmasJatinegara	567.900.000,00	524.950.000,00	92,44	690.560.000,00
13 PuskesmasKedungbanteng	393.400.000,00	366.850.000,00	93,25	424.480.000,00
14 PuskesmasPangkajene	453.700.000,00	426.700.000,00	94,05	518.450.000,00
15 PuskesmasPenusupan	266.630.000,00	266.630.000,00	100,00	297.760.000,00
16 PuskesmasSlawi	322.000.000,00	315.400.000,00	97,95	328.600.000,00
17 PuskesmasAdiwerna	254.800.000,00	249.250.000,00	97,82	332.950.000,00
18 Puskesmas Pagiyanten	215.040.000,00	203.640.000,00	94,70	280.910.000,00
19 Puskesmas Talang	224.600.000,00	215.700.000,00	96,04	280.440.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Pegawai BLUD		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
20	Puskesmas Kaladawa	239.620.000,00	219.385.000,00	91,56	288.074.410,00
21	Puskesmas Dukuhturi	305.500.000,00	292.850.000,00	95,86	371.420.000,00
22	Puskesmas Kupu	211.250.000,00	174.400.000,00	82,56	208.550.000,00
23	Puskesmas Dukuhwaru	309.600.000,00	290.100.000,00	93,70	391.710.000,00
24	Puskesmas Tarub	568.900.000,00	489.050.000,00	85,96	621.550.000,00
25	Puskesmas Kramat	213.740.000,00	191.550.000,00	89,62	253.300.000,00
26	Puskesmas Bangungalih	227.920.000,00	201.829.272,00	88,55	256.995.232,00
27	Puskesmas Suradadi	261.846.000,00	235.187.981,00	89,82	299.807.056,00
28	Puskesmas Jatibogor	329.329.000,00	314.653.000,00	95,54	385.723.000,00
29	Puskesmas Warurejo	550.412.000,00	468.507.500,00	85,12	536.431.500,00
30	RSUD dr Soeselo Slawi	20.238.691.093,00	17.274.754.081,00	85,36	17.007.387.376,00
31	RSUD Suradadi	157.248.000,00	138.912.000,00	88,34	166.440.000,00
Jumlah		31.030.160.093,00	27.329.280.995,00	88,07	29.113.686.674,00

5.1.2.a.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp900.910.267.590,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp981.231.242.462,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp903.280.437.788,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.30. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja barang	125.387.683.708,67	113.203.438.472,00	90,28	117.341.667.467,00
2	Belanja Jasa	292.241.737.612,26	265.321.627.679,00	90,79	255.909.497.566,00
3	Belanja Pemeliharaan	49.652.428.521,40	47.619.011.895,00	95,90	36.457.572.485,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	36.496.650.907,67	31.625.501.172,00	86,65	54.266.720.391,00
5	Belanja Uang dan atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat	17.118.750.000,00	16.792.295.353,00	98,09	17.284.043.200,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	141.592.292.301,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	119.834.994.209,00	118.961.055.346,00	99,27	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	20.504.070.000,00	20.307.623.153,00	99,04	21.675.342.912,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	319.994.927.503,00	287.079.714.520,00	89,71	258.753.301.466,80
Jumlah		981.231.242.462,00	900.910.267.590,00	91,81	903.280.437.788,80

a) Belanja Barang

Realisasi belanja barang TA 2025 sebesar Rp113.203.438.472,00 dan TA 2024 sebesar Rp117.341.667.467,00 dengan rincian pada lampiran 5.1

Sedangkan rincian belanja barang per PD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.31. Belanja Barang per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	22.173.672.124,00	20.377.395.861,00	91,90	19.443.087.947,00
2	Dinas Kesehatan	29.030.172.307,00	25.326.406.230,00	87,24	33.843.998.029,00
3	RSUD dr. Soeselo	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RSUD Suradadi	23.563.936,00	3.416.000,00	14,50	9.312.400,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.274.616.705,00	10.423.873.257,00	92,45	7.090.328.389,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.872.240.110,60	1.839.023.866,00	98,23	829.946.927,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	869.820.888,00	779.567.211,00	89,62	948.546.810,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	803.030.621,00	756.948.691,00	94,26	1.005.980.063,00
9	Dinas Sosial	1.267.338.736,00	1.201.208.094,00	94,78	1.642.842.062,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	2.085.656.596,00	1.879.350.743,00	90,11	1.923.482.885,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.899.411.027,00	4.078.777.089,00	83,25	6.260.701.273,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.438.778.039,00	5.534.605.385,00	85,96	3.938.079.850,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.323.518.526,00	1.092.895.337,00	82,57	771.906.800,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.603.925.564,00	5.459.275.283,00	97,42	6.631.831.468,00
15	Dinas Perhubungan	4.359.286.073,33	4.160.260.379,00	95,43	2.893.843.018,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	531.424.697,00	519.600.890,00	97,78	573.515.377,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	633.533.258,74	567.748.257,00	89,62	1.024.513.055,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	416.004.594,00	395.652.377,00	95,11	524.194.650,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.152.214.733,00	2.958.006.861,00	93,84	1.349.292.613,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	465.483.100,00	362.080.448,00	77,79	418.956.096,00
21	Dinas Perikanan	641.334.107,00	611.479.152,00	95,34	502.120.600,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1.304.140.507,00	1.141.327.040,00	87,52	979.177.456,00
23	Sekretariat Daerah	9.612.177.688,00	9.171.340.107,00	95,41	5.883.438.311,00
24	Sekretariat DPRD	4.728.657.328,00	4.408.617.516,00	93,23	7.774.502.980,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	943.506.374,00	759.220.919,00	80,47	954.463.315,00
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.155.656.800,00	962.506.499,00	83,29	1.489.242.939,00
27	Badan Pendapatan Daerah	1.344.579.408,00	1.271.001.101,00	94,53	1.135.197.638,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.164.566.785,00	1.068.646.096,00	91,76	1.186.633.331,00
29	Inspektorat	1.139.634.672,00	881.865.691,00	77,38	1.008.377.834,00
30	Kecamatan Adiwerna	265.910.000,00	225.292.333,00	84,73	235.437.824,00
31	Kecamatan Balapulang	218.222.050,00	180.601.438,00	82,76	185.349.348,00
32	Kecamatan Bojong	241.680.525,00	216.210.024,00	89,46	211.376.900,00
33	Kecamatan Bumijawa	344.356.500,00	276.675.400,00	80,35	249.245.100,00
34	Kecamatan Dukuhturi	265.946.600,00	235.003.948,00	88,37	223.019.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
35	Kecamatan Dukuhwaru	222.679.250,00	171.910.800,00	77,20	135.900.400,00
36	Kecamatan Jatinegara	229.817.200,00	182.389.082,00	79,36	160.699.800,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	193.428.100,00	150.636.985,00	77,88	137.581.070,00
38	Kecamatan Kramat	376.691.576,00	361.769.162,00	96,04	344.464.906,00
39	Kecamatan Lebaksiu	239.413.398,00	191.898.056,00	80,15	189.191.800,00
40	Kecamatan Margasari	207.714.600,00	193.474.300,00	93,14	167.635.900,00
41	Kecamatan Pagerbarang	236.864.100,00	217.317.500,00	91,75	167.225.500,00
42	Kecamatan Pangkah	313.323.876,00	285.506.800,00	91,12	212.854.680,00
43	Kecamatan Slawi	663.124.182,00	569.105.338,00	85,82	693.482.611,00
44	Kecamatan Suradadi	234.115.650,00	211.946.277,00	90,53	202.739.732,00
45	Kecamatan Talang	207.626.400,00	190.283.931,00	91,65	154.780.887,00
46	Kecamatan Tarub	266.210.762,00	237.380.000,00	89,17	235.117.400,00
47	Kecamatan Wareja	221.902.931,00	183.264.500,00	82,59	247.935.700,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.180.655.704,00	930.676.218,00	78,83	1.150.114.793,00
JUMLAH		125.387.683.708,67	113.203.438.472,00	90,28	117.341.667.467,00

b) Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa TA 2025 sebesar Rp265.321.627.679,00 dan TA 2024 sebesar Rp255.909.497.566,00 dengan rincian per PD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.32. Belanja Jasa per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.964.526.612,00	20.875.400.191,00	87,11	25.022.589.976,00
2	Dinas Kesehatan	51.153.679.661,00	48.322.797.103,00	94,47	52.739.955.491,00
3	RSUD dr. Soeselo	71.220.000,00	71.179.416,00	99,94	71.179.416,00
4	RSUD Suradadi	1.083.122.989,00	961.883.302,00	88,81	751.675.743,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.707.702.825,00	19.129.505.227,00	92,38	13.746.509.469,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	3.037.343.344,00	2.816.160.254,00	92,72	3.189.041.525,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.194.277.200,00	1.131.018.149,00	94,70	1.289.271.997,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.032.697.800,00	2.847.806.021,00	93,90	4.263.852.920,00
9	Dinas Sosial	2.606.886.016,00	2.306.861.130,00	88,49	1.616.665.111,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	14.320.771.144,00	14.000.589.121,00	97,76	13.553.348.795,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.534.187.030,00	2.369.731.987,00	93,51	2.043.275.081,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	21.001.037.330,00	19.978.426.766,00	95,13	19.157.273.581,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.475.796.464,00	1.355.782.943,00	91,87	1.285.298.066,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.303.477.292,00	7.941.082.533,00	95,64	4.809.100.532,00
15	Dinas Perhubungan	60.703.416.280,00	51.434.937.039,00	84,73	50.351.906.437,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.042.751.914,00	2.851.936.133,00	93,73	3.330.467.532,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	4.766.126.093,26	4.493.891.140,00	94,29	4.058.186.424,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.808.857.979,00	1.679.166.245,00	92,83	1.620.787.594,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.793.511.582,00	6.420.978.403,00	94,52	6.360.797.875,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	850.498.085,00	772.014.279,00	90,77	746.447.184,00
21	Dinas Perikanan	1.224.258.924,00	1.181.668.366,00	96,52	1.068.898.140,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	5.756.661.655,00	5.336.088.155,00	92,69	4.146.633.776,00
23	Sekretariat Daerah	12.356.700.899,00	11.566.736.078,00	93,61	10.002.381.367,00
24	Sekretariat DPRD	12.925.221.850,00	12.192.992.672,00	94,33	12.791.805.074,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.513.808.776,00	1.983.809.970,00	78,92	1.991.120.686,00
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4.365.282.500,00	3.688.982.211,00	84,51	2.587.775.626,00
27	Badan Pendapatan Daerah	2.473.801.690,00	2.316.698.032,00	93,65	1.651.484.821,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.520.484.536,00	4.219.497.401,00	93,34	1.336.448.955,00
29	Inspektorat	3.309.135.158,00	2.116.302.134,00	63,95	2.312.849.392,00
30	Kecamatan Adiwerna	381.725.500,00	326.786.553,00	85,61	228.050.761,00
31	Kecamatan Balapulang	491.557.900,00	430.930.295,00	87,67	346.812.416,00
32	Kecamatan Bojong	378.776.300,00	351.907.474,00	92,91	262.170.904,00
33	Kecamatan Bumijawa	380.175.000,00	328.495.001,00	86,41	260.957.090,00
34	Kecamatan Dukuhturi	330.828.000,00	287.874.322,00	87,02	222.412.522,00
35	Kecamatan Dukuwaru	353.881.500,00	297.312.749,00	84,01	195.001.486,00
36	Kecamatan Jatinegara	362.828.492,00	315.649.006,00	87,00	240.512.918,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	421.703.400,00	392.148.386,00	92,99	372.273.450,00
38	Kecamatan Kramat	521.250.924,00	491.910.007,00	94,37	398.121.054,00
39	Kecamatan Lebaksiu	354.518.058,00	309.322.638,00	87,25	225.535.491,00
40	Kecamatan Margasari	409.041.100,00	385.832.849,00	94,33	254.264.622,00
41	Kecamatan Pagerbarang	349.619.000,00	331.024.376,00	94,68	238.710.725,00
42	Kecamatan Pangkah	366.376.474,00	350.000.956,00	95,53	298.122.245,00
43	Kecamatan Slawi	1.734.754.730,00	1.578.241.688,00	90,98	1.274.750.805,00
44	Kecamatan Suradadi	324.816.200,00	302.162.566,00	93,03	216.795.032,00
45	Kecamatan Talang	553.809.588,00	528.280.879,00	95,39	363.714.838,00
46	Kecamatan Tarub	408.230.388,00	350.337.918,00	85,82	219.158.801,00
47	Kecamatan Warureja	324.863.120,00	284.381.715,00	87,54	234.391.316,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.895.738.310,00	1.315.105.900,00	69,37	2.160.712.504,00
JUMLAH		292.241.737.612,26	265.321.627.679,00	90,79	255.909.497.566,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Sedangkan rincian belanja jasa disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.33. Belanja Jasa

Belanja Jasa	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Jasa kantor	204.212.888.407,26	182.880.698.917,00	89,55	172.558.232.933,00
2 Belanja luran Jaminan/Asuransi	42.950.250.000,00	41.950.284.199,00	97,67	45.956.864.147,00
3 Belanja Sewa Tanah	55.300.000,00	41.475.000,00	75,00	54.900.000,00
4 Belanja Sewa Peralatan Mesin	7.893.584.380,00	7.150.892.556,00	90,59	9.203.430.772,00
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.265.985.000,00	775.941.000,00	61,29	851.360.000,00
6 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	375.000.000,00	350.555.000,00	93,48	315.395.000,00
7 Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	9.670.379.750,00	8.865.789.633,00	91,68	6.680.146.858,00
8 Belanja Jasa Konsultasi non Konstruksi	9.746.317.125,00	8.446.472.113,00	86,66	5.497.972.800,00
9 Belanja Kursus/Pelatihan, sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan	15.972.492.950,00	14.778.489.261,00	92,52	14.791.195.056,00
10 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	99.540.000,00	81.030.000,00	81,40	0,00
Jumlah	292.241.737.612,26	265.321.627.679,00	90,79	255.909.497.566,00

c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp47.619.011.895,00 dan TA 2024 sebesar Rp36.457.572.485,00 dengan rincian per PD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.34. Belanja Pemeliharaan per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	433.581.000,00	416.748.586,00	96,12	650.257.499,00
2	Dinas Kesehatan	1.504.300.400,00	1.198.248.870,00	79,65	967.227.297,00
3	RSUD dr. Soeselo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RSUD Suradadi	179.302.000,00	176.089.000,00	98,21	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.839.961.470,00	25.431.535.710,00	98,42	18.996.081.500,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.715.389.391,40	1.686.609.977,00	98,32	1.830.644.580,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	412.009.000,00	383.250.345,00	93,02	393.789.099,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	310.530.000,00	278.513.088,00	89,69	323.328.006,00
9	Dinas Sosial	477.349.200,00	472.742.400,00	99,03	273.530.884,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	215.134.000,00	214.547.745,00	99,73	248.657.500,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	321.250.000,00	317.440.503,00	98,81	125.281.566,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.066.560.600,00	1.979.043.680,00	95,77	2.815.191.688,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	348.335.010,00	317.619.528,00	91,18	313.104.837,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	834.320.800,00	829.619.500,00	99,44	136.536.197,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
15	Dinas Perhubungan	1.717.755.700,00	1.623.752.688,00	94,53	622.473.491,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	237.753.000,00	228.205.588,00	95,98	129.412.548,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	114.610.000,00	113.851.650,00	99,34	226.522.686,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	217.385.000,00	203.025.352,00	93,39	210.436.616,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.215.504.200,00	2.182.190.517,00	98,50	1.527.562.275,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	163.181.000,00	138.176.889,00	84,68	122.601.873,00
21	Dinas Perikanan	149.801.000,00	149.028.500,00	99,48	143.472.744,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	658.712.000,00	569.434.405,00	86,45	697.733.233,00
23	Sekretariat Daerah	4.182.100.200,00	4.032.334.814,00	96,42	993.514.877,00
24	Sekretariat DPRD	1.221.799.750,00	1.077.168.069,00	88,16	1.142.449.302,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	455.084.600,00	395.473.570,00	86,90	184.220.685,00
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	338.671.700,00	256.933.232,00	75,86	316.319.036,00
27	Badan Pendapatan Daerah	156.063.000,00	150.518.823,00	96,45	195.852.544,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	320.610.700,00	312.605.974,00	97,50	534.597.838,00
29	Inspektorat	751.497.700,00	690.048.684,00	91,82	786.496.158,00
30	Kecamatan Adiwerna	132.888.500,00	113.317.100,00	85,27	48.252.000,00
31	Kecamatan Balapulang	394.798.000,00	388.607.000,00	98,43	28.252.300,00
32	Kecamatan Bojong	57.776.000,00	30.968.000,00	53,60	29.581.100,00
33	Kecamatan Bumijawa	41.400.000,00	34.159.256,00	82,51	34.271.500,00
34	Kecamatan Dukuhturi	116.420.000,00	111.703.646,00	95,95	125.346.500,00
35	Kecamatan Dukuhwaru	40.208.000,00	22.714.000,00	56,49	199.110.500,00
36	Kecamatan Jatinegara	143.601.000,00	20.023.000,00	13,94	16.448.000,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	140.822.000,00	138.021.599,00	98,01	203.624.000,00
38	Kecamatan Kramat	128.554.000,00	124.962.000,00	97,21	49.974.000,00
39	Kecamatan Lebaksiu	68.010.000,00	41.989.500,00	61,74	35.713.000,00
40	Kecamatan Margasari	262.966.600,00	260.313.500,00	98,99	59.034.000,00
41	Kecamatan Pagerbarang	70.930.000,00	67.493.940,00	95,16	77.611.000,00
42	Kecamatan Pangkah	27.590.000,00	24.309.000,00	88,11	72.370.800,00
43	Kecamatan Slawi	130.261.500,00	112.723.600,00	86,54	292.712.050,00
44	Kecamatan Suradadi	53.530.000,00	50.362.500,00	94,08	37.382.300,00
45	Kecamatan Talang	93.290.000,00	85.586.500,00	91,74	14.220.500,00
46	Kecamatan Tarub	58.680.000,00	47.718.171,00	81,32	84.072.500,00
47	Kecamatan Warureja	55.968.000,00	45.742.000,00	81,73	12.556.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	76.182.500,00	73.539.896,00	96,53	129.743.876,00
JUMLAH		49.652.428.521,40	47.619.011.895,00	95,90	36.457.572.485,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Sedangkan rincian belanja pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.35. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pemeliharaan Tanah	241.266.900,00	238.119.000,00	98,70	398.514.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin	11.520.064.750,00	10.383.853.892,00	90,14	10.129.475.602,00
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.930.440.680,00	11.200.687.813,00	93,88	5.945.252.033,00
4	Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.836.242.191,40	25.684.211.240,00	99,41	19.962.530.850,00
5	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	124.414.000,00	112.139.950,00	90,13	21.800.000,00
Jumlah		49.652.428.521,40	47.619.011.895,00	95,90	36.457.572.485,00

d) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja perjalanan dinas TA 2025 sebesar Rp31.625.501.172,00 dan TA 2024 sebesar Rp54.266.720.391,00 dengan rincian per PD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.36 Belanja Perjalanan Dinas per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	951.015.525,00	611.257.073,00	64,27	1.360.191.283,00
2	Dinas Kesehatan	2.652.176.193,00	2.266.262.135,00	85,45	3.927.382.649,00
3	RSUD dr. Soeselo	0,00	0,00	0,00	46.904.846,00
4	RSUD Suradadi	8.577.750,00	7.873.920,00	91,79	22.632.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.389.492.150,00	1.298.994.761,00	93,49	2.511.524.729,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	400.845.225,00	396.909.830,00	99,02	1.295.959.786,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	206.979.925,00	205.133.902,00	99,11	494.098.340,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	392.839.354,00	387.133.237,00	98,55	1.073.772.768,00
9	Dinas Sosial	255.859.218,00	254.524.740,00	99,48	480.741.213,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	791.768.175,00	707.887.092,00	89,41	1.055.691.032,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	187.776.690,00	158.941.911,00	84,64	407.118.254,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	355.324.300,00	340.772.224,00	95,90	796.157.140,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	329.879.100,00	327.040.743,00	99,14	631.365.220,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	614.702.350,00	479.789.185,00	78,05	1.104.604.789,00
15	Dinas Perhubungan	605.785.750,67	591.521.012,00	97,65	1.123.081.199,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	253.188.650,00	251.795.238,00	99,45	598.774.537,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	134.616.595,00	125.965.856,00	93,57	359.982.823,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	327.295.075,00	286.760.197,00	87,62	531.877.549,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	373.869.250,00	338.783.160,00	90,62	1.062.479.054,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	128.626.300,00	123.241.196,00	95,81	251.250.543,00
21	Dinas Perikanan	104.022.300,00	102.575.450,00	98,61	174.054.312,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	793.639.160,00	574.220.678,00	72,35	728.178.519,00
23	Sekretariat Daerah	3.258.573.597,00	3.140.114.929,00	96,36	3.622.291.778,00
24	Sekretariat DPRD	16.147.952.050,00	13.657.417.866,00	84,58	22.532.028.943,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	606.779.475,00	594.429.928,00	97,96	1.448.211.957,00
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	784.799.050,00	676.480.789,00	86,20	1.598.955.758,00
27	Badan Pendapatan Daerah	546.760.600,00	508.109.172,00	92,93	517.335.948,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	522.588.625,00	519.250.142,00	99,36	1.467.774.487,00
29	Inspektorat	1.123.930.525,00	959.131.570,00	85,34	1.348.183.243,00
30	Kecamatan Adiwerna	45.411.000,00	24.345.000,00	53,61	38.174.000,00
31	Kecamatan Balapulang	71.209.500,00	67.185.000,00	94,35	82.678.783,00
32	Kecamatan Bojong	48.424.950,00	39.462.058,00	81,49	32.208.700,00
33	Kecamatan Bumijawa	47.620.000,00	19.130.391,00	40,17	51.748.000,00
34	Kecamatan Dukuhturi	70.793.500,00	57.330.000,00	80,98	64.783.500,00
35	Kecamatan Dukuwaru	38.650.000,00	21.310.370,00	55,14	19.020.000,00
36	Kecamatan Jatinegara	51.991.000,00	30.222.000,00	58,13	26.440.000,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	24.206.000,00	19.094.636,00	78,88	37.759.710,00
38	Kecamatan Kramat	52.200.100,00	48.216.800,00	92,37	56.052.640,00
39	Kecamatan Lebaksiu	65.457.000,00	45.605.000,00	69,67	45.877.000,00
40	Kecamatan Margasari	41.072.000,00	39.452.000,00	96,06	52.658.500,00
41	Kecamatan Pagerbarang	27.621.500,00	27.393.000,00	99,17	27.462.000,00
42	Kecamatan Pangkah	77.631.000,00	42.582.000,00	54,85	42.355.000,00
43	Kecamatan Slawi	100.413.000,00	76.642.825,00	76,33	124.560.982,00
44	Kecamatan Suradadi	33.787.000,00	32.431.500,00	95,99	56.380.000,00
45	Kecamatan Talang	20.907.000,00	19.071.098,00	91,22	28.403.500,00
46	Kecamatan Tarub	25.611.150,00	18.005.000,00	70,30	31.646.500,00
47	Kecamatan Warureja	34.471.000,00	27.480.500,00	79,72	32.875.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.369.511.250,00	1.078.224.058,00	78,73	843.031.877,00
JUMLAH		36.496.650.907,67	31.625.501.172,00	86,65	54.266.720.391,00

Sedangkan rincian belanja perjalanan dinas disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.37 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.496.650.907,67	31.625.501.172,00	86,65	54.266.720.391,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		36.496.650.907,67	31.625.501.172,00	86,65	54.266.720.391,00

e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

Realisasi belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA 2025 sebesar Rp16.792.295.353,00 dan Realisasi TA 2024 sebesar Rp17.284.043.200,00 dengan rincian per PD sebagai berikut:

Tabel 5.38. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.902.400.000,00	3.778.650.000,00	96,83	6.551.800.000,00
2	Dinas Kesehatan	42.250.000,00	22.500.000,00	53,25	97.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.260.400.000,00	6.260.400.000,00	100,00	3.315.540.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	750.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	3.666.840.000,00	3.652.290.000,00	99,60	4.116.966.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	19.140.000,00	15.730.000,00	82,18	93.900.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00	49.150.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	0,00
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	11.250.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	797.000.000,00	797.000.000,00	100,00	701.850.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	6.000.000,00
15	Sekretariat Daerah	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	112.500.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	82.500.000,00	60.000.000,00	72,72	82.500.000,00
17	Badan Pendapatan Daerah	572.495.000,00	466.278.500,00	81,44	517.628.800,00
18	Kecamatan Adiwerna	4.800.000,00	900.000,00	18,75	2.500.000,00
19	Kecamatan Balapulang	4.800.000,00	4.740.000,00	98,75	0,00
20	Kecamatan Bojong	11.100.000,00	8.700.000,00	78,37	2.000.000,00
21	Kecamatan Bumijawa	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	3.600.000,00
22	Kecamatan Dukuhwaru	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	4.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
23	Kecamatan Jatinegara	15.600.000,00	13.300.000,00	85,25	7.400.000,00
24	Kecamatan Kedungbanteng	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	1.500.000,00
25	Kecamatan Kramat	78.100.000,00	78.100.000,00	100,00	71.900.000,00
26	Kecamatan Lebaksiu	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	2.500.000,00
27	Kecamatan Margasari	33.300.000,00	33.100.000,00	99,39	11.200.000,00
28	Kecamatan Pagerbarang	52.500.000,00	52.000.000,00	99,04	6.800.000,00
29	Kecamatan Pangkah	38.100.000,00	33.300.000,00	87,40	4.000.000,00
30	Kecamatan Slawi	1.047.375.000,00	1.034.706.853,00	98,79	1.093.758.400,00
31	Kecamatan Suradadi	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	5.000.000,00
32	Kecamatan Talang	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	2.500.000,00
33	Kecamatan Tarub	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	8.500.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	22.500.000,00	15.000.000,00	66,66	0,00
JUMLAH		17.118.750.000,00	16.792.295.353,00	98,09	17.284.043.200,00

Sedangkan rincian belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.39. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.549.405.000,00	15.315.835.000,00	98,50	15.691.691.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.569.345.000,00	1.476.460.353,00	94,08	1.592.352.200,00
Jumlah		17.118.750.000,00	16.792.295.353,00	98,09	17.284.043.200,00

f) Belanja Barang dan jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2025 sebesar Rp0,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi TA 2024 adalah sebesar Rp141.592.292.301,00.

g) Belanja Barang dan jasa BOSP

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP TA 2025 sebesar Rp118.961.055.346,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp119.834.994.209,00 dan realisasi TA 2024 adalah sebesar Rp0,00.

h) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas TA 2025 sebesar Rp20.307.623.153,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp20.504.070.000,00 dan realisasi TA 2024 adalah sebesar Rp21.675.342.912,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.40 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Puskesmas Danasari	553.701.719,00	543.435.275,00	98,15	561.113.343,00
2 Puskesmas Kesamiran	413.369.174,00	410.609.120,00	99,33	437.196.852,00
3 Puskesmas Margasari	702.820.814,00	701.464.318,00	99,81	880.523.165,00
4 Puskesmas Kesambi	598.807.263,00	598.505.148,00	99,95	541.016.037,00
5 Puskesmas Bumijawa	1.545.717.572,00	1.537.322.335,00	99,46	1.377.706.948,00
6 Puskesmas Bojong	852.443.522,00	849.112.437,00	99,61	735.167.067,00
7 Puskesmas Balapulang	673.010.999,00	667.117.279,00	99,12	727.784.987,00
8 Puskesmas Kalibakung	657.199.998,00	653.117.813,00	99,38	692.323.197,00
9 Puskesmas Pagerbarang	654.281.822,00	652.375.475,00	99,71	847.399.250,00
10 Puskesmas Lebaksiu	730.895.272,00	730.127.272,00	99,89	665.249.720,00
11 Puskesmas Kambangan	621.564.768,00	620.814.946,00	99,88	563.706.676,00
12 Puskesmas Jatinegara	919.302.731,00	904.046.500,00	98,34	1.120.933.950,00
13 Puskesmas Kedungbanteng	618.868.424,00	612.515.925,00	98,97	675.008.308,00
14 Puskesmas Pangkah	1.095.214.586,00	1.091.583.686,00	99,67	1.081.542.782,00
15 Puskesmas Penusupan	630.196.487,00	622.038.533,00	98,71	696.690.137,00
16 Puskesmas Slawi	684.576.516,00	681.186.416,00	99,50	889.956.159,00
17 Puskesmas Adiwerna	762.692.173,00	761.711.884,00	99,87	827.747.311,00
18 Puskesmas Pagiyanten	643.516.377,00	599.286.821,00	93,13	819.671.557,00
19 Puskesmas Talang	599.725.515,00	599.664.765,00	99,99	641.379.529,00
20 Puskesmas Kaladawa	658.240.018,00	656.904.068,00	99,80	747.751.085,00
21 Puskesmas Dukuhturi	627.277.302,00	621.397.547,00	99,06	787.949.112,00
22 Puskesmas Kupu	573.322.152,00	573.137.552,00	99,97	585.545.772,00
23 Puskesmas Dukuhwaru	707.912.772,00	706.590.287,00	99,81	755.937.662,00
24 Puskesmas Tarub	661.365.623,00	634.944.016,00	96,00	649.833.400,00
25 Puskesmas Kramat	736.770.770,00	724.023.985,00	98,27	780.581.526,00
26 Puskesmas Bangungalih	587.856.115,00	584.884.939,00	99,49	590.801.944,00
27 Puskesmas Suradadi	667.236.139,00	661.072.336,00	99,08	629.509.021,00
28 Puskesmas Jatibogor	566.185.512,00	565.531.500,00	99,88	627.686.010,00
29 Puskesmas Warurejo	759.997.865,00	743.100.975,00	97,78	737.630.405,00
Jumlah	20.504.070.000,00	20.307.623.153,00	99,04	21.675.342.912,00

i) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 sebesar Rp287.079.714.520,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp258.753.301.466,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.41 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Puskesmas Danasari	1.429.057.640,00	1.043.744.051,00	73,04	1.150.463.591,00
2 Puskesmas Kesamiran	1.460.781.756,00	1.077.529.138,00	73,76	1.168.944.745,00
3 Puskesmas Margasari	3.349.038.407,00	3.246.958.825,00	96,95	3.258.016.388,00
4 Puskesmas Kesambi	1.578.806.686,00	1.550.087.194,00	98,18	1.586.895.827,00
5 Puskesmas Bumijawa	5.347.211.572,00	4.920.605.150,00	92,02	5.232.711.485,00
6 Puskesmas Bojong	2.556.884.591,00	2.402.589.652,00	93,97	2.403.567.131,00
7 Puskesmas Balapulang	4.102.220.386,00	3.882.417.879,00	94,64	3.663.515.591,00
8 Puskesmas Kalibakung	2.043.997.570,00	1.768.511.520,00	86,52	1.866.539.345,00
9 Puskesmas Pagerbarang	2.592.679.502,00	2.568.468.569,00	99,07	2.355.889.280,00
10 Puskesmas Lebaksiu	2.025.826.063,00	1.902.585.168,00	93,92	1.947.867.406,00
11 Puskesmas Kambangan	1.883.376.881,00	1.586.132.879,00	84,22	1.640.556.421,00
12 Puskesmas Jatinegara	4.547.653.329,00	4.248.545.147,00	93,42	4.022.930.943,00
13 Puskesmas Kedungbanteng	2.168.579.240,00	2.062.667.516,00	95,12	2.092.937.170,00
14 Puskesmas Pangkah	2.385.003.559,00	2.158.584.944,00	90,51	2.322.211.764,00
15 Puskesmas Penusupan	1.719.092.273,00	1.635.888.802,00	95,16	1.639.229.078,00
16 Puskesmas Slawi	2.295.642.193,00	1.935.681.444,00	84,32	2.065.179.501,00
17 Puskesmas Adiwerna	2.419.249.738,00	2.407.874.042,00	99,53	2.322.611.034,00
18 Puskesmas Pagiyanten	2.215.919.786,00	2.136.315.601,00	96,41	2.044.779.694,00
19 Puskesmas Talang	1.882.057.924,00	1.861.380.611,00	98,90	1.574.325.528,00
20 Puskesmas Kaladawa	1.665.936.759,00	1.650.564.474,00	99,08	1.433.796.051,00
21 Puskesmas Dukuhturi	1.980.551.715,00	1.904.072.759,00	96,14	1.800.766.792,00
22 Puskesmas Kupu	1.399.254.915,00	1.093.180.228,00	78,13	1.102.846.923,00
23 Puskesmas Dukuhwaru	3.267.514.763,00	2.394.536.393,00	73,28	2.366.678.156,00
24 Puskesmas Tarub	2.656.503.517,00	2.249.869.124,00	84,69	2.421.713.213,00
25 Puskesmas Kramat	1.706.949.766,00	1.569.963.817,00	91,97	1.376.285.941,80
26 Puskesmas Bangungalih	1.523.927.919,00	1.204.571.519,00	79,04	1.252.143.666,00
27 Puskesmas Suradadi	1.884.244.484,00	1.622.712.247,00	86,12	1.633.969.665,00
28 Puskesmas Jatibogor	1.669.214.228,00	1.551.932.997,00	92,97	1.663.427.351,00
29 Puskesmas Warurejo	3.659.485.929,00	3.233.295.290,00	88,35	3.294.668.222,00
30 RSUD dr Soeselo Slawi	211.227.415.434,00	184.961.378.810,00	87,57	157.625.846.938,00
31 RSUD Suradadi	39.350.848.978,00	39.247.068.730,00	99,74	38.421.986.626,00
Jumlah	319.994.927.503,00	287.079.714.520,00	89,71	258.753.301.466,80

5.1.2.a.3 Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2025 sebesar Rp92.587.598.939,00 dan TA 2024 sebesar Rp130.417.060.834,00 dengan rincian per PD disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.42. Belanja Hibah per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51.641.687.000,00	51.780.166.287,00	100,27	32.008.700.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	300.000.000,00	298.296.600,00	99,43	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.720.000.000,00	1.685.338.000,00	97,98	4.903.883.000,00
4	Dinas Sosial	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	380.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	350.000.000,00	302.845.000,00	86,53	119.550.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	484.920.000,00	484.920.000,00	100,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	500.000.000,00	472.089.552,00	94,42	500.000.000,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	100,00	2.250.000.000,00
11	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	32.185.000.000,00	31.730.000.000,00	98,59	40.075.000.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	137.029.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.566.543.500,00	3.503.943.500,00	98,24	49.427.898.834,00
JUMLAH		93.078.150.500,00	92.587.598.939,00	99,47	130.417.060.834,00

Sedangkan rincian belanja hibah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.43. Belanja Hibah

Belanja Hibah	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Hibah Kepada Pemerintah Pusat	2.220.000.000,00	2.122.738.000,00	95,62	51.782.973.000,00
2 Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.259.920.000,00	36.728.151.152,00	98,57	75.848.250.000,00
3 Belanja Hibah Dana BOS	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	0,00
4 Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.766.543.500,00	2.766.543.500,00	100,00	2.785.837.834,00
5 Belanja Hibah Dana BOSP	50.586.687.000,00	50.725.166.287,00	100,27	0,00
Jumlah	93.078.150.500,00	92.587.598.939,00	99,47	130.417.060.834,00

a) Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2025 adalah sebesar Rp2.122.738.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.44. Hibah Kepada Pemerintah Pusat

No	Nama Perangkat Daerah	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	437.400.000,00	Hibah Barang
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kejaksanaan Negeri Kabupaten Tegal	976.224.000,00	Hibah Barang
		TNI AL Tegal	177.561.000,00	Hibah Barang
		TNI AU Tegal	177.430.000,00	Hibah Barang
		Polres Tegal	176.472.000,00	Hibah Barang
		Brigif 4/Dewa Ratna Tegal	177.651.000,00	Hibah Barang
Jumlah			2.122.738.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

b) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Realisasi hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 sebesar Rp36.728.151.152,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.45. Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

NO	Nama Perangkat Daerah	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	KORPRI Kabupaten Tegal	298.296.600,00	Hibah Uang
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	LSM Anak Bangsa Tiga Daerah (Abang Tidar) Cabang Kabupaten Tegal	100.000.000,00	Hibah Uang
		DPC Gerakan Dukung Prabowo (Gardu Prabowo) Kabupaten Tegal	200.000.000,00	Hibah Uang
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Mahasiswa Institut Bakti Negara Tegal	81.600.000,00	Hibah Uang
		Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi	225.320.000,00	Hibah Uang
		Politeknik Purbaya	178.000.000,00	Hibah Uang
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	KONI	1.000.000.000,00	Hibah Uang
		Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)	300.000.000,00	Hibah Uang
		Pramuka Kwartir Cabang Tegal	500.000.000,00	Hibah Uang
		PTMSI	150.000.000,00	Hibah Uang
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial	302.845.000,00	Hibah Barang
6	Dinas Komunikasi Dan Informatika	LPPL Kabupaten Tegal Radio Slawi FM	350.000.000,00	Hibah Uang
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	PKK	472.089.552,00	Hibah Uang
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pegirikan Desa Pegirikan	100.000.000,00	Hibah Uang
		MI NAHDLATUL ULAMA 01 DESA TEGALANDONG	40.000.000,00	Hibah Uang
		MTs Raudlotul Tholibin Pangkah	150.000.000,00	Hibah Uang
		PAUD KB Aisyiyah Karangmulya	50.000.000,00	Hibah Uang
		PAUD TK Aisyiyah Bustanul Athfal Ketileng	50.000.000,00	Hibah Uang
		PAUD TPQ Daaruttaqwa Desa Adiwerna	70.000.000,00	Hibah Uang
		SD BUDI MULIA MUHAMMADIYAH ADIWERNA	100.000.000,00	Hibah Uang
		SD MUHAMMADIYAH KADEMANGARAN	100.000.000,00	Hibah Uang
		SMP Maarif NU 01 Pangkah	150.000.000,00	Hibah Uang
9	Dinas Sosial	Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial	30.000.000,00	Hibah Uang
10	Sekretariat Daerah	Badan dan Lembaga Bina Mental Spiritual	31.680.000.000,00	Hibah Uang
		Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Slawi	50.000.000,00	Hibah Uang
Jumlah			36.728.151.152,00	

c) Hibah kepada Partai Politik

Realisasi Hibah Pada Partai Politik TA 2025 sebesar Rp2.766.543.500,00 yaitu sebagai berikut:

1) Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa sebesar Rp903.966.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 2) Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar Rp535.510.500,00.
- 3) Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar Rp402.535.000,00.
- 4) Hibah kepada Partai Golongan Karya sebesar Rp408.485.000,00.
- 5) Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera sebesar Rp213.594.500,00.
- 6) Hibah kepada Partai Amanat Nasional sebesar Rp111.793.500,00.
- 7) Hibah kepada Partai Persatuan Pembangunan sebesar Rp190.659.000,00.

5.1.2.a.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2025 sebesar Rp22.280.692.500,00 dan TA 2024 sebesar Rp29.235.400.000,00 dengan rincian rincian per PD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.46. Belanja Bantuan Sosial per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	15.080.400.000,00	14.861.092.500,00	98,54	15.080.400.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100,00	11.280.000.000,00
3	Dinas Sosial	1.170.000.000,00	1.119.600.000,00	95,64	1.725.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00
JUMLAH		22.550.400.000,00	22.280.692.500,00	98,80	29.235.400.000,00

Sedangkan rincian belanja bantuan sosial disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.47. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.470.000.000,00	7.419.600.000,00	99,33	13.005.000.000,00
2	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	15.080.400.000,00	14.861.092.500,00	98,55	16.230.400.000,00
Jumlah		22.550.400.000,00	22.280.692.500,00	98,80	29.235.400.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp7.419.600.000,00 berupa belanja bantuan sosial jaminan hidup lansia sebesar Rp1.119.600.000,00 dan bantuan sosial uang untuk perbaikan RTLH sebesar Rp6.300.000.000,00.

Realisasi Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp14.861.092.500,00 berupa bantuan sosial kepada organisasi non Pemerintah bidang Pendidikan sebesar Rp14.861.092.500,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.b Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Tegal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp399.297.238.516,00 dan TA 2024 sebesar Rp364.288.585.185,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.48. Belanja Modal

Belanja Modal :	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Tanah	8.943.287.000,00	3.749.375.000,00	41,92	0,00
2 Peralatan Mesin	117.276.749.270,00	112.650.087.395,00	96,05	93.915.643.627,00
3 Gedung dan Bangunan	84.039.745.152,00	80.023.255.964,00	95,22	117.628.988.778,00
4 Jalan, Jaringan dan Irigasi	180.149.820.558,00	176.193.275.755,00	97,80	131.886.142.737,00
5 Aset Tetap Lainnya	26.371.364.438,00	26.388.086.692,00	100,06	20.849.910.043,00
6 Aset Lainnya	343.279.080,00	293.157.710,00	85,40	7.900.000,00
Jumlah Belanja Modal	417.124.245.498,00	399.297.238.516,00	95,73	364.288.585.185,00

5.1.2.b.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 sebesar Rp3.749.375.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian per PD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.49. Belanja Modal Tanah per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	4.693.087.000,00	0,00	0,00	0,00
2	RSUD dr. Soeselo	4.250.200.000,00	3.749.375.000,00	88,22	0,00
JUMLAH		8.943.287.000,00	3.749.375.000,00	41,92	0,00

Sedangkan rincian belanja tanah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.50. Belanja Modal Tanah

BM - Tanah	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Tanah Persil	4.693.087.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Belanja Modal Tanah BLUD	4.250.200.000,00	3.749.375.000,00	88,21	0,00
Jumlah	8.943.287.000,00	3.749.375.000,00	41,92	0,00

a) Realisasi Belanja Modal Tanah Persil TA 2025 sebesar Rp0,00 dan TA 2024 Rp0,00 berupa Tanah Persil Lainnya.

b) Realisasi Belanja modal tanah BLUD TA 2025 sebesar Rp3.749.375.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.b.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp112.650.087.395,00 dan TA 2024 sebesar Rp93.915.643.627,00 dengan rincian per PD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.51. Belanja Peralatan dan Mesin per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.079.856.610,00	22.984.426.517,00	99,59	31.658.978.730,00
2	Dinas Kesehatan	8.308.079.699,00	6.835.354.921,00	82,27	10.417.409.049,00
3	RSUD dr. Soeselo	34.871.004.994,00	34.218.349.286,00	98,13	25.971.306.557,00
4	RSUD Suradadi	2.688.437.950,00	2.678.476.337,00	99,63	8.814.069.410,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.706.153.050,00	2.609.266.049,00	96,42	611.334.612,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	56.456.000,00	53.457.500,00	94,69	58.825.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.121.535.000,00	1.043.635.200,00	93,05	212.726.500,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	1.277.667.250,00	1.177.091.767,00	92,13	531.375.250,00
9	Dinas Sosial	13.832.160,00	13.832.160,00	100,00	26.898.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	274.430.160,00	264.058.997,00	96,22	1.293.827.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	364.430.500,00	364.320.800,00	99,97	120.230.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.440.857.700,00	3.334.937.102,00	96,92	2.969.946.500,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.166.664.300,00	1.148.892.000,00	98,48	639.409.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	168.835.000,00	165.210.180,00	97,85	338.710.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.156.676.700,00	1.124.793.920,00	97,24	1.158.336.000,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	410.451.817,00	398.668.101,00	97,13	402.809.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	57.092.000,00	51.934.220,00	90,97	177.710.000,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	485.951.000,00	475.938.000,00	97,94	96.478.409,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	369.408.000,00	355.155.552,00	96,14	273.842.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.320.000,00	2.320.000,00	100,00	11.250.000,00
21	Dinas Perikanan	339.572.000,00	327.984.000,00	96,59	
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	48.765.000,00	47.699.999,00	97,82	1.125.784.225,00
23	Sekretariat Daerah	9.614.785.400,00	8.590.963.748,00	89,35	1.945.045.200,00
24	Sekretariat DPRD	10.341.946.580,00	9.984.348.602,00	96,54	1.850.822.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.253.192.500,00	1.168.164.405,00	93,22	351.889.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.139.676.500,00	3.075.207.392,00	97,95	170.899.000,00
27	Badan Pendapatan Daerah	356.630.000,00	344.080.500,00	96,48	20.500.000,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	324.473.900,00	313.762.720,00	96,70	156.745.100,00
29	Inspektorat	1.230.549.200,00	1.029.457.332,00	83,66	750.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
30	Kecamatan Adiwerna	360.762.000,00	351.431.799,00	97,41	63.550.000,00
31	Kecamatan Balapulang	427.340.040,00	423.518.200,00	99,11	123.940.000,00
32	Kecamatan Bojong	405.197.000,00	402.865.800,00	99,42	114.855.000,00
33	Kecamatan Bumijawa	377.022.000,00	376.460.800,00	99,85	123.720.000,00
34	Kecamatan Dukuhturi	330.932.000,00	329.701.800,00	99,63	81.590.000,00
35	Kecamatan Dukuhwaru	393.232.000,00	382.582.200,00	97,29	64.620.000,00
36	Kecamatan Jatinegara	452.872.000,00	438.166.804,00	96,75	73.000.000,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	404.193.000,00	401.474.304,00	99,33	98.300.000,00
38	Kecamatan Kramat	743.589.500,00	725.924.735,00	97,62	231.650.000,00
39	Kecamatan Lebaksiu	374.961.000,00	371.717.800,00	99,14	45.832.000,00
40	Kecamatan Margasari	396.196.500,00	393.335.800,00	99,28	254.920.000,00
41	Kecamatan Pagerbarang	388.232.000,00	380.594.299,00	98,03	85.050.000,00
42	Kecamatan Pangkah	371.100.000,00	366.935.250,00	98,88	35.100.000,00
43	Kecamatan Slawi	571.649.160,00	552.076.800,00	96,58	205.361.085,00
44	Kecamatan Suradadi	416.232.000,00	413.460.800,00	99,33	17.500.000,00
45	Kecamatan Talang	415.392.000,00	407.915.801,00	98,20	62.700.000,00
46	Kecamatan Tarub	560.896.000,00	544.948.800,00	97,16	57.700.000,00
47	Kecamatan Warureja	402.882.000,00	402.520.800,00	99,91	18.200.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	814.338.100,00	802.667.496,00	98,57	0,00
JUMLAH		117.276.749.270,00	112.650.087.395,00	96,05	93.915.643.627,00

Sedangkan rincian belanja peralatan mesin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.52 Belanja Peralatan dan Mesin

BM - Peralatan dan Mesin		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Besar	8.609.594.950,00	8.549.281.003,00	99,30	1.041.936.250,00
2	Alat Angkutan	36.673.552.100,00	34.832.978.845,00	94,98	5.795.575.800,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	62.439.300,00	60.343.000,00	96,64	639.966.225,00
4	Alat Pertanian	588.500,00	550.000,00	93,46	0,00
5	Alat kantor dan Alat Rumah Tangga	12.506.275.540,00	11.191.899.250,00	89,49	18.434.321.943,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	730.029.300,00	664.331.472,00	91,00	1.655.740.000,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.575.194.109,00	15.377.748.959,00	98,73	29.504.096.020,00
8	Alat Laboratorium	1.498.856.600,00	1.471.238.300,00	98,16	2.141.113.000,00
9	Komputer	8.506.487.817,00	8.101.387.489,00	95,24	6.067.166.112,00
10	Alat Keselamatan Kerja	212.573.000,00	203.834.400,00	95,89	83.985.600,00
11	Rambu- Rambu	601.509.100,00	596.082.950,00	99,10	761.174.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BM - Peralatan dan Mesin		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
12	Peralatan Olahraga	72.680.000,00	71.928.000,00	98,97	4.389.000,00
13	Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	16.691.036.600,00
14	Peralatan dan Mesin BOSP	15.714.291.910,00	15.965.511.068,00	101,60	0,00
15	Peralatan Mesin BLUD	16.512.677.044,00	15.562.972.659,00	94,25	11.095.143.077,00
Jumlah		117.276.749.270,00	112.650.087.395,00	96,05	93.915.643.627,00

a) Realisasi belanja modal Alat besar TA 2025 sebesar Rp8.549.281.003,00 dan Realisasi TA 2024 sebesar Rp1.041.936.250,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.53. Belanja Modal Alat Besar

BM - Alat Besar		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Besar Darat	63.275.000,00	59.137.700,00	93,46	596.700.000,00
2	Alat Bantu	8.546.319.950,00	8.490.143.303,00	99,34	445.236.250,00
Jumlah		8.609.594.950,00	8.549.281.003,00	99,30	1.041.936.250,00

b) Rincian belanja Alat angkutan TA 2025 Rp34.832.978.845,00 sebesar dan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.795.575.800,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.54. Belanja Modal Alat Angkutan

BM - Alat Angkutan		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	36.665.394.100,00	34.824.892.495,00	94,98	5.792.605.000,00
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8.158.000,00	8.086.350,00	99,12	2.970.800,00
Jumlah		36.673.552.100,00	34.832.978.845,00	94,98	5.795.575.800,00

c) Realisasi belanja modal Alat bengkel dan Alat ukur TA 2025 sebesar Rp60.343.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp639.966.225,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.55 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

BM - Alat Bengkel dan Alat Ukur		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Bengkel Bermesin	6.254.000,00	6.230.000,00	99,62	479.975.225,00
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	56.185.300,00	54.113.000,00	96,31	2.841.000,00
3	Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	157.150.000,00
Jumlah		62.439.300,00	60.343.000,00	96,64	639.966.225,00

d) Realisasi belanja modal Alat Pertanian TA 2025 berupa alat pemeliharaan tanaman sebesar Rp550.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- e) Realisasi belanja modal Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga TA 2025 sebesar Rp11.191.899.250,00 dan TA 2024 sebesar Rp18.434.321.943,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.56. Belanja Modal Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

BM - Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Kantor	1.122.540.060,00	958.301.133,00	85,37	1.756.352.484,00
2	Alat Rumah Tangga	11.383.735.480,00	10.233.598.117,00	89,90	16.625.029.459,00
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	52.940.000,00
Jumlah		12.506.275.540,00	11.191.899.250,00	89,49	18.434.321.943,00

- f) Realisasi belanja modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar TA 2025 sebesar Rp664.331.472,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.655.740.000,00 dengan rincian disajikan tabel berikut:

Tabel 5.57. Belanja Modal Pengadaan Studio, Komunukasi dan Pemancar

BM - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Studio	720.729.300,00	655.032.722,00	90,88	1.358.890.000,00
2	Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	296.850.000,00
3	Peralatan Komunikasi Navigasi	9.300.000,00	9.298.750,00	99,99	0,00
Jumlah		730.029.300,00	664.331.472,00	91,00	1.655.740.000,00

- g) Realisasi belanja modal Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan TA 2025 sebesar Rp15.377.748.959,00 dan TA 2024 sebesar Rp29.504.096.020,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.58 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan

BM - Alat Kedokteran dan Kesehatan		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Kedokteran	14.921.463.500,00	14.731.757.710,00	98,73	27.134.737.020,00
2	Alat Kesehatan Umum	653.730.609,00	645.991.249,00	98,82	2.369.359.000,00
Jumlah		15.575.194.109,00	15.377.748.959,00	98,73	29.504.096.020,00

- h) Realisasi belanja modal Alat Laboratorium TA 2025 sebesar Rp1.471.238.300,00 dan TA 2024 sebesar Rp2.141.113.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.59 Belanja Modal Alat Laboratorium

BM - Alat Laboratorium		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Unit Alat Laboratorium	626.856.600,00	615.799.800,00	98,24	357.885.000,00
2	Alat Peraga Praktek Sekolah	12.000.000,00	5.938.500,00	49,49	48.520.000,00
3	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	860.000.000,00	849.500.000,00	98,78	1.734.708.000,00
Jumlah		1.498.856.600,00	1.471.238.300,00	98,16	2.141.113.000,00

i) Realisasi belanja modal Komputer TA 2025 sebesar Rp8.101.387.489,00 dan TA 2024 sebesar Rp6.067.166.112,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.60 Belanja Modal Komputer

BM - Komputer		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Komputer unit	7.774.373.717,00	7.405.287.991,00	95,25	5.929.216.612,00
2	Peralatan Komputer	732.114.100,00	696.099.498,00	95,08	137.949.500,00
Jumlah		8.506.487.817,00	8.101.387.489,00	95,24	6.067.166.112,00

j) Realisasi belanja modal Alat Keselamatan Kerja TA 2025 sebesar Rp203.834.400,00 dan TA 2024 sebesar Rp83.985.600,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.61. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

BM - Alat Keselamatan Kerja		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	17.285.600,00
2	Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3	Alat SAR	212.573.000,00	203.834.400,00	95,89	63.500.000,00
Jumlah		212.573.000,00	203.834.400,00	95,89	83.985.600,00

k) Realisasi belanja modal Rambu-rambu TA 2025 sebesar Rp596.082.950,00 dan TA 2024 sebesar Rp761.174.000,00 berupa rambu bersuar.

l) Realisasi belanja modal Peralatan Olahraga TA 2025 Rp71.928.000,00 berupa Peralatan Permainan dan Peralatan Olahraga lainnya dan TA 2024 Rp4.389.000,00.

5.1.2.b.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp80.023.255.964,00 dan TA 2024 sebesar Rp117.628.988.778,00 dengan rincian per PD disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.62 Belanja Modal Gedung dan Bangunan per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	31.236.124.666,00	29.962.884.996,00	95,92	52.722.319.710,00
2	Dinas Kesehatan	6.562.646.211,00	4.573.120.034,00	69,68	7.191.066.250,00
3	RSUD dr. Soeselo	6.241.234.500,00	6.094.634.350,00	97,65	25.447.018.069,00
4	RSUD Suradadi	311.805.500,00	306.180.200,00	98,20	305.454.591,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.282.000.000,00	24.934.331.250,00	98,62	10.828.309.661,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0,00	0,00	0,00	235.332.000,00
7	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	558.175.520,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	2.459.821.000,00	2.421.956.000,00	98,46	931.996.100,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	166.374.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.172.315.000,00	1.142.918.737,00	97,49	638.744.126,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	27.540.000,00	26.759.500,00	97,17	221.107.291,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	162.500.000,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	105.638.000,00	104.482.000,00	98,91	553.812.000,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	3.712.172.063,00	3.665.228.495,00	98,74	2.767.723.500,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	517.438.000,00	510.897.000,00	98,74	2.379.556.313,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.245.431.000,00	1.202.192.900,00	96,53	933.880.600,00
17	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	4.934.895.000,00
18	Sekretariat Daerah	234.090.000,00	230.634.000,00	98,52	1.937.591.292,00
19	Sekretariat DPRD	1.074.201.000,00	1.063.356.000,00	98,99	1.759.375.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	112.601.205,00
21	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	176.800.000,00	174.303.000,00	98,59	174.944.380,00
22	Inspektorat	949.215.000,00	919.462.200,00	96,87	1.195.955.170,00
23	Kecamatan Adiwerna	0,00	0,00	0,00	89.688.000,00
24	Kecamatan Bojong	96.390.000,00	94.955.000,00	98,51	182.677.000,00
25	Kecamatan Margasari	677.033.000,00	667.259.000,00	98,56	0,00
26	Kecamatan Pagerbarang	281.152.000,00	277.625.000,00	98,75	0,00
27	Kecamatan Slawi	741.285.000,00	729.048.000,00	98,35	729.151.000,00
28	Kecamatan Talang	223.744.512,00	220.335.000,00	98,48	468.741.000,00
JUMLAH		84.039.745.152,00	80.023.255.964,00	95,22	117.628.988.778,00

Sedangkan rincian belanja gedung dan bangunan disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.63. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	77.394.610.652,00	73.654.818.614,00	95,17	110.388.002.807,00
2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	176.800.000,00	174.303.000,00	98,59	576.650.380,00
3	Gedung dan Bangunan BLUD	6.468.334.500,00	6.194.134.350,00	95,76	6.664.335.591,00
Jumlah		84.039.745.152,00	80.023.255.964,00	95,22	117.628.988.778,00

- a) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Tempat Kerja TA 2025 sebesar Rp73.654.818.614,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp110.388.002.807,00 dengan rincian disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 5.64 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

BM - Bangunan Gedung Tempat Kerja		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	31.583.342.775,00	31.035.244.697,00	98,26	28.153.430.923,00
2	Bangunan Kesehatan	5.837.745.211,00	4.150.487.434,00	71,10	22.719.727.500,00
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00
4	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	31.245.137.666,00	29.971.807.996,00	95,92	51.762.157.090,00
5	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	3.171.885.844,00
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	297.920.000,00	293.409.361,00	98,48	0,00
7	Bangunan Fasilitas Umum	8.430.465.000,00	8.203.869.126,00	97,31	4.504.801.450,00
Jumlah		77.394.610.652,00	73.654.818.614,00	95,17	110.388.002.807,00

- b) Realisasi belanja modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2025 sebesar Rp174.303.000,00 berupa pagar dan TA 2024 Rp576.650.380,00.
- c) Realisasi belanja modal Gedung dan bangunan BLUD TA 2025 sebesar Rp6.194.134.350,00 dan TA 2024 sebesar Rp6.664.335.591,00.

5.1.2.b.4 Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp176.193.275.755,00 dan TA 2024 sebesar Rp131.886.142.737,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.65. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.800.000.000,00	2.799.531.000,00	99,98	699.500.000,00
2	RSUD dr. Soeselo	1.053.289.500,00	1.026.147.000,00	97,42	433.197.400,00
3	RSUD Suradadi	179.621.000,00	176.468.000,00	98,24	173.799.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.293.153.500,00	154.739.165.154,00	97,75	113.933.443.358,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	504.204.000,00	491.551.000,00	97,49	354.000.000,00
6	Dinas Perhubungan	11.087.328.558,00	10.823.464.851,00	97,62	8.454.748.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	629.625.000,00	624.662.000,00	99,21	710.538.479,00
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	1.306.843.000,00
9	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	175.500.000,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	335.000.000,00	328.484.000,00	98,05	0,00
11	Kecamatan Kramat	818.501.000,00	804.512.000,00	98,29	1.828.262.000,00
12	Kecamatan Slawi	4.267.910.000,00	4.201.183.000,00	98,44	3.816.311.000,00
13	Kecamatan Margasari	181.188.000,00	178.107.750,00	98,30	0,00
JUMLAH		180.149.820.558,00	176.193.275.755,00	97,80	131.886.142.737,00

Sedangkan rincian belanja jalan, jaringan dan irigasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.66. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

BM - Jalan, Irigasi dan Jaringan		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	161.833.797.500,00	158.224.064.154,00	97,77	120.342.269.737,00
2	Bangunan Air	5.844.217.000,00	5.793.225.000,00	99,13	1.106.346.000,00
3	Instalasi	150.000.000,00	148.267.000,00	98,84	1.374.081.100,00
4	Jaringan	11.268.516.558,00	11.001.572.601,00	97,63	8.630.248.500,00
5	Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	1.053.289.500,00	1.026.147.000,00	97,42	433.197.400,00
Jumlah		180.149.820.558,00	176.193.275.755,00	97,80	131.886.142.737,00

a) Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan TA 2025 sebesar Rp158.224.064.154,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp120.342.269.737,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.67 Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan

BM - Pengadaan Jalan dan Jembatan		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jalan	145.755.797.500,00	143.188.795.025,00	98,24	119.191.959.737,00
2	Jembatan	16.078.000.000,00	15.035.269.129,00	93,51	1.150.310.000,00
Jumlah		161.833.797.500,00	158.224.064.154,00	97,77	120.342.269.737,00

b) Realisasi belanja modal Bangunan Air TA 2025 sebesar Rp5.793.225.000,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.106.346.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.68. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

BM - Bangunan Air irigasi		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Air irigasi	852.117.000,00	842.336.000,00	98,85	0,00
1	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	335.000.000,00	328.484.000,00	98,05	772.489.000,00
2	Bangunan Air kotor	4.657.100.000,00	4.622.405.000,00	99,26	333.857.000,00
Jumlah		5.844.217.000,00	5.793.225.000,00	99,13	1.106.346.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- c) Realisasi belanja modal Instalasi TA 2025 sebesar Rp148.267.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.374.081.100,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.69. Belanja Modal Instalasi

BM - instalasi		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Instalasi Air kotor	0,00	0,00	0,00	699.500.000,00
3	Instalasi Pengolahan Sampah	150.000.000,00	148.267.000,00	98,84	674.581.100,00
Jumlah		150.000.000,00	148.267.000,00	98,84	1.374.081.100,00

- d) Realisasi belanja modal Jaringan Listrik TA 2025 sebesar Rp11.001.572.601,00 dan TA 2024 sebesar Rp8.630.248.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.70 Belanja Modal Jaringan Listrik

BM - Jaringan Listrik		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jaringan Listrik Lainnya	11.268.516.558,00	11.001.572.601,00	97,63	8.630.248.500,00
Jumlah		11.268.516.558,00	11.001.572.601,00	97,63	8.630.248.500,00

- e) Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD TA 2025 sebesar Rp1.026.147.000,00 dan TA 2024 Rp433.197.400,00.

5.1.2.b.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp26.388.086.692,00 dan TA 2024 sebesar Rp20.849.910.043,00 dengan rincian per PD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.71 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	25.985.895.438,00	26.011.565.752,00	100,10	20.744.741.793,00
2	RSUD dr. Soeselo	293.969.000,00	286.650.000,00	97,51	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000,00	58.889.900,00	98,15	582.750,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00	0,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sekretariat Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	104.585.500,00
7	Sekretariat DPRD	15.000.000,00	14.501.040,00	96,67	0,00
JUMLAH		26.371.364.438,00	26.388.086.692,00	100,06	20.849.910.043,00

Sedangkan rincian belanja aset tetap lainnya disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.72 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

BM - Aset Tetap Lainnya	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	9.423.332.000,00	9.079.000.082,00	96,35	6.537.172.386,00
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	60.000.000,00	58.889.900,00	98,15	97.000.000,00
3 Tanaman	0,00	0,00	0,00	582.750,00
4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	16.594.063.438,00	16.963.546.710,00	102,23	14.215.154.907,00
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	293.969.000,00	286.650.000,00	97,51	0,00
Jumlah	26.371.364.438,00	26.388.086.692,00	100,06	20.849.910.043,00

Rincian realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya diatas sebagai berikut:

- Belanja modal Bahan Perpustakaan TA 2025 sebesar Rp9.079.000.082,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp6.537.172.386,00 berupa Bahan Perpustakaan Tercetak.
- Realisasi belanja modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2025 sebesar Rp58.889.900,00 berupa Barang Bercorak Kebudayaan dan realisasi TA 2024 Rp97.000.000,00.
- Realisasi belanja modal Tanaman TA 2025 tidak ada dan realisasi TA 2024 Rp582.750,00.
- Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya BOSP TA 2025 sebesar Rp16.963.546.710,00 dan realisasi TA 2024 Rp14.215.154.907,00.
- Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya BLUD TA 2025 sebesar Rp286.650.000,00 dan realisasi TA 2024 Rp0,00.

5.1.2.b.6 Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2025 sebesar Rp293.157.710,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp343.279.080,00 dan TA 2024 sebesar Rp7.900.000,00 Rincian per PD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.73 Belanja Modal Aset Lainnya per PD

No	Nama Perangkat Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	100.803.080,00	68.137.500,00	67,59	7.900.000,00
2	RSUD dr. Soeselo	130.476.000,00	117.005.000,00	89,68	0,00
3	Dinas Komunikasi Dan Informatika	42.000.000,00	39.405.000,00	93,82	0,00
4	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	70.000.000,00	68.610.210,00	98,01	0,00
JUMLAH		343.279.080,00	293.157.710,00	85,40	7.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.c Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Anggaran BTT TA 2025 adalah sebesar Rp2.665.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.151.147.271,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.74. Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Pembayaran Pengembalian Dana BOP PAUD Kabupaten Tegal TA 2024	30.600.000,00
2	Pembayaran Pengembalian Dana BOS TA 2024 SMP Dharma Bhakti Kabupaten Tegal	60.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/342/B09, Tanggal 10 Februari 2025	118.118.634,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/563/09, Tanggal 29 April 2025	54.417.888,00
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/560/09, Tanggal 29 April 2025	12.168.629,00
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/561/09, Tanggal 29 April 2025	369.145.187,00
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/341/09, Tanggal 19 Februari 2025	15.000.000,00
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/340/09, Tanggal 18 Februari 2025	5.000.000,00
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu sebanyak dua puluh tiga orang, berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/09/260, Tanggal 17 Februari 2025	65.965.115,00
10	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu sebanyak 18 Orang, berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/09/262, Tanggal 17 Februari 2025	85.736.203,00
11	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu sebanyak dua orang, berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/09/259, Tanggal 17 Februari 2025	10.000.000,00
12	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu sebanyak sembilan orang, berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/09/261, Tanggal 17 Februari 2025	35.445.289,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nominal (Rp)
13	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu sebanyak dua orang, berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Nomor : 400.9.3/09/517, Tanggal 15 April 2025	10.000.000,00
14	Pembayaran Pembelian Tiket Pesawat Warsawa-Jakarta untuk pemulangan warga terdampak Bencana Sosial TPPO sesuai SP2D Nomor : 33.28/04.0/000124/TU/5.02.0.00.0.00.02.0000/P7/7/2025 Tanggal 23 Juli 2025	30.052.320,00
15	Pembelian Tiket Pesawat untuk 2 Orang X @ Rp13.790.170 = Rp27.580.340,- dalam rangka pemulangan TPPO (Penanganan Bencana Sosial TPPO), SP2D TU BTT Nomor : 33.28/04.0/000136/TU/5.02.0.00.0.00.02.00000/P7/8/2025	27.580.340,00
16	Pembayaran belanja makan-minum aktivitas lapangan dalam rangka penanganan Penanggulangan Bencana Sosial akibat teror terhadap aset vital Pemerintah Kabupaten Tegal, Nomer Surat Pernyataan Siaga Darurat Sosial Bupati Tegal Nomor : 300.2.1/1234-2/I Tahun 2025. (SPJ : 5.715 dus X @ Rp35.000= Rp200.025.000)	200.025.000,00
17	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan - Pembayaran Perawatan Pasien Orang Tidak Mampu sebanyak 276 orang, berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal Nomor : 900/09/2817, Tanggal 20 November 2025.	1.081.832.666,00
Jumlah		2.151.147.271,00

5.1.3. Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 sebesar Rp488.810.717.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp497.080.562.104,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.75 Belanja Transfer

Transfer :	TA 2025			TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Transfer Bagi Hasil ke Desa	25.900.000.000,00	17.771.217.000,00	68,61	23.589.737.104,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	471.186.729.000,00	471.039.500.000,00	99,97	473.490.825.000,00
Jumlah		497.086.729.000,00	488.810.717.000,00	98,33	497.080.562.104,00

5.1.3.a Belanja Bagi Hasil ke Desa

Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa TA 2025 sebesar Rp17.771.217.000,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp23.589.737.104,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.76 Belanja Bagi Hasil ke Desa

Transfer Bagi Hasil ke Desa	TA 2025			TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	21.357.032.400,00	14.183.853.900,00	66,41	20.960.911.579,00
2	Tansfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	4.542.967.600,00	3.587.363.100,00	78,97	2.628.825.525,00
Jumlah		25.900.000.000,00	17.771.217.000,00	68,61	23.589.737.104,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.3.b Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan berupa Belanja Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 sebesar Rp471.039.500.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp473.490.825.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.77 Belanja Bantuan Keuangan ke Desa

Belanja Bantuan Keuangan	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
2 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	450.402.852.000,00	450.255.623.000,00	99,97	444.490.825.000,00
3 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	19.783.877.000,00	19.783.877.000,00	100,00	29.000.000.000,00
Jumlah	471.186.729.000,00	471.039.500.000,00	99,97	473.490.825.000,00

- a. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 sebesar Rp450.255.623.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp444.490.825.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.78 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Alokasi Dana Desa	128.532.000.000,00	128.525.000.000,00	99,99	128.251.000.000,00
2 Dana Desa	321.870.852.000,00	321.730.623.000,00	99,96	316.239.825.000,00
Jumlah	450.402.852.000,00	450.255.623.000,00	99,97	444.490.825.000,00

- b. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 sebesar Rp19.783.877.000,00 berupa Bantuan Sarpras *Bottom Up* dan TA 2024 sebesar Rp29.000.000.000,00.

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran Pembiayaan Neto TA 2025 sebesar Rp161.352.361.032,00 realisasi sebesar Rp161.353.492.396,63 dan Realisasi TA 2024 sebesar Rp266.541.022.597,96 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.79 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan	TA 2025			TA 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Penerimaan Pembiayaan	169.852.361.032,00	169.853.492.396,63	100,00	272.541.022.597,96
2 Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	161.352.361.032,00	161.353.492.396,63	100,00	266.541.022.597,96



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.4.a Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2025 sebesar Rp169.853.492.396,63 dan TA 2024 sebesar Rp272.541.022.597,96 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.80 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan:		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penggunaan SilPA	168.352.361.032,00	168.352.361.032,63	100,00	236.131.976.034,96
2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	33.800.000.000,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.501.131.364,00	100,08	2.609.046.563,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		169.852.361.032,00	169.853.492.396,63	100,00	272.541.022.597,96

Realisasi Penerimaan Kembali Piutang TA 2025 sebesar Rp1.501.131.364,00 merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebesar Rp1.134.364,00 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD dari Bank TGR sebesar Rp1.500.000.000,00.

5.1.4.b Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp8.500.000.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.81 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan:		TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
3.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2025 sebesar Rp7.500.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal pada PT BPR BANK TGR (PERSERODA) Kabupaten Tegal sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal pada PT BPD JAWA TENGAH (PERSERODA) sebesar Rp4.500.000.000,00. Penyertaan Modal pada PT BPR BANK TGR (PERSERODA) Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 100.3.3.2 /157 Tahun 2025 tanggal 7 Maret 2025 dan Penyertaan Modal pada PT BPD JAWA TENGAH (PERSERODA) berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 100.3.3.2/156 Tahun 2025 tanggal 7 Maret 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pemberian Pinjaman Daerah TA 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal kepada PT. BPR BANK TGR (PERSERODA). Pemberian pinjaman ini berdasarkan pada Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2 /541 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025 sebesar Rp166.080.706.985,65 dan TA 2024 sebesar Rp168.352.361.032,63 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.82 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) :	2025	2024
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Pendapatan dan Belanja :		
a) Realisasi Pendapatan	3.110.318.788.047,02	2.993.701.597.090,47
b) Realisasi Belanja	2.616.780.856.458,00	2.594.809.696.551,80
c) Transfer	488.810.717.000,00	497.080.562.104,00
Surplus (Defisit) Anggaran : a) – b) – c)	4.727.214.589,02	(98.188.661.565,33)
2) Pembiayaan :		
a) Penerimaan Daerah	169.853.492.396,63	272.541.022.597,96
b) Pengeluaran Daerah	8.500.000.000,00	6.000.000.000,00
Pembiayaan Neto : a) – b)	161.353.492.396,63	266.541.022.597,96
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : (1 + 2)	166.080.706.985,65	168.352.361.032,63

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025 dan 2024 masing-masing Rp166.080.706.985,65 dan Rp168.352.361.032,63 rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.83 Rincian SiLPA

Rincian SiLPA :	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1) Rekening Giro BUD	121.510.200.960,00	101.690.420.177,00
2) Saldo Kas RSUD Dr Soesilo	35.596.727.127,80	57.360.280.521,86
3) Kas BLUD Dinkes	2.407.004.356,00	3.238.163.434,00
4) Kas BLUD RSUD Suradadi	6.336.206.330,85	4.015.096.978,77
5) Kas BOS	30.281.624,00	43.159.557,00
6) Kas Bendahara Penerimaan	3.839.750,00	598.434.550,00
7) Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	323.326,00
8) Kas Dana BOK	196.446.837,00	1.406.482.488,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	166.080.706.985,65	168.352.361.032,63



Rincian SILPA BUD TA 2025 sebesar Rp121.510.200,960,00 terdiri dari SILPA terikat sebesar Rp10.820.253.733,00 dengan rincian:

- a. DAK Fisik 2024 sebesar Rp194.618.571,00
- b. DAK Fisik 2025 sebesar Rp146.011.976,00
- c. DAK Non Fisik sebesar Rp1.002.905.792,00
- d. DBHCHT Tambahan sebesar Rp1.427.283.661,00
- e. DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp3.250.741.527,00
- f. Insentif Fiskal sebesar Rp82.970.076,00
- g. Pengembalian Tambahan Penghasilan Guru yang disetor ke RKUD Rp94.987.150,00
- h. Tambahan Penghasilan Guru 2024 Rp4.620.734.980,00

Sehingga terdapat SILPA bebas sebesar Rp110.689.947.227,00.

5.2. Laporan Perubahan SAL

5.2.1. Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp168.352.361.032,63.

5.2.1.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp166.080.706.985,65.

5.2.1.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp166.080.706.985,65 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp 4.727.214.589,02
- Pembiayaan Neto	Rp161.353.492.396,63
SiLPA Tahun berjalan	Rp166.080.706.985,65.

5.2.1.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tidak ada.

5.2.1.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 adalah sebesar Rp166.080.706.985,65.



5.3. Neraca

5.3.1. Aset

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya dan menjaga likuiditas keuangan. Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp298.538.853.121,19 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp296.292.072.890,64 dengan rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.84 Aset Lancar

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	121.510.200.960,00	101.690.420.177,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	3.839.750,00	598.434.550,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	323.326,00
4	Kas di BLUD	44.339.937.814,65	64.613.540.934,63
5	Kas Dana BOSP	30.281.624,00	43.159.557,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	196.446.837,00	1.406.482.488,00
7	Piutang Pajak Daerah	68.416.120.212,00	75.803.559.221,00
8	Piutang Retribusi Daerah	25.653.579.029,00	20.486.418.854,00
9	Piutang Lain-lain PAD yang sah	19.233.978.567,02	23.064.390.361,79
10	Piutang Transfer Antar Daerah	16.315.489.447,00	14.798.408.069,00
11	Piutang Lainnya	12.758.380.546,00	13.261.011.910,00
12	Penyisihan Piutang	(61.380.558.041,36)	(67.923.754.676,73)
13	Persediaan	51.461.156.375,88	48.449.678.118,95
Jumlah		298.538.853.121,19	296.292.072.890,64

5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Kas ini ditempatkan di Bank Jateng Cabang Slawi berupa rekening giro 1-035-00501-7 untuk menampung penerimaan dan pengeluaran rutin maupun yang berasal dari transfer dan bagi hasil. Saldo kas per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp121.510.200.960,00 dan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp101.690.420.177,00.

5.3.1.1.b Kas di Bendahara Penerimaan

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan di PD per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.839.750,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp598.434.550,00 dengan rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.85 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	2.471.000,00	18.122.000,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.125.000,00	572.200,00
3	Badan Pendapatan Daerah	243.750,00	579.740.350,00
Jumlah		3.839.750,00	598.434.550,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan pendapatan pada tanggal 31 Desember 2025 yang belum disetorkan ke RKUD Kab. Tegal.

Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah TA 2025 sebesar Rp243.750,00 dengan nomor rekening 1 035 00386 6 berupa Rekening Pemda atas nama Kab Tegal /Pen PBB sedangkan pada TA 2024 sebesar Rp579.740.350,00.

5.3.1.1.c Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Perangkat Daerah (PD). Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak ada sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp323.326,00 merupakan sisa uang persediaan yang belum disetor pada Dinas Sosial dan kemudian telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2025.

5.3.1.1.d Kas di BLUD

Kas ini merupakan kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi dan Puskesmas. Sebagai BLUD, diberi wewenang untuk menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit atau puskesmas untuk pembiayaan/pembayaran kegiatan rumah sakit atau puskesmas secara langsung. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2025 adalah sejumlah Rp44.339.937.814,65 dan 31 Desember 2024 sejumlah Rp64.613.540.934,63 rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.86 Rincian Kas BLUD

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
A	RSUD dr Soeselo Slawi	35.596.727.127,80	57.360.280.521,86
B	RSUD Suradadi	6.336.206.330,85	4.015.096.978,77
C	Dinkes (Kas di BLUD Puskesmas)	2.407.004.356,00	3.238.163.434,00
1	Puskesmas Danasari	23.217.639,00	14.538.899,00
2	Puskesmas Kesamiran	15.864.754,00	13.546.214,00
3	Puskesmas Margasari	149.078.741,00	104.365.039,00
4	Puskesmas Kesambi	80.084.200,00	50.146.992,00
5	Puskesmas Bumijawa	137.517.257,00	10.690.420,00
6	Puskesmas Bojong	62.252.558,00	44.407.674,00
7	Puskesmas Balapulang	236.152.172,00	669.065.214,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
8	Puskesmas Kalibakung	18.988.009,00	53.161.562,00
9	Puskesmas Pagerbarang	370.252.366,00	325.843.137,00
10	Puskesmas Lebaksiu	68.174.501,00	16.471.797,00
11	Puskesmas Kambangan	36.515.413,00	33.135.627,00
12	Puskesmas Jatinegara	198.528.024,00	208.841.305,00
13	Puskesmas Kedungbanteng	22.368.460,00	37.244.225,00
14	Puskesmas Pangkah	22.829.318,00	63.351.425,00
15	Puskesmas Penusupan	9.182.250,00	91.372.341,00
16	Puskesmas Slawi	16.355.102,00	32.654.742,00
17	Puskesmas Adiwerna	66.076.544,00	170.512.049,00
18	Puskesmas Pagiyanten	91.558.494,00	58.799.011,00
19	Puskesmas Talang	237.363.629,00	201.033.305,00
20	Puskesmas Kaladawa	29.046.991,00	174.595.063,00
21	Puskesmas Dukuhturi	38.003.219,00	101.460.715,00
22	Puskesmas Kupu	13.056.689,00	23.874.826,00
23	Puskesmas Dukuhwaru	34.698.193,00	161.557.214,00
24	Puskesmas Tarub	123.634.572,00	46.763.482,00
25	Puskesmas Kramat	34.221.574,00	172.064.355,00
26	Puskesmas Bangungalih	99.411.955,00	30.394.198,00
27	Puskesmas Suradadi	98.475.819,00	90.305.177,00
28	Puskesmas Jatibogor	54.403.731,00	18.016.220,00
29	Puskesmas Warurejo	19.692.182,00	219.951.206,00
	Jumlah Total Kas di BLUD	44.339.937.814,65	64.613.540.934,63

Kas BLUD RSUD dr. Soeselo disimpan pada beberapa bank dengan rincian dalam tabel berikut :

Tabel 5.87 Rincian Posisi Kas BLUD RSUD dr. Soeselo

No	Uraian	Nomor Rekening/Bilyet	Jumlah (Rp)
1	Giro Bank Jateng	1-035-00150-8	35.596.720.335,00
2	Rekening Mandiri	1390000607089	6.792,80
	Jumlah Total Kas di BLUD RSUD dr Soeselo		35.596.727.127,80

Kas BLUD RSUD Suradadi disimpan pada beberapa bank dengan rincian dalam tabel berikut :

Tabel 5.88 Rincian Posisi Kas BLUD RSUD Suradadi

No	Uraian	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	Giro Bank Jateng	1-035-00724-1	2.844.998.813,00
2	Giro Rekening Mandiri	139-00-1928057-1	3.469.712.808,85
3	Kas Bendahara Penerimaan	-	21.494.709,00
	Jumlah Total Kas di BLUD RSUD Suradadi		6.336.206.330,85

Untuk rincian nomor rekening kas BLUD Puskesmas dapat dilihat pada lampiran 5.2



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.e Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP merupakan saldo kas yang berasal dari Dana BOSP yang ditransfer dari Pemerintah Pusat. Saldo per 31 Desember 2025 adalah Rp30.281.624,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp43.159.557,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.89 Kas di Bendahara BOS

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas Bendahara BOSP SD Negeri	29.411.841,00	33.184.004,00
2	Kas Bendahara BOSP SMP Negeri	869.000,00	9.534.579,00
3	Kas Bendahara BOSP PAUD	783,00	440.974,00
Jumla4		30.281.624,00	43.159.557,00

5.3.1.1.f Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas merupakan saldo kas yang berasal dari Dana BOK Puskesmas yang ditransfer dari Pemerintah Pusat. Saldo Kas BOK per 31 Desember 2025 sebesar Rp196.446.837,00 dan saldo BOK per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.406.482.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Kas Dana BOK Puskesmas

No	Nama Puskesmas	Uraian	No Rekening	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	Puskesmas Danasari	1032116BOKPKM DANASARI	1590100231	10.266.444,00	53.605.457,00
2	Puskesmas Kesamiran	1032135BOKPKM KESAMIRAN	1590100242	2.760.054,00	33.838.448,00
3	Puskesmas Margasari	1032112BOKPKM MARGASARI	1590100446	1.356.496,00	94.658.135,00
4	Puskesmas Kesambi	1032113BOKPKM KESAMBI	1590100264	302.115,00	54.263.763,00
5	Puskesmas Bumijawa	1032114BOKPKM BUMIJAWA	1590100515	8.395.237,00	79.514.352,00
6	Puskesmas Bojong	1032115BOKPKM BOJONG	1590100322	3.331.080,00	29.781.233,00
7	Puskesmas Balapulung	1032117BOKPKM BALAPULUNG	1590100333	8.953.720,00	9.469.813,00
8	Puskesmas Kalibakung	1032118BOKPKM KALIBAKUNG	1590100311	5.022.684,00	34.168.603,00
9	Puskesmas Pagerbarang	1032119BOKKPM PAGERBARANG	1590100435	1.795.344,00	289.550,00
10	Puskesmas Lebaksiu	1032120BOKKPM LEBAKSIU	1590100388	60.000,00	40.792.580,00
11	Puskesmas Kambangan	1032121BOKPKM KAMBANGAN	1590100300	1.975.322,00	46.511.124,00
12	Puskesmas Jatinegara	1032122BOKKPM JATINEGARA	1590100480	16.262.730,00	63.764.850,00
13	Puskesmas Kedungbanteng	1032123BOKKPM KEDUNGBANTENG	1590100355	938.999,00	52.768.992,00
14	Puskesmas Pangkah	1032124BOKKPM PANGKAH	1590100479	3.630.900,00	51.617.018,00
15	Puskesmas Penusupan	1032125BOKKPM PENUSUPAN	1590100399	8.157.954,00	57.557.163,00
16	Puskesmas Slawi	1032126BOKKPM SLAWI	1590100504	3.390.100,00	65.411.041,00
17	Puskesmas Adiwerna	1032129BOKKPM ADIWERNA	1590100468	980.289,00	61.147.389,00
18	Puskesmas Pagiyanten	1032128BOKKPM PAGIYANTEN	1590100347	44.229.556,00	18.207.243,00
19	Puskesmas Talang	1032132BOKPKM TALANG	1590100344	60.750,00	32.860.171,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Puskesmas	Uraian	No Rekening	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
20	Puskesmas Kaladawa	1032133BOKPKM KALADAWA	1590100366	1.335.950,00	63.671.715,00
21	Puskesmas Dukuhturi	1032130BOKPKM DUKUHTURI	1590100424	5.879.755,00	38.625.688,00
22	Puskesmas Kupu	1032131BOKPKM KUPU	1590100253	184.600,00	24.695.528,00
23	Puskesmas Dukuwaru	1032127BOKKPM DUKUHWARU	1590100457	1.322.485,00	42.441.138,00
24	Puskesmas Tarub	1032134BOKKPM TARUB	1590100413	26.421.607,00	77.646.400,00
25	Puskesmas Kramat	1032136BOKKPM KRAMAT	1590100491	12.746.785,00	71.475.774,00
26	Puskesmas Bangungalih	1032137BOKKPM BANGUNGALIH	1590100297	2.971.176,00	48.935.356,00
27	Puskesmas Suradadi	1032138BOKKPM SURADADI	1590100286	6.163.803,00	50.808.279,00
28	Puskesmas Jatibogor	1032139BOKKPM JATIBOGOR	1590100270	654.012,00	39.371.290,00
29	Puskesmas Warurejo	1032140BOKKPM WARUREJO	1590100402	16.896.890,00	68.584.395,00
Jumlah				196.446.837,00	1.406.482.488,00

Saldo akhir kas BOK Puskesmas tidak sama dengan rekening koran per 31 Desember 2025 karena jasa giro pada 31 Desember 2025 merupakan transaksi awal tahun 2026 oleh sistem BNI terkait perubahan jenis rekening giro BOK Puskesmas dan terkoreksi atau terdebit kembali oleh sistem pada 02 Januari 2026.

5.3.1.1.g Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2024 dan sisa piutang tahun sebelumnya. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp68.416.120.212,00 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.803.559.221,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.91. Rincian Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame	204.379.595,00	381.035.066,00
2	Piutang Pajak Air Tanah	45.122.080,00	18.665.780,00
3	Piutang PBBP2	60.845.595.138,00	68.536.790.011,00
4	Piutang PBJT	7.321.023.399,00	6.867.068.364,00
Jumlah		68.416.120.212,00	75.803.559.221,00

Rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang dapat dilihat dalam lampiran 5.3.

5.3.1.1.h Piutang Retribusi Daerah

Akun ini merupakan piutang yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)nya namun belum dilunasi oleh Wajib Retribusi. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.653.579.029,00 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.486.418.854,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.92 Rincian Piutang Retribusi

No.	Uraian	PD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	DPMPTSP	650.000,00	650.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.570.472.110,00	1.320.624.131,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	RSUD dr. Soeselo Slawi	17.387.957.793,00	13.610.195.887,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	RSUD Suradadi	3.522.936.580,00	2.900.121.803,00
5	Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB	477.425.000,00	478.425.000,00
6	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	DISHUB	4.800.000,00	4.800.000,00
7	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS KOMINFO	238.037.674,00	238.037.674,00
8	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BPKAD	18.950.000,00	10.850.000,00
9	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DISPORAPAR	1.152.747.900,00	951.958.125,00
10	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DINKOP UKM	48.235.000,00	66.935.000,00
11	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DISHUB	369.326.821,00	378.875.937,00
12	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DPMPTSP	0,00	600.000,00
13	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	DISHUB	6.200.000,00	6.700.000,00
14	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	DISHUB	12.000.000,00	7.431.000,00
15	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DISHUB	300.808.800,00	191.924.044,00
16	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Dinas Perikanan	28.584.000,00	0,00
17	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	DPMPTSP	352.306.801,00	284.077.703,00
18	Piutang Retribusi Izin Gangguan	DPMPTSP	4.735.550,00	4.735.550,00
19	Piutang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Sekretariat Daerah	900.000,00	900.000,00
20	Piutang Retribusi Pelayanan kebersihan/Persampahan	DLH	156.505.000,00	28.577.000,00
Jumlah			25.653.579.029,00	20.486.418.854,00

5.3.1.1.i Piutang Lain-lain PAD yang sah

Akun ini merupakan piutang atas pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp19.233.978.567,02 dan Rp23.064.390.361,79. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.93 Rincian Piutang lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

No.	Uraian	PD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak Reklame	BAPPENDA	11.722.093,00	20.958.152,65
2	Piutang Denda Pajak Air Tanah	BAPPENDA	1.835.799,00	4.164.303,20
3	Piutang Denda PBB	BAPPENDA	19.219.241.169,02	23.038.088.399,94
4	Piutang Denda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB	1.179.506,00	1.179.506,00
Jumlah			19.233.978.567,02	23.064.390.361,79



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.j Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah

Akun ini merupakan piutang transfer antar daerah yang berasal dari pemerintah provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi saldo piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.315.489.447,00 berdasarkan Surat Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/900.1.14.3/2/2026 tentang Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah TA 2025 dan saldo TA 2024 sebesar Rp14.798.408.069,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.310.179.020,00	4.952.252.053,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	396.817.897,00	3.614.367.740,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.555.875.338,00	6.208.549.419,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	52.617.192,00	23.238.857,00
Jumlah		16.315.489.447,00	14.798.408.069,00

5.3.1.1.k Piutang Lainnya

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah selain dari pajak dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, yang berasal dari pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman diberikan kepada petani, koperasi maupun pengrajin yang disalurkan melalui empat Dinas, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, serta Dinas Perikanan. Penerima dana pinjaman harus mengembalikan pokok pinjaman ke kas daerah dan jasa pinjaman. Pemberian pinjaman semula diklasifikasikan sebagai investasi non permanen berupa dana bergulir, namun berdasarkan pola dan karakteristik penyalurannya, dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir. Hal tersebut telah diungkapkan dalam LHP BPK RI atas LKPD Pemkab Tegal Tahun 2009 dan 2010 atas penyajian investasi non permanen pada Neraca Pemkab Tegal dan Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir kepada masyarakat yang dianggap tidak memadai. Dengan melakukan kajian berdasarkan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang maka pemberian pinjaman dana tersebut lebih mendekati karakteristik sebagai Piutang Berdasarkan Perikatan berupa Pemberian Pinjaman, sehingga kemudian disajikan dalam kelompok piutang lainnya dalam Neraca Tahun 2013 s.d 2019 berdasarkan pembukuan yang ada pada masing-masing PD teknis pelaksana. Jumlah Piutang Lainnya pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.261.011.910,00 dan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.758.380.546,00 secara rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.95 Rincian Piutang lainnya

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1. Piutang Dari Pemberian Pinjaman			
A	Pokok Angsuran Pinjaman	7.235.230.791,00	7.237.772.155,00
1)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.806.235.753,00	1.806.460.526,00
2)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.304.616.327,00	1.305.522.918,00
3)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.342.594.291,00	3.344.004.291,00
4)	Dinas Perikanan	781.784.420,00	781.784.420,00
B	Jasa Angsuran Pinjaman	2.523.149.755,00	2.523.239.755,00
1)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	226.113.694,00	226.113.694,00
2)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	880.172.349,00	880.172.349,00
3)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.389.520.112,00	1.389.610.112,00
4)	Dinas Perikanan	27.343.600,00	27.343.600,00
Jumlah Piutang dari Pemberian Pinjaman (A+B)		9.758.380.546,00	9.761.011.910,00
2	Piutang Pinjaman lainnya	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00
Jumlah Piutang Lainnya (1+2)		12.758.380.546,00	13.261.011.910,00

1. Piutang dari Pemberian Pinjaman

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari Pemberian Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Pinjaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Merupakan sisa pokok atas pinjaman dan jasa/bunga yang diberikan kepada Petani Kecil maupun Koperasi Petani yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.96. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Uraian	Saldo Pokok (Rp)	Saldo Jasa / Bunga (Rp)
1	Pinjaman Koperasi Tani Th 2000-2004	106.751.092,00	12.194.037,00
2	Pinjaman Petani Alsintan Th 2001,2003,2004	93.282.845,00	41.264.777,00
3	Pinjaman P4K Tahun 2003,2004	100.778.664,00	6.008.281,00
4	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2003	33.473.788,00	6.150,00
5	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2004	23.208.570,00	0,00
6	Pinjaman Petani Tingkat. Mutu Intes. Padi Th.2004	102.938.255,00	12.440.991,00
7	Pinjaman Penagkar Benih Tanaman Pangan 2001	10.227.000,00	1.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Pokok (Rp)	Saldo Jasa / Bunga (Rp)
8	Pinjaman Sentra Bawang Putih Tahun 2002	3.020.000,00	2.700.000,00
9	Pinjaman Petani Sentra Kentang Th. 2003	36.620.000,00	2.100.000,00
10	Pinjaman Petani Melati Tahun 2004	1.638.092,00	0,00
11	Pengembangan Ternak Sapi 2001	109.475.223,00	1.669.608,00
12	Pengembangan Ternak Sapi 2002	79.688.594,00	10.586.500,00
13	Pengembangan Ternak Sapi 2003	184.402.867,00	19.102.250,00
14	Pengembangan Ternak Sapi 2004	159.412.273,00	21.061.400,00
15	Penggemukan Ternak DEG Tahun 2001	122.745.000,00	1.356.000,00
16	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2002	97.540.000,00	10.850.000,00
17	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2003	62.276.200,00	15.506.700,00
18	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2004	71.228.290,00	5.270.000,00
19	Pengemb. Ternak kambing Tahun 2002	90.270.000,00	16.559.000,00
20	Pengemb. Ternak kambing Tahun 2003	88.343.000,00	15.435.000,00
21	Pengemb. Ternak kambing Tahun 2004	11.470.000,00	420.000,00
22	Pembibitan Ternak Domba Tahun 2003	100.831.000,00	16.610.000,00
23	Pembibitan Ternak Itik Tahun 2003	20.265.000,00	1.935.000,00
24	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2003	90.630.000,00	11.298.000,00
25	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2004	5.720.000,00	540.000,00
	Jumlah	1.806.235.753,00	226.113.694,00

b) Dana Pinjaman pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Merupakan sisa pokok atas pinjaman dan jasa/bunga yang diberikan kepada Industri Kecil maupun Pengrajin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dibayar oleh para peminjam dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.97 Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Uraian	Saldo Pokok (Rp)	Saldo Bunga (Rp)
1	Pembinaan dan Bintek Penguatan Modal IK/IRT 2001	60.831.196,00	42.750.435,00
2	Peningkatan Teknologi Industri Kecil Th 2001	336.431.026,00	281.746.850,00
3	Pinjaman Modal IK Emping Mlinjo & Sirup Jahe 2002	7.000.000,00	5.602.456,00
4	IK/IRT Shuttlecock dan Keset 2002	35.250.000,00	26.278.187,00
5	Pinjaman Modal Bahan Baku Logam 2003	413.332.800,00	293.228.551,00
6	Pinjaman Modal Pengrajin Daur Ulang Plastik 2003	18.563.705,00	20.008.772,00
7	Pinjaman Modal Pendaftaran HAKI Kab. Tegal 2003	17.538.500,00	23.990.517,00
8	Pinjaman Modal Pendaftaran SNI PUD Kab. Tegal 2003	50.000.000,00	40.017.544,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Pokok (Rp)	Saldo Bunga (Rp)
9	Pinjaman Modal Pendaftaran Sporting Industri 2004	150.832.000,00	84.503.713,00
10	Pinjaman Modal IK Batik ATBM 2004	51.592.600,00	42.890.803,00
11	Pinjaman Modal IK Tahu 2004	7.702.000,00	6.169.371,00
12	Pinjaman Modal Pengrajin Batik Tulis 2004	468.000,00	0,00
13	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2001	23.318.000,00	2.316.400,00
14	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2002	109.831.500,00	7.593.750,00
15	Pinjaman Modal untuk TKI TA.2004	21.925.000,00	3.075.000,00
	Jumlah	1.304.616.327,00	880.172.349,00

c) Dana Pinjaman Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman dan jasa/bunga yang diberikan kepada koperasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.98 Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

No	Uraian	Saldo Pokok (Rp)	Saldo Bunga (Rp)
1	Pemberian Kredit Pengadaan Pangan bagi KUD 2001	249.046.950,00	22.702.384,00
2	Peningkatan kemampuan koperasi pasar 2001	24.000.000,00	1.888.194,00
3	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 2001	53.518.750,00	5.707.395,00
4	Peningkatan Pendapatan Pengrajin IK/IRT (krupuk 2001)	43.465.317,00	48.474.584,00
5	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2001	39.400.286,00	90.186.122,00
6	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2002	57.341.671,00	3.989.998,00
7	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2002	148.041.667,00	19.424.833,00
8	Pemberdayaan koperasi 2002	85.641.500,00	10.375.000,00
9	Pemberdayaan PKM 2002	48.212.500,00	7.587.500,00
10	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2002	146.035.567,00	170.241.300,00
11	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2002	319.120.546,00	126.168.645,00
12	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2003	90.275.000,00	8.200.000,00
13	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2003	113.491.867,00	15.875.000,00
14	Pemberdayaan koperasi 2003	133.317.570,00	14.850.000,00
15	Pemberdayaan PKM 2003	331.952.333,00	41.268.667,00
16	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2003	137.801.477,00	147.847.369,00
17	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2003	312.499.800,00	276.001.217,00
18	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2004	397.822.600,00	47.810.000,00
19	Pemberdayaan koperasi 2004	156.889.000,00	42.376.877,00
20	Pemberdayaan PKM 2004	209.503.100,00	53.275.000,00
21	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2004	245.216.790,00	235.270.027,00
	Jumlah	3.342.594.291,00	1.389.520.112,00



d) Dana Pinjaman Dinas Perikanan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman dan jasa/bunga yang diberikan kepada peternak, petani dan nelayan yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum dibayar oleh para peminjam, rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.99 Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perikanan

No	Uraian	Saldo Pokok (Rp)	Saldo Bunga (Rp)
1	Pemberdayaan Petani Tambak Th. 2002	105.954.720,00	4.347.000,00
2	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2002	118.161.000,00	0,00
3	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2003	249.072.000,00	16.900.000,00
4	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2004	19.318.000,00	1.785.000,00
5	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2002	29.452.000,00	0,00
6	Pemberdayaan Pengolah dan Pengepul Ikan 2003	71.023.000,00	2.225.000,00
7	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2003	8.259.000,00	0,00
8	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2004	86.936.000,00	0,00
9	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2001	290.000,00	0,00
10	Penberdayaan Pemancingan Tahun 2003	19.599.200,00	379.000,00
11	Penberdayaan UPR Tahun 2003	8.600.000,00	1.100.000,00
12	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2004	13.703.500,00	607.600,00
13	Pinjaman Modal Pengusaha Backyard Tahun 2002	51.416.000,00	0,00
	Jumlah	781.784.420,00	27.343.600,00

Piutang lainnya tersebut di atas sudah dikoordinasikan dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) oleh BPKAD untuk proses penyerahannya.

2) Piutang Pinjaman Lainnya

Merupakan saldo piutang atas pemberian pinjaman daerah kepada BUMD yaitu Perseroan Daerah BPR Bank TGR Kabupaten Tegal saldo Piutang Pinjaman Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan 2024 sebesar Rp3.500.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemberian Pinjaman Pada tahun 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong.
2. Pemberian Pinjaman Pada tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3. Pemberian Pinjaman Pada Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900/97 Tahun 2023 Tanggal 5 Januari 2023.
4. Pemberian Pinjaman Pada Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 500/173 Tahun 2024 tanggal 18 April 2024.
5. Pengembalian Pinjaman pada Tahun 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00 yang masuk ke RKUD Kab Tegal Tanggal 4 Maret 2024.
6. Pemberian Pinjaman Pada Tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 100.3.3.2 /541 Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025.
7. Pengembalian Pinjaman pada Tahun 2025 sebesar Rp1.500.000.000,00 yang masuk ke RKUD Kab Tegal 30 Tanggal Juli 2025.

5.3.1.1.l Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp61.380.558.041,36 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp67.923.754.676,73 rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.100 Rincian Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31.971.234.943,80	36.981.090.416,91
2	Penyisihan Piutang Retribusi	4.380.351.424,09	3.482.365.347,26
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	15.255.591.127,47	17.681.787.002,56
4	Penyisihan Piutang Lainnya	9.773.380.546,00	9.778.511.910,00
Jumlah		61.380.558.041,36	67.923.754.676,73

5.3.1.1.m Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar dan/atau fifo dan/atau rata-rata tertimbang. Jumlah persediaan 31 Desember 2025 sebesar Rp51.461.156.375,88 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.449.678.118,95 rincian persediaan masing PD disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.101 Rincian Persediaan

NO	PD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	527.735.284,00	632.816.362,00
2	Dinas Kesehatan	31.855.164.616,17	31.561.825.133,46
3	RSUD dr.Soeselo	10.800.448.195,00	8.718.621.566,00
4	RSUD Suradadi	3.145.149.776,71	3.218.910.482,49
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126.724.210,00	283.035.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	9.929.440,00	17.765.800,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	475.074.023,00	246.305.200,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	599.800,00	634.700,00
9	Dinas Sosial	10.536.200,00	4.854.500,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	1.287.254.825,00	1.344.510.402,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	310.331.151,00	277.378.211,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	108.025.642,00	90.398.850,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	917.159.496,00	871.988.029,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.901.100,00	438.100,00
15	Dinas Perhubungan	1.081.088.038,00	379.643.530,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informasi	1.454.300,00	2.801.300,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	160.516.400,00	193.438.500,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78.540.194,00	65.174.300,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	67.705.829,00	12.334.435,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	826.960,00	1.076.560,00
21	Dinas Perikanan	612.100,00	40.500,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	4.640.600,00	3.172.150,00
23	Sekretariat Daerah	135.161.980,00	178.754.116,00
24	Sekretariat DPRD	37.886.300,00	50.402.050,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	29.033.090,00	10.605.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	3.544.700,00
27	Badan Pendapatan Daerah	264.352.200,00	255.686.300,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.587.526,00	2.447.942,00
29	Inspektorat	5.526.400,00	5.476.000,00
30	Kecamatan Adiwerna	0,00	0,00
31	Kecamatan Balapulang	1.971.500,00	242.000,00
32	Kecamatan Bojong	1.748.000,00	2.883.600,00
33	Kecamatan Bumijawa	0,00	0,00
34	Kecamatan Dukuhturi	0,00	0,00
35	Kecamatan Dukuwaru	1.133.000,00	213.000,00
36	Kecamatan Jatinegara	608.700,00	446.600,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	830.000,00	169.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	PD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
38	Kecamatan Kramat	510.100,00	506.900,00
39	Kecamatan Lebaksiu	293.500,00	181.500,00
40	Kecamatan Margasari	0,00	0,00
41	Kecamatan Pagerbarang	1.729.000,00	1.467.000,00
42	Kecamatan Pangkah	1.000.500,00	2.029.000,00
43	Kecamatan Slawi	1.689.200,00	3.241.100,00
44	Kecamatan Suradadi	2.347.200,00	4.005.300,00
45	Kecamatan Talang	198.000,00	213.000,00
46	Kecamatan Tarub	132.000,00	0,00
47	Kecamatan Warureja	0,00	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah		51.461.156.375,88	48.449.678.118,95

Rincian Masing- masing akun persediaan adalah sebagai berikut:

1) Persediaan Bahan

Saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.343.781.993,53 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.102 Persediaan Bahan

No.	SKPD	Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp)	Bahan Kimia (Rp)	Bahan/Bibit Tanaman (Rp)	Isi Tabung Gas (Rp)	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan (Rp)	Bahan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453.150,00	12.453.150,00
2	Dians Kesehatan	0,00	72.413.350,00	0,00	0,00	0,00	8.175.481.467,98	8.247.894.817,98
3	RSUD dr. Soeselo	0,00	0,00	0,00	65.108.510,00	0,00	5.187.944.291,00	5.253.052.801,00
4	RSUD Suradadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.560.719,55	1.321.560.719,55
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126.724.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.724.210,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.689.778,00	250.689.778,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	74.613.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.613.815,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151.602,00	6.151.602,00
9	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	612.100,00	0,00	612.100,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.847.500,00
11	Kecamatan Slawi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
Jumlah		176.571.710,00	147.027.165,00	0,00	65.108.510,00	612.100,00	14.954.462.508,53	15.343.781.993,53



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2) Persediaan Suku Cadang

Merupakan saldo persediaan suku cadang per 31 Desember 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp550.000,00.

3) Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Merupakan saldo persediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.647.467.931,00 dengan rincian disajikan dalam *Lampiran 5.4*.

4) Persediaan Obat-obatan

Merupakan saldo persediaan obat-obatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.696.866.862,35 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.103 Persediaan Obat-obatan

No.	Uraian	Obat-obatan		JUMLAH (Rp)
		Obat (Rp)	Obat-obatan Lainnya (Rp)	
1	Dinas Kesehatan Gudang Farmasi	18.489.433.799,57	835.050,00	18.490.268.849,57
2	Puskesmas Danasari	83.094.171,63	0,00	83.094.171,63
3	Puskesmas Kesamiran	60.004.064,85	0,00	60.004.064,85
4	Puskesmas Margasari	305.600.897,71	0,00	305.600.897,71
5	Puskesmas Kesambi	162.099.886,19	0,00	162.099.886,19
6	Puskesmas Bumijawa	322.251.067,16	0,00	322.251.067,16
7	Puskesmas Bojong	233.800.656,42	0,00	233.800.656,42
8	Puskesmas Balapulang	260.384.179,15	0,00	260.384.179,15
9	Puskesmas Kalibakung	196.188.508,28	0,00	196.188.508,28
10	Puskesmas Pagerbarang	81.343.186,34	0,00	81.343.186,34
11	Puskesmas Lebaksiu	151.411.095,66	0,00	151.411.095,66
12	Puskesmas Kambangan	45.085.573,55	0,00	45.085.573,55
13	Puskesmas Jatinegara	231.010.350,11	0,00	231.010.350,11
14	Puskesmas Kedungbanteng	122.388.830,21	0,00	122.388.830,21
15	Puskesmas Pangkah	94.692.764,14	0,00	94.692.764,14
16	Puskesmas Penusupan	300.245.955,78	0,00	300.245.955,78
17	Puskesmas Slawi	295.421.561,15	0,00	295.421.561,15
18	Puskesmas Adiwerna	187.449.757,70	0,00	187.449.757,70
19	Puskesmas Pagiyanten	219.212.564,91	0,00	219.212.564,91
20	Puskesmas Talang	135.392.142,08	0,00	135.392.142,08
21	Puskesmas Kaladawa	42.044.660,83	0,00	42.044.660,83
22	Puskesmas Dukuhturi	60.076.804,12	0,00	60.076.804,12
23	Puskesmas Kupu	124.180.080,21	0,00	124.180.080,21
24	Puskesmas Dukuhwaru	94.266.665,83	0,00	94.266.665,83
25	Puskesmas Tarub	223.884.134,90	0,00	223.884.134,90
26	Puskesmas Kramat	92.211.425,90	0,00	92.211.425,90



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Obat-obatan		JUMLAH (Rp)
		Obat (Rp)	Obat-obatan Lainnya (Rp)	
27	Puskesmas Bangunalih	85.778.542,66	0,00	85.778.542,66
28	Puskesmas Suradadi	90.927.782,79	0,00	90.927.782,79
29	Puskesmas Jatibogor	160.695.231,66	0,00	160.695.231,66
30	Puskesmas Warurejo	285.359.988,70	0,00	285.359.988,70
31	RSUD dr. Soeselo	3.693.493.445,00	0,00	3.693.493.445,00
32	RSUD Suradadi	1.749.837.837,16	0,00	1.749.837.837,16
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	16.764.200,00	0,00	16.764.200,00
Jumlah		28.696.031.812,35	835.050,00	28.696.866.862,35

5) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Merupakan saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.547.759.397,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.104 Persediaan barang untuk diserahkan

No.	SKPD	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Rp)	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	302.683.000,00	0,00	302.683.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	226.343.750,00	0,00	226.343.750,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	0,00	1.018.732.647,00	1.018.732.647,00
Jumlah		529.026.750,00	1.018.732.647,00	1.547.759.397,00

6) Persediaan Natura dan Pakan

Merupakan saldo persediaan bahan makanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp175.998.192,00 yang terdapat pada RSUD dr. Soeselo sebesar Rp24.919.547,00, pada RSUD Suradadi sebesar Rp70.872.220,00 dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp80.206.425,00.

7) Persediaan Komponen

Merupakan saldo persediaan komponen rambu-rambu per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.732.000,00 yang terdapat pada Dinas Perhubungan.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Investasi Permanen dan Non Permanen untuk Tahun 2025 sebesar Rp285.404.422.365,14 dan Tahun 2024 sebesar Rp270.502.678.695,40 yaitu berupa Investasi Permanen penyertaan Modal Pemerintah Daerah.



5.3.1.2.a Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Akun ini menggambarkan jumlah dana milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditempatkan untuk jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Tegal pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD/PD), BPR/BKK dan lainnya. Saldo dinilai dengan metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 20%. Jumlah saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp285.404.422.365,14 dan 2024 sebesar Rp270.502.678.695,40.

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD/ per 31 Desember 2025 sebesar Rp285.404.422.365,14 dan tahun 2024 sebesar Rp270.502.678.695,40 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.105 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

No.	Uraian	Persentase Kepemilikan	2024 (Rp)	Penyertaan Modal 2025 (Rp)	Metode Ekuitas (Rp)	2025(Rp)
1	Bank Jateng	1,33%	54.748.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	59.248.000.000,00
2	PDAM	100%	170.136.606.949,00	0,00	5.016.937.334,70	175.153.544.283,70
3	PRPP Jateng, Semarang	0,54%	407.200.000,00	0,00	0,00	407.200.000,00
4	PD BPR BKK Kabupaten Tegal	47,60%	10.895.014.447,40	0,00	(167.498.087,96)	10.727.516.359,44
5	PT BKK JATENG CABANG KAB TEGAL	3,62%	12.250.000.000,00	0,00	0,00	12.250.000.000,00
6	PT BPR Bank Tegal Perseroda	100%	22.065.857.299,00	3.000.000.000,00	2.552.304.423,00	27.618.161.722,00
Jumlah			270.502.678.695,40	7.500.000.000,00	7.401.743.669,74	285.404.422.365,14

- a) PMPD Kabupaten Tegal pada Bank Jateng merupakan penyertaan saham biasa dan dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20% yaitu 1,33%. Saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp59.248.000.000,00 dan saldo Per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.748.000.000,00.
- b) PMPD pada PDAM Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp175.153.544.283,70 dan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp170.136.606.949,00 Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal pada PDAM Kabupaten Tegal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp88.260.652.627,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Perhitungan nilai penyertaan pada PDAM per 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.106 Investasi pada PDAM

No.	Investee	Modal Disetor (Rp)	Cadangan (Rp)	Laba (Rugi) (Rp)	Jumlah (Rp)	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	PDAM	117.019.194.393,00	43.095.424.976,53	15.038.924.914,17	175.153.544.283,70	100,00	175.153.544.283,70
	Jumlah	117.019.194.393,00	43.095.424.976,53	15.038.924.914,17	175.153.544.283,70	100,00	175.153.544.283,70

c) PMPD pada PRPP Jateng, Semarang merupakan penyertaan saham Kabupaten Tegal kepada PT. PRPP Jateng, dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari jumlah penyertaan Tahun 2024 sebesar Rp407.200.000,00.

d) PMPD pada PT BPR BKK Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2025 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 20%. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.727.516.359,44 dan Rp10.895.014.447,40. Nilai Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tegal Pada PT BPR BKK Kabupaten Tegal sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.350.000.000,00. Perhitungan ini didasarkan pada Laporan Keuangan PT BPR BKK Kabupaten Tegal yang telah diaudit oleh KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO dengan opini WTP sesuai laporan hasil pemeriksaan Nomor 00017/2.0282/AU.8/07/0182-1/1/II/2026. Nilai penyertaan pada BPR BKK Kabupaten Tegal per 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.107 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR-BKK Kabupaten Tegal

No.	Investee	Modal Disetor (Rp)	Cadangan (Rp)	Laba (Rugi) (Rp)	Jumlah (Rp)	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	BPR BKK Kabupaten Tegal	15.440.000.000,00	6.020.295.250,00	1.074.786.735,00	22.535.081.985,00	47,60	10.727.516.359,44
	Jumlah	15.440.000.000,00	6.020.295.250,00	1.074.786.735,00	22.535.081.985,00	47,60	10.727.516.359,44

e) PMPD pada Modal Pada PT BKK Jawa Tengah cabang Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2024 dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%, saldo per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari Penyertaan Modal Tahun 2024 yaitu sebesar sebesar Rp12.250.000.000,00 atau 3,62%.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- f) Penyertaan pada PT BPR Bank Tegal Perseroda merupakan penyertaan Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Tegal Perseroda, yang Tahun 2025 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp27.618.161.722,00 dan Rp22.065.857.299,00. Nilai Modal disetor Pemerintah Kabupaten pada PT BPR Bank Tegal Perseroda adalah sebesar Rp21.500.000.000,00. Perhitungan ini didasarkan pada Laporan Keuangan PT BPR Bank TGR yang telah diaudit oleh KAP INDARTO DAN YUDHIKA dengan opini WTP sesuai laporan hasil pemeriksaan nomor 00063/2.1358/AU.8/07/0906-4/1/II/2026 nilai penyertaan pada Bank TGR per 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.108 Investasi pada PT BPR Bank Tegal Perseroda

No.	Investee	Modal Disetor (Rp)	Cadangan (Rp)	Laba (Rugi) (Rp)	Jumlah (Rp)	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	PT BPR Bank Tegal Perseroda	21.500.000.000,00	3.076.010.293,00	3.042.151.429,00	27.618.161.722,00	100,00	27.618.161.722,00
	Jumlah	21.500.000.000,00	3.076.010.293,00	3.042.151.429,00	27.618.161.722,00	100,00	27.618.161.722,00

5.3.1.3. Aset Tetap

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Tegal berupa aset tetap yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Penyajian Nilai Aset Tetap dalam Neraca LKPD Tahun 2025 menggunakan metode kapitalisasi atas realisasi belanja modal Tahun 2025 ditambah dengan nilai administratif Aset Tetap yang ada dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap dengan pengecualian tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman, sedangkan untuk metode penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berdasarkan catatan dari Perangkat Daerah nilai Aset Tetap untuk Tahun 2025 sebesar Rp3.465.551.350.123,43 dan untuk Tahun 2024 sebesar Rp3.323.707.307.532,78 yang disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.109 Aset Tetap

Uraian		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah	803.291.218.801,63	799.541.843.801,63
2	Peralatan dan mesin	1.103.762.352.836,83	1.005.711.581.609,74
3	Gedung dan Bangunan	1.783.410.417.149,04	1.730.726.461.769,04
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.752.718.488.254,87	2.568.513.378.017,87
5	Aset Tetap Lainnya	183.191.770.827,59	168.262.505.370,59
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.545.138.753,00	13.743.725.544,00
7	Akumulasi Penyusutan	(3.168.368.036.499,55)	(2.962.792.188.580,09)
Jumlah Aset Tetap		3.465.551.350.123,43	3.323.707.307.532,78

Tabel 5.110 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Aktiva Tetap	Saldo	Mutasi Tahun 2025		Saldo
	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2025 (Rp)
Tanah	799.541.843.801,63	3.749.375.000,00	0,00	803.291.218.801,63
Peralatan dan Mesin	1.005.711.581.609,74	119.435.835.385,00	21.385.064.157,90	1.103.762.352.836,84
Gedung dan Bangunan	1.730.726.461.769,04	89.217.356.195,00	36.533.400.815,00	1.783.410.417.149,04
Jalan, Jembatan dan Irigasi	2.568.513.378.017,87	189.333.258.470,00	5.128.148.233,00	2.752.718.488.254,87
Aset Tetap lainnya	168.262.505.370,59	26.545.101.692,01	11.615.836.235,00	183.191.770.827,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	13.743.725.544,00	2.827.797.172,00	9.026.383.963,00	7.545.138.753,00
Akumulasi Penyusutan	(2.962.792.188.580,09)	151.405.273.150,41	356.981.121.069,87	(3.168.368.036.499,55)
Jumlah	3.323.707.307.532,78	582.513.997.064,42	440.669.954.473,77	3.465.551.350.123,43

5.3.1.3.a Tanah

Nilai Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp803.291.218.801,63 dan Rp799.541.843.801,63. Penambahan Tanah berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada RSUD Soeselo Slawi sebesar Rp3.749.375.000,00. Sedangkan untuk akun Aset Tetap Tanah pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.111 Tanah

No.	Nama Perangkat Daerah	ASET TETAP TANAH	
		per 31 Des. 2025 (Rp)	per 31 Des. 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.229.896.545,95	39.229.896.545,95
2	Dinas Kesehatan	8.340.221.443,71	8.340.221.443,71
3	RSUD Dr.Soeselo	13.682.243.931,00	9.932.868.931,00
4	RSUD Suradadi	8.538.262.400,00	8.538.262.400,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	426.267.917.039,42	426.267.917.039,42
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	178.489.065.742,71	178.489.065.742,71
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	385.220.000,00	385.220.000,00
9	Dinas Sosial	1.725.651.660,00	1.725.651.660,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	ASET TETAP TANAH	
		per 31 Des. 2025 (Rp)	per 31 Des. 2024 (Rp)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.507.911.000,00	9.507.911.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	10.638.448.463,71	10.638.448.463,71
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	837.755.000,00	837.755.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	140.160.000,00	140.160.000,00
15	Dinas Perhubungan	5.631.707.400,00	5.631.707.400,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	36.518.971.287,71	36.518.971.287,71
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	563.205.423,71	563.205.423,71
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	25.419.273.500,00	25.419.273.500,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00
21	Dinas Perikanan	570.494.000,00	570.494.000,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	841.311.840,00	841.311.840,00
23	Sekretariat Daerah	23.061.405.200,00	23.061.405.200,00
24	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	0,00	0,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	1.669.646.783,71	1.669.646.783,71
27	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00
29	Inspektorat	530.720.000,00	530.720.000,00
30	Kecamatan Adiwerna	100.000.000,00	100.000.000,00
31	Kecamatan Balapulang	65.000.000,00	65.000.000,00
32	Kecamatan Bojong	1.673.750.000,00	1.673.750.000,00
33	Kecamatan Bumijawa	124.100.000,00	124.100.000,00
34	Kecamatan Dukuhturi	679.173.000,00	679.173.000,00
35	Kecamatan Dukuwaru	700.000.000,00	700.000.000,00
36	Kecamatan Jatinegara	803.000.000,00	803.000.000,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	34.000.000,00	34.000.000,00
38	Kecamatan Kramat	685.268.500,00	685.268.500,00
39	Kecamatan Lebaksiu	47.500.000,00	47.500.000,00
40	Kecamatan Margasari	876.928.640,00	876.928.640,00
41	Kecamatan Pagerbarang	399.401.000,00	399.401.000,00
42	Kecamatan Pangkah	286.000.000,00	286.000.000,00
43	Kecamatan Slawi	2.933.249.000,00	2.933.249.000,00
44	Kecamatan Suradadi	500.000.000,00	500.000.000,00
45	Kecamatan Talang	83.400.000,00	83.400.000,00
46	Kecamatan Tarub	417.080.000,00	417.080.000,00
47	Kecamatan Warurejo	293.880.000,00	293.880.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Jumlah		803.291.218.801,63	799.541.843.801,63



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tegal menghadapi sengketa tanah berupa gugatan perdata dari pihak ketiga atas kepemilikan tanah di Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan pokok gugatan berupa perbuatan melawan hukum dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tegal memasang/menempatkan berupa papan bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tegal Sertifikat No: 108/Tmblng/00 Luas: 816 M².

Sebidang tanah tersebut dibeli pada tahun 2000 yang berlokasi di Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas ± 816 M² yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai No 20/Tembalang atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk selanjutnya Atas pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam KIB A BPKAD.

Atas sengketa tersebut, Pengadilan Negeri Semarang kemudian mengadili gugatan perkara perdata dalam tingkat pertama dan menjatuhkan putusan sesuai Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 551/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Juli 2020 yang kurang lebih menyatakan:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 477 Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan luas ± 320 M² adalah sah milik penggugat dan mempunyai kekuatan hukum;
- 3) Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 20/Tembalang luas 816 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengaku dan mengklaim tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan memasang/menempatkan papan bertuliskan “Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tegal Sertifikat No: 108/Tmblng/00 Luas: 816 M²” diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; dan
- 5) Menghukum Tergugat/Pemerintah Kabupaten Tegal membayar biaya perkara sebesar Rp3.008.000,00.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Kasubag Hukum telah mengajukan Memori Banding dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Agustus 2020 yang selanjutnya diserahkan ke Panitera Pengadilan Tinggi Semarang pada bulan Januari 2022 sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi



Semarang No. W.12.U/102/HK.02/01/2022 dengan putusan kembali mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal kembali mengajukan memori banding berupa peninjauan kembali dengan dibantu Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan telah didaftarkan dengan register Nomor 15PK/PDT/2024.

Pada tanggal 27 Februari 2024 sidang peninjauan kembali memutuskan:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00.

5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Tegal adalah peralatan dan mesin yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp1.005.711.581.609,74 dan Rp1.103.762.352.836,83 Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar Rp112.650.087.395,00;
- 2) Penambahan Peralatan dan Mesin bersumber dari :
 - a) Hibah dari Kementrian Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 1.432.018.800,00, Hibah kepada BPBD Kabupaten Tegal dari Kementerian sebesar Rp3.682.279.680,00;
 - b) Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp237.151.120,00 dari KIB C;
 - c) Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp791.619.500,00 dari KIB E;
 - d) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp261.601.090,00.
- 3) Pengurangan Peralatan dan Mesin dari :
 - a) Penghapusan sebesar Rp18.321.109.163,90;
 - b) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp559.535.670,00;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- c) Reklasifikasi ke beban barang dan jasa sebesar Rp1.520.471.063,00;
- d) Reklasifikasi ke beban ekstrakompatible sebesar Rp983.948.261,00.

Sedangkan untuk rincian akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.112 Peralatan dan Mesin

No.	Nama Perangkat Daerah	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
		per 31 Des. 2025 (Rp)	per 31 Des. 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.469.058.391,67	183.535.745.206,67
2	Dinas Kesehatan	134.404.251.541,03	127.745.744.361,03
3	RSUD Dr.Soeselo	304.554.665.095,64	271.828.567.285,67
4	RSUD Suradadi	69.243.088.258,50	67.675.248.823,50
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.823.019.246,69	25.983.213.237,69
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	9.681.563.225,50	9.564.813.225,50
7	Satuan Polisi Pamong Praja	9.777.505.847,00	8.469.780.980,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.961.029.079,00	7.329.625.479,00
9	Dinas Sosial	11.018.204.277,00	10.912.689.117,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	8.663.582.354,00	9.298.949.372,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.433.901.721,00	9.480.589.121,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	37.090.751.355,50	33.852.907.730,50
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.369.991.780,16	11.119.941.897,03
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.761.150.090,00	3.657.040.310,00
15	Dinas Perhubungan	57.224.162.469,00	56.659.376.499,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.258.251.340,00	9.552.939.239,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	9.937.822.814,00	8.336.288.794,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.251.091.652,12	4.828.311.484,12
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.780.657.070,66	9.121.632.018,66
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.856.982.220,00	3.854.662.220,00
21	Dinas Perikanan	4.746.695.779,00	4.618.711.779,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	11.023.190.649,00	22.027.016.036,00
23	Sekretariat Daerah	36.554.689.996,97	28.902.588.191,37
24	Sekretariat DPRD	25.899.761.841,40	18.740.772.074,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	5.723.032.984,00	4.819.338.574,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	17.274.535.283,04	13.566.247.962,04
27	Badan Pendapatan Daerah	8.065.160.432,96	7.721.079.932,96
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.847.000.241,00	4.569.087.170,00
29	Inspektorat	6.702.490.806,00	6.039.886.540,00
30	Kecamatan Adiwerna	1.278.446.899,00	927.015.100,00
31	Kecamatan Balapulang	1.296.639.925,00	971.868.825,00
32	Kecamatan Bojong	1.431.719.825,00	1.223.677.325,00
33	Kecamatan Bumijawa	1.173.567.229,00	797.106.429,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
		per 31 Des. 2025 (Rp)	per 31 Des. 2024 (Rp)
34	Kecamatan Dukuhturi	1.209.813.450,00	880.111.650,00
35	Kecamatan Dukuhwaru	1.162.495.511,00	779.913.311,00
36	Kecamatan Jatinegara	1.562.280.094,00	1.124.113.290,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	1.259.577.639,00	836.931.750,00
38	Kecamatan Kramat	2.470.426.734,99	1.856.083.599,99
39	Kecamatan Lebaksiu	1.159.471.290,00	787.753.490,00
40	Kecamatan Margasari	1.226.633.873,00	904.482.973,00
41	Kecamatan Pagerbarang	1.167.062.741,00	786.468.442,00
42	Kecamatan Pangkah	1.267.297.568,00	957.996.618,00
43	Kecamatan Slawi	4.600.573.626,00	4.089.327.840,00
44	Kecamatan Suradadi	1.223.970.657,00	810.509.857,00
45	Kecamatan Talang	1.270.599.131,00	1.008.439.747,00
46	Kecamatan Tarub	1.171.837.912,00	701.389.112,00
47	Kecamatan Warurejo	1.037.852.090,00	635.331.290,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.394.798.800,00	1.820.266.300,00
Jumlah		1.103.762.352.836,83	1.005.711.581.609,74

5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan

Aktiva tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp1.730.726.461.769,04 dan Rp1.783.410.417.149,04. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal sebesar Rp80.023.255.964,00;
- 2) Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersumber Hibah pada Kecamatan Warureja Rp353.000.000,- berupa Mushola dari Orlin Beauty Skincare; Hibah pada Dinas Sosial senilai Rp327.500.000,00 Pembangunan Sentra Kreasi Penyandang Disabilitas dari Bank Jateng Cabang Slawi; dan Hibah pada RSUD Suradadi Rp500.000.000,00 berupa Masjid .
- 3) Penambahan Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi dari extra komptible masuk ke KIB C sebesar Rp330.843.740,00;
- 4) Pengurangan Gedung dan Bangunan dari Penghapusan sebesar Rp359.235.343,00;
- 5) Pengurangan Gedung dan Bangunan pindah ke KIB B hasil dari Inventarisasi Rp3.500.000,00;
- 6) Pengurangan Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi antar Aset Tetap ke KIB D sebesar Rp4.274.108.081,00;
- 7) Pengurangan Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi ke KIB E sebesar Rp39.710.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 8) Pengurangan Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi ke extra komptible sebesar Rp328.044.947,00;
- 9) Pengurangan Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi ke aset Rusak Berat sebesar Rp56.700.000,00.

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.113 Gedung dan Bangunan

No.	Nama Perangkat Daerah	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
		per 31 Des. 2025 (Rp)	per 31 Des. 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	754.747.790.846,91	721.908.243.892,91
2	Dinas Kesehatan	152.517.746.061,00	149.596.106.194,00
3	RSUD Dr.Soeselo	174.212.010.452,00	165.500.130.169,00
4	RSUD Suradadi	120.431.154.510,00	119.600.174.310,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.877.571.477,00	49.083.532.512,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	13.948.346.742,00	21.972.784.336,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	5.374.534.400,00	5.451.329.780,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.491.589.440,00	3.013.559.380,00
9	Dinas Sosial	6.086.860.935,00	5.759.360.935,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	13.381.146.976,00	10.918.890.976,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	26.768.723.399,00	29.284.550.850,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	24.130.677.117,00	19.251.122.723,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.017.656.741,00	2.438.356.241,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.452.186.791,00	1.425.427.291,00
15	Dinas Perhubungan	45.663.218.467,00	50.269.585.914,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.604.903.801,00	2.500.421.801,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	140.727.201.709,00	125.665.872.077,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.417.850.311,13	17.417.850.311,13
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	50.091.357.564,00	51.514.860.119,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.161.682.140,00	5.741.239.240,00
21	Dinas Perikanan	5.356.266.610,00	6.149.006.480,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	24.322.668.737,00	30.540.198.337,00
23	Sekretariat Daerah	42.193.782.766,00	47.027.211.246,00
24	Sekretariat DPRD	9.177.786.878,00	6.834.012.878,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	6.387.559.752,00	4.908.453.402,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	6.061.751.019,00	4.937.252.019,00
27	Badan Pendapatan Daerah	2.089.770.400,00	2.089.770.400,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.860.339.500,00	1.803.639.500,00
29	Inspektorat	6.253.966.882,00	5.259.504.682,00
30	Kecamatan Adiwerna	1.394.523.200,00	1.394.523.200,00
31	Kecamatan Balapulang	2.464.126.877,00	2.464.126.877,00
32	Kecamatan Bojong	5.127.284.889,00	5.032.329.889,00
33	Kecamatan Bumijawa	3.150.156.500,00	3.150.156.500,00
34	Kecamatan Dukuhturi	1.140.492.255,00	1.180.792.255,00
35	Kecamatan Dukuwaru	2.410.962.690,00	2.211.376.190,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
		per 31 Des. 2025 (Rp)	per 31 Des. 2024 (Rp)
36	Kecamatan Jatinegara	2.318.989.500,00	2.318.989.500,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	2.357.840.700,00	2.357.840.700,00
38	Kecamatan Kramat	4.462.146.150,00	1.323.452.150,00
39	Kecamatan Lebaksiu	1.721.252.000,00	1.721.252.000,00
40	Kecamatan Margasari	7.013.950.750,00	6.168.584.000,00
41	Kecamatan Pagerbarang	2.492.078.865,00	2.400.976.865,00
42	Kecamatan Pangkah	6.145.946.100,00	6.131.946.100,00
43	Kecamatan Slawi	16.520.896.391,00	16.104.025.391,00
44	Kecamatan Suradadi	1.550.801.330,00	1.550.801.330,00
45	Kecamatan Talang	2.597.622.526,00	2.415.804.526,00
46	Kecamatan Tarub	2.272.766.202,00	2.005.069.500,00
47	Kecamatan Warurejo	2.452.715.500,00	2.099.715.500,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.007.762.300,00	832.251.300,00
Jumlah		1.783.410.417.149,04	1.730.726.461.769,04

5.3.1.3.d Jalan, Jaringan dan Irigasi

Aktiva tetap jalan, jaringan dan irigasi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp2.568.040.378.017,87 dan Rp2.752.718.488.254,87. Adapun rincian penambahan sebesar dan pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Belanja Modal sebesar Rp176.193.275.755,00
- 2) Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang bersumber Hibah dari Hibah dari Kementrian Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Rp52.000.000,00;
- 3) Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi dari reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp12.544.028.461,00;
- 4) Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi dari reklasifikasi belanja barang dan jasa sebesar Rp543.954.254,00;
- 5) Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Penghapusan BMD sebesar Rp1.594.914.735,00 ;
- 6) Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi dari reklasifikasi ke Beban Barang Jasa sebesar Rp1.432.849.050,00;
- 7) Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi dari reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp2.100.384.448,00.

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap jalan, jembatan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.114 Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Nama Perangkat Daerah	Aset Tetap Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	
		per 31 Des. 2025 (Rp)	per 31 Des. 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.480.829.500,00	18.790.030.443,00
2	Dinas Kesehatan	9.783.265.650,00	8.012.092.175,00
3	RSUD Dr.Soeselo	21.459.486.491,00	20.174.831.141,00
4	RSUD Suradadi	3.070.470.905,00	2.894.002.905,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.374.146.687.010,57	2.214.909.407.158,57
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	133.538.711.842,30	132.692.210.339,30
7	Satuan Polisi Pamong Praja	171.476.900,00	171.476.900,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.763.201.500,00	3.763.201.500,00
9	Dinas Sosial	159.300.000,00	159.300.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	79.449.580,00	79.449.580,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.201.789.596,00	1.846.951.396,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	23.425.865.560,00	22.934.314.560,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.599.449,00	400.599.449,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	68.797.000,00	68.797.000,00
15	Dinas Perhubungan	67.187.804.485,00	58.189.595.894,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.527.500,00	9.527.500,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	682.489.800,00	630.489.800,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	24.504.754.992,00	22.719.694.033,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	161.971.500,00	161.971.500,00
21	Dinas Perikanan	6.203.558.565,00	6.161.098.565,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	7.700.576.848,00	7.700.576.848,00
23	Sekretariat Daerah	1.510.559.650,00	1.004.891.400,00
24	Sekretariat DPRD	1.396.987.000,00	1.268.597.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	2.578.033.478,00	2.578.033.478,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	189.213.450,00	189.213.450,00
27	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	290.556.000,00	290.556.000,00
29	Inspektorat	179.912.033,00	179.912.033,00
30	Kecamatan Adiwerna	149.510.000,00	149.510.000,00
31	Kecamatan Balapulang	49.411.480,00	49.411.480,00
32	Kecamatan Bojong	0,00	0,00
33	Kecamatan Bumijawa	22.100.000,00	22.100.000,00
34	Kecamatan Dukuhturi	0,00	46.900.000,00
35	Kecamatan Dukuwaru	206.725.000,00	0,00
36	Kecamatan Jatinegara	45.700.000,00	45.700.000,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	44.570.000,00	44.570.000,00
38	Kecamatan Kramat	8.558.151.902,00	7.753.639.902,00
39	Kecamatan Lebaksiu	286.445.000,00	286.445.000,00
40	Kecamatan Margasari	395.333.000,00	199.080.000,00
41	Kecamatan Pagerbarang	230.784.000,00	44.261.000,00
42	Kecamatan Pangkah	66.010.000,00	66.010.000,00
43	Kecamatan Slawi	36.199.007.118,00	31.744.581.118,00
44	Kecamatan Suradadi	18.400.000,00	18.400.000,00
45	Kecamatan Talang	57.414.500,00	18.897.500,00
46	Kecamatan Tarub	0,00	0,00
47	Kecamatan Warurejo	36.866.970,00	36.866.970,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.183.000,00	6.183.000,00
Jumlah		2.752.718.488.254,87	2.568.513.378.017,87



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2025 dan 2024 yang masing-masing bernilai Rp183.191.770.827,59 dan Rp168,262,505,370.59. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya pada pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp26.388.086.692,00;
- 2) Penambahan reklasifikasi dari beban barang dan jasa sebesar Rp17.712.000,01;
- 3) Penambahan dari reklasifikasi antar KIB Aset Tetap sebesar Rp139.303.000,00
- 4) Pengurangan penghapusan Rp2.137.025,00;
- 5) Pengurangan Reklasifikasi ke beban barang dan jasa sebesar - Rp10.822.079.710,00;
- 6) Pengurangan Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp791.619.500,00.

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap lainnya pada adalah sebagai berikut :

Tabel 5.115 Aset Tetap Lainnya

No.	Nama Perangkat Daerah	Aset tetap lainnya	
		per 31 Des. 2025 (Rp)	per 31 Des. 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	176.446.965.303,60	161.630.643.761,59
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
3	RSUD Dr.Soeselo	7.921.600,00	7.921.600,00
4	RSUD Suradadi	0,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	3.769.500,00	3.769.500,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	378.107.104,00	378.107.104,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	3.772.500,00	3.772.500,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.804.000,00	12.804.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	61.889.900,00	3.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.707.460,00	12.707.460,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	340.395.000,00	340.395.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	26.746.800,00	26.746.800,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.000.000,00	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Aset tetap lainnya	
		per 31 Des. 2025 (Rp)	per 31 Des. 2024 (Rp)
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	356.699.600,00	315.009.600,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.714.224.018,00	1.714.224.018,00
21	Dinas Perikanan	379.000.000,00	381.137.025,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	25.000.000,00	25.000.000,00
23	Sekretariat Daerah	1.352.089.650,00	1.352.089.650,00
24	Sekretariat DPRD	279.931.960,00	265.430.920,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	563.857.600,00	563.857.600,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	0,00	0,00
27	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	37.702.562,00	37.702.562,00
29	Inspektorat	33.062.450,00	33.062.450,00
30	Kecamatan Adiwerna	61.675.133,00	61.675.133,00
31	Kecamatan Balapulang	61.675.133,00	61.675.133,00
32	Kecamatan Bojong	61.675.133,00	61.675.133,00
33	Kecamatan Bumijawa	61.675.133,00	61.675.133,00
34	Kecamatan Dukuhturi	75.675.133,00	75.675.133,00
35	Kecamatan Dukuhwaru	61.675.133,00	61.675.133,00
36	Kecamatan Jatinegara	61.675.139,00	61.675.139,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	61.675.133,00	61.675.133,00
38	Kecamatan Kramat	61.675.133,00	61.675.133,00
39	Kecamatan Lebaksiu	61.675.133,00	61.675.133,00
40	Kecamatan Margasari	61.675.133,00	61.675.133,00
41	Kecamatan Pagerbarang	61.675.133,00	61.675.133,00
42	Kecamatan Pangkah	61.675.133,00	61.675.133,00
43	Kecamatan Slawi	87.646.553,00	87.646.553,00
44	Kecamatan Suradadi	61.675.133,00	61.675.133,00
45	Kecamatan Talang	61.675.133,00	61.675.133,00
46	Kecamatan Tarub	61.675.133,00	61.675.133,00
47	Kecamatan Warurejo	61.675.133,00	61.675.133,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Jumlah		183.191.770.827,59	168.262.505.370,59

5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Adalah berupa kegiatan yang belum dapat diselesaikan pelaksanaannya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.545.138.753,00 turun sebesar Rp6.198.586.791,00 atau (45,10%) dibandingkan per 31 Desember 2024. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan oleh reklasifikasi dari KDP ke aset tetap. Rincian KDP per SKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.116 Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	PD (Perangkat Daerah)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	5.896.031.530,00
2.	Dinas Kesehatan	955.020.474,00	172.050.000,00
3.	RSUD dr. Soeselo	0,00	2.932.802.433,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.922.276.698,00	0,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	4.515.019.531,00	4.515.019.531,00
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	126.622.050,00	126.622.050,00
7.	Dinas Sosial	15.700.000,00	15.700.000,00
8.	Inspektorat	0,00	75.000.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.500.000,00	10.500.000,00
Jumlah		7.545.138.753,00	13.743.725.544,00

Tabel 5.117 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	PD (Perangkat Daerah)	Tahun 2024 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.896.031.530,00	0,00	5.896.031.530,00	0,00	Diposting sebagai aset tetap
2.	Dinas Kesehatan	172.050.000,00	870.920.474,00	87.950.000,00	955.020.474,00	DED, pembangunan Puskesmas Wangandawa
3.	RSUD dr. Soeselo	.932.802.433,00	0,00	2.932.802.433,00	0,00	Diposting sebagai Aset tetap
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.922.276.698,00	0,00	1.922.276.698,00	Reklas dari jembatan pada Jalan Kabupaten
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	4.515.019.531,00	0,00	0,00	4.515.019.531,00	DED
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	126.622.050,00	0,00	0,00	126.622.050,00	DED
7.	Dinas Sosial	15.700.000,00	0,00	0,00	15.700.000,00	DED
8.	Inspektorat	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	Diposting sebagai Aset Tetap
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	DED
Jumlah		13.743.725.544,00	2.793.197.172,00	8.991.783.963,00	7.545.138.753,00	-

Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya pada pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Penambahan KDP sebesar Rp2.793.197.172,00 yang berasal dari Reklasifikasi belanja Modal gedung pada Dinas Kesehatan sebesar Rp870.920.474,00 dan Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.922.276.698,00;
2. Pengurangan KDP sebesar Rp8.991.783.963,00 yang berasal dari Reklas KDP ke Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas pendidikan sebesar Rp5.896.031.530,00;
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp87.950.000,00;
 - c. Rsud dr Soeselo Slawi Rp2.932.802.433,00;;
 - d. Inspektorat sebesar Rp75.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.167.813.218.654,09 dan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.962.792.188.580,09. Adapun rincian akumulasi penyusutan pada masing-masing Perangkat Daerah disajikan dalam lampiran 5.5.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Akun ini menggambarkan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal berupa Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam klasifikasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp140.114.341.770,67 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp144.228.478.127,67 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.118 Aset Lainnya

Uraian		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	81.600.000,00	251.291.839,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.595.750.000,00	6.595.750.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	3.865.358.475,00	3.676.980.475,00
4	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.313.134.105,00)	(3.105.518.695,00)
5	Aset Lain-lain	194.002.683.920,67	206.085.086.161,67
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(61.117.916.520,00)	(69.918.906.653,00)
7	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	643.795.000,00
Jumlah		140.114.341.770,67	144.228.478.127,67

5.3.1.5.a Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan pengakuan piutang TP/TGR atas kerugian daerah karena hilangnya aset daerah. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp81.600.000,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp251.291.839,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.119 Tagihan Jangka Panjang

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Khaerudin sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0583/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
2	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. Ali Murtado sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0519/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	4.750.000,00	5.250.000,00
3	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Abdul Fatah, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/503 tanggal 6 Juli 2010 dan surat Bupati No. 951/2084/2010 tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	2.900.000,00	3.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
4	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Hariyanto, A.Md sesuai LHP Inspektorat No 356/288/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan surat Bupati No. 951/2714/2011 tanggal 10 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	0,00	10.300.000,00
5	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Fajar Rokhwidi, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/040/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan surat Bupati No. 951/2688/2011 tanggal 8 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	0,00	104.000.000,00
6	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah atas nama Imam Abadi Soebedjo	0,00	8.600.000,00
7	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Astono sesuai LHP Inspektorat No 356/15/264/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan surat Bupati No. 721/2015 tanggal 3 Desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	0,00	22.291.839,00
8	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. Nurholis Sail	0,00	27.900.000,00
9	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Nuridin sesuai LHP Inspektorat No 356/15/420/2012 tanggal 13 Februari 2015 dan surat Bupati No. 720/2015 tanggal 2 Desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	0,00	8.200.000,00
10	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah an Ir Toto Subandrio sesuai Surat Keputusan Pembebanan Penggantian kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) nomor 030/1931 tahun 2020	0,00	14.500.000,00
11	Pengakuan Piutang atas hilangnya aset daerah an Komsari, SIP sesuai Surat keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) Nomor 030/25/1112/ tahun 2019	17.000.000,00	17.000.000,00
12	Pengakuan Piutang atas hilangnya aset daerah an Taryono sesuai Surat Bupati tegal Nomor 951/12/1099 tanggal 10 Maret 2016 perihal pemberitauna kerugian daerah keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) Nomor 030/25/1112/ tahun 2019	17.100.000,00	17.100.000,00
13	Utang Perhitungan Pihak Ketiga atas Belanja GU kecamatan Kramat Tahun 2019 yang belum di setor	0,00	6.000.000,00
14	Pengakuan Piutang atas hilangnya aset daerah an Rukun Santosa, Skep., Ners sesuai Surat keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) Nomor 05 tahun 2025 tanggal 9 Oktober 2025	33.600.000,00	0,00
Jumlah		81.600.000,00	251.291.839,00

5.3.1.5.b Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan suatu area yang akan dimanfaatkan dan dikelola bersama selama jangka waktu tertentu. Aset kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai investasi yang disertakan Pemerintah Kabupaten Tegal di dalam perjanjian kerjasama. Saldo per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp6.595.750.000,00 dan saldo per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp6.595.750.000,00. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.120 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi	6.295.750.000,00	6.295.750.000,00
2	Pembangunan LIK Takaru	300.000.000,00	300.000.000,00
	Jumlah	6.595.750.000,00	6.595.750.000,00

1) Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/05296/2000, tanggal 19 Oktober 2000. Perjanjian kerjasama selama 30 tahun atau berakhir pada tahun 2030. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 16.618 m² yang berada dalam HPL Nomor 1/1997 sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 6/HPL/BPN/97 dengan nilai Rp6.231.750.000,00 dan nilai dari HPL sebesar Rp64.000.000,00, sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp6.295.750.000,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan pusat perdagangan dan rekreasi beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp12.900.001.000,00. Perjanjian kerjasama ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 09/DPRD/IX/2000.

Adendum pertama dilakukan tanggal 16 Februari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0670/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.593.551.000,00. Adendum ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Adendum kedua dilakukan tanggal 14 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05528/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 Adendum pertama yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.595.717.000,00.

2) Pembangunan LIK Takaru

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/02405/2002, tanggal 6 Juni 2002. Perjanjian Kerjasama selama 30 tahun atau berakhir pada tahun 2032. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 2000 m² yang berada di dalam wilayah LIK Takaru dengan nilai Rp300.000.000,00, sementara penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan LIK Takaru beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.101.847.500,00. Perjanjian kerjasama telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 12 Tahun 2002.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Adendum dilakukan tanggal 4 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05531/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp2.134.847.500,00.

5.3.1.5.c Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud pada pemerintah Kabupaten Tegal adalah berupa Lisensi dan Franchise, Software dengan masa manfaat terbatas sehingga dilakukan amortisasi. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan Metode Garis Lurus. Untuk Software yang mengalami pengembangan aplikasi dan telah memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud, maka pengeluarannya akan dicatat sebagai kapitalisasi. Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025 sebesar Rp3.865.358.475,00 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp3.676.980.475,00. Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp117.005.000,00 pada RSUD dr Soeselo Slawi berupa Lisensi dan Franchise dan Inspektorat sebesar Rp71.373.000,00 berupa Software. Adapun rincian Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Perangkat Daerah Kabupaten Tegal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.121 Aset Tidak Berwujud

No.	Nama Perangkat Daerah	Saldo	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	54.967.000,00	54.967.000,00
2.	RSUD Dr.Soeselo	2.198.214.978,00	2.081.209.978,00
3.	RSUD Suradadi	202.622.000,00	202.622.000,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	114.730.800,00	114.730.800,00
5.	Dinas Perhubungan	84.201.435,00	84.201.435,00
6.	Dinas Komunikasi dan Informasi	466.499.600,00	466.499.600,00
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	4.000.000,00	4.000.000,00
8..	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.000.000,00	92.000.000,00
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.485.000,00	1.485.000,00
10	Sekretariat DPRD	79.000.000,00	79.000.000,00
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	40.404.000,00	40.404.000,00
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	384.523.112,00	384.523.112,00
13.	Inspektorat	142.710.550,00	71.337.550,00
Jumlah		3.865.358.475,00	3.676.980.475,00



5.3.1.5.d Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.313.134.105,00 dan saldo tahun 2024 adalah sebesar Rp3.105.518.695,00. Adapun rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.122 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	Nama Perangkat Daerah	SALDO	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	(54.967.000,00)	(54.967.000,00)
2.	RSUD Dr.Soeselo	(1.944.158.478,00)	(1.867.010.478,00)
3.	RSUD Suradadi	(202.622.000,00)	(198.122.000,00)
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(103.719.600,00)	(92.708.400,00)
5.	Dinas Perhubungan	(84.201.435,00)	(84.201.435,00)
6.	Dinas Komunikasi dan Informasi	(275.622.680,00)	(232.360.720,00)
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	(4.000.000,00)	(3.000.000,00)
8.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(69.000.000,00)	(46.000.000,00)
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.485.000,00)	(1.485.000,00)
10.	Sekretariat DPRD	(59.250.000,00)	(39.500.000,00)
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	(40.404.000,00)	(30.303.000,00)
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(384.523.112,00)	(384.523.112,00)
13.	Inspektorat	(89.180.800,00)	(71.337.550,00)
Jumlah		(3.313.134.105,00)	(3.105.518.695,00)

5.3.1.5.e Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp194.002.683.920,67 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp206.085.086.161,67. Aset Lain-lain berupa Aset Rusak Berat dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

- Aset rusak berat merupakan reklasifikasi dari aset tetap karena aset tetap tersebut dalam kondisi rusak berat sehingga akan diusulkan penghapusan. Saldo aset rusak berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp193.464.683.920,67 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp205.547.086.161,67. Adapun rincian Aset rusak berat dapat dilihat dalam lampiran 5.6.
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang akan dihibahkan ke Instansi Vertikal berupa Tanah. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp538.000.000,00.



5.3.1.5.f Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp61.117.916.520,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.918.906.653,00. Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain berupa Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat.

5.3.1.5.g Kas yang dibatasi Penggunaannya

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 tidak ada dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp643.795.000,00 merupakan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) yang merupakan transfer dari pusat yang belum masuk ke RKUD per 31 Desember 2024.

5.3.1.6. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp41.311.607.500,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.558.327.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.123 Properti Investasi

No	Uraian	2025 (Rp)	2024(Rp)
1	Properti Investasi Tanah	30.209.207.500,00	30.209.207.500,00
2	Properti Investasi Bangunan Gedung	12.336.000.000,00	12.336.000.000,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(1.233.600.000,00)	(986.880.000,00)
Jumlah		41.311.607.500,00	41.558.327.500,00

Properti Investasi Tanah berupa Aset Tanah Bengkok yang Disewakan Pemerintah Kabupaten terdiri dari Aset Tanah Bengkok di Kecamatan Kramat sebesar Rp828.358.500,00 dan Kecamatan Slawi sebesar Rp26.431.825.000,00 dan Tanah LIK Takaru Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp2.949.024.000,00.

Properti Investasi Bangunan Gedung berupa LIK Takaru pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja sebesar Rp12.336.000.000,00.

5.3.2. Kewajiban

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.207.199.194,80 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp60.666.235.280,24 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.124 Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	2025 (Rp)	2024(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	6.000.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	6.119.249.029,80	7.868.916.516,24
3	Utang Belanja	45.087.950.165,00	52.791.318.764,00
Jumlah		51.207.199.194,80	60.666.235.280,24

5.3.2.1.a Utang PFK

Merupakan saldo pajak yang telah dipotong/dipungut oleh bendahara namun belum disetorkan per 31 Desember 2025 tidak ada dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.000.000,00 berupa Saldo Utang PFK pada Kecamatan Kramat merupakan sisa pembayaran kepada pihak ketiga atas belanja GU Tahun 2019 yang belum disetor.

5.3.2.1.b Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima dimuka merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga yang pada 31 Desember 2025 belum digunakan pemanfaatannya sebesar Rp6.119.249.029,80 dan saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada 31 Desember 2024 sebesar Rp7.868.916.516,24 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.125 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pajak Reklame	1.471.612.283,00	1.525.594.391,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.626.067.038,47	6.014.532.916,91
3	Lain-lain PAD	21.569.708,33	328.789.208,33
Jumlah		6.119.249.029,80	7.868.916.516,24

1) Pajak Reklame

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 yang berasal dari Pajak Reklame sebesar Rp1.471.612.283,00 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.525.594.391,00 yang berada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 yang berasal dari sewa sebesar Rp4.626.067.038,47 dan TA 2024 sebesar Rp6.014.532.916,91 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.126 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	421.666.666,67	652.473.375,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.830.117.444,23	4.997.486.434,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25.018.998,33	29.418.998,33
4	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	150.633.333,33	161.750.000,00
5	Kecamatan Slawi	99.769.500,00	99.169.500,00
6	Kecamatan Kramat	25.001.395,83	25.001.395,83
7	BPKAD	73.859.700,08	49.233.213,75
Jumlah		4.626.067.038,47	6.014.532.916,91

3) Lain-lain PAD

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 yang berasal dari Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan sewa hasil pemanfaatan kekayaan daerah sewa pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dan saldo Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan per 31 Desember 2025 Rp21.569.708,33 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp328.789.208,33.

5.3.2.1.c Utang Belanja

Utang Belanja merupakan belanja per 31 Desember 2025 yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp45.087.950.165,00 dan saldo per 31 Desember 2024 Rp52.791.318.764,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.127 Utang Belanja

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	6.703.919.125,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	994.844.519,00	1.742.908.574,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	23.319.634,00	31.776.239,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	51.387.550,00	62.321.700,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	546.550.515,00	4.140.946.269,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	700.000,00	480.000,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	158.696.828,00	165.867.740,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	247.500,00	210.400,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	3.224.651.810,00	0,00
10	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi	500.441,00	840.232,00
11	Utang Belanja BLUD	40.087.051.368,00	39.942.048.485,00
Jumlah		45.087.950.165,00	52.791.318.764,00



1) Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Merupakan saldo utang belanja Tambahan Penghasilan (TPP) bulan Desember yang dibayarkan pada tahun berikutnya. Saldo utang belanja tambahan Penghasilan TA 2025 sebesar Rp0,00 dan TA 2024 sebesar Rp6.703.919.125,00.

2) Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Saldo utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya TA 2025 sebesar Rp994.844.519,00 berupa utang belanja insentif pajak pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp763.831.444,00 dan insentif retribusi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp231.013.075,00 dan Saldo TA 2024 sebesar Rp1.742.908.574,00.

3) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon

Merupakan Saldo utang belanja telepon per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.319.634,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp31.776.239,00. Rincian lengkap utang belanja telepon per PD dapat dilihat pada lampiran 5.8.

4) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air

Merupakan saldo utang belanja Air per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.387.550,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp62.321.700,00. Rincian lengkap utang belanja air per PD dapat dilihat pada lampiran 5.9.

5) Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik

Merupakan Saldo utang belanja listrik per 31 Desember 2025 sebesar Rp546.550.515,00 dan TA 2024 sebesar Rp4.140.946.269,00. Rincian lengkap utang belanja listrik per PD dapat dilihat *pada lampiran 5.10*

6) Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Merupakan Saldo utang belanja surat kabar/majalah per 31 Desember 2025 sebesar Rp700.000,00 yang belum dibayar yang berada pada Kec. Dukuhwaru sebesar Rp240.000,00, Kec Pagerbarang sebesar Rp230.000,00 dan Kec Suradadi sebesar Rp230.000,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp480.000,00.

7) Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Merupakan Saldo utang belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan per 31 Desember 2025 yang belum dibayar sebesar Rp158.696.828,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp165.867.740,00. Rincian lengkap utang belanja internet per PD dapat dilihat *pada lampiran 5.11*.



8) Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman

Merupakan saldo utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman per 31 Desember 2025 yang belum dibayar yang berada pada Inspektorat sebesar Rp247.500,00 dan saldo utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman per 31 Desember 2024 sebesar Rp210.400,00.

9) Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum

Merupakan saldo utang belanja penerangan jalan umum pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.224.651.810,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

10) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Merupakan saldo utang belanja BPJS Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp500.441,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp840.232,00 yang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

11) Utang Belanja BLUD

Merupakan saldo utang belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2025 yang berada pada BLUD RSUD dr Soeselo dan RSUD Suradadi sebesar Rp40.087.051.368,00 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.942.048.485,00 dengan rincian sebagai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.128 Utang Belanja BLUD

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Puskesmas Danasari	46.986.300,00	0,00
2	Puskesmas Kesamiran	11.960.000,00	0,00
3	Puskesmas Margasari	126.045.338,00	0,00
4	Puskesmas Kesambi	45.595.722,00	0,00
5	Puskesmas Bumijawa	404.481.713,00	0,00
6	Puskesmas Bojong	51.382.218,00	0,00
7	Puskesmas Balapulang	137.308.913,00	0,00
8	Puskesmas Kalibakung	111.032.366,00	0,00
9	Puskesmas Pagerbarang	304.401.541,00	0,00
10	Puskesmas Lebaksiu	38.330.874,00	0,00
11	Puskesmas Kambangan	20.167.650,00	0,00
12	Puskesmas Jatinegara	329.027.946,00	0,00
13	Puskesmas Kedungbanteng	111.110.574,00	0,00
14	Puskesmas Pangkah	29.063.736,00	0,00
15	Puskesmas Penusupan	21.968.520,00	0,00
16	Puskesmas Slawi	107.751.324,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

17	Puskesmas Adiwerna	49.148.500,00	0,00
18	Puskesmas Pagiyanten	31.206.160,00	0,00
19	Puskesmas Talang	21.331.340,00	0,00
20	Puskesmas Kaladawa	28.324.900,00	0,00
21	Puskesmas Dukuhturi	74.436.296,00	0,00
22	Puskesmas Kupu	19.397.000,00	0,00
23	Puskesmas Dukuwaru	71.955.726,00	0,00
24	Puskesmas Tarub	20.521.709,00	0,00
25	Puskesmas Kramat	12.921.000,00	0,00
26	Puskesmas Bangungalih	8.830.650,00	0,00
27	Puskesmas Suradadi	27.959.964,00	0,00
28	Puskesmas Jatibogor	23.539.942,00	0,00
29	Puskesmas Warurejo	246.715.207,00	0,00
30	RSUD dr Soeselo	20.915.442.946,00	27.182.589.696,00
31	RSUD Suradadi	16.638.705.293,00	12.759.458.789,00
	Jumlah	40.087.051.368,00	39.942.048.485,00

Utang Belanja BLUD RSUD dr Soeselo per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.129 Utang Belanja BLUD RSUD dr Soeselo

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan Alat Kesehatan dan habis pakai	1.157.581.550,00	3.675.230.255,00
2	Obat	207.576.366,00	2.152.958.455,00
3	Bank Darah	467.550.000,00	2.104.873.337,00
4	Laboratorium	1.313.272.696,00	2.393.711.084,00
5	Hemodialisa	268.009.500,00	696.824.700,00
7	IPSRs	0,00	30.325.493,00
8	Listrik, Air, Telepon	17.467.016.305,00	447.584.703,00
9	Jasa Pelayanan Medis	0,00	15.681.081.669,00
10	Sanitasi	34.436.529,00	0,00
	Jumlah	20.915.442.946,00	27.182.589.696,00

Utang Belanja BLUD RSUD Suradadi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel. 5.130 Utang Belanja BLUD RSUD Suradadi

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Obat dan BMHP/alkes	7.923.658.969,00	4.332.674.654,00
2	Bahan/ Alat Pembersih Sanitasi	109.397.400,00	46.028.023,00
3	Laboratorium	2.406.497.182,00	41.611.250,00
4	Makan dan Minum pasien	217.181.598,00	190.477.857,00
5	Bank Darah	839.620.000,00	459.170.000,00
6	Listrik,Telepon	117.795.645,00	122.888.996,00
7	Pengolahan Sampah	18.753.450,00	47.986.670,00
8	Implant/PEN	1.303.094.039,00	1.217.396.993,28
9	Radiologi	268.973.686,00	94.920.000,00
10	IPRS	401.578.887,00	199.188.655,00
11	Rekam Medik	335.100.960,00	312.539.648,00
12	Reagen	0,00	2.740.559.649,00
13	Gas Medis	0,00	242.846.412,00
14	Jasa Pelayanan RS	2.615.303.477,00	2.711.169.982,00
15	Beban Sewa Alat Operasi Pacho	81.750.000,00	0,00
Jumlah		16.638.705.293,00	12.759.458.789,28

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Utang Jangka Panjang-Pemerintah Pusat yang jatuh tempo sampai dengan Tahun 2024. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.179.713.375.685,63 naik sebesar Rp164.090.746.219,38 atau 4,09% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.015.622.629.466,25.



5.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2025.

5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1.1. Pendapatan –LO

Pendapatan-LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.819.316.757.442,04 dan pada tahun 2024 sebesar Rp2.771.378.689.758,84 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.131 Pendapatan – LO

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	746.489.905.771,04	617.561.032.393,84	128.928.873.377,20	20,88
2	Pendapatan Transfer– LO	2.058.412.513.375,00	2.075.110.586.095,00	(16.698.072.720,00)	(0,80)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	14.414.338.296,00	78.707.071.270,00	(64.292.732.974,00)	(81,69)
Jumlah		2.819.316.757.442,04	2.771.378.689.758,84	47.938.067.683,20	1,73

5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah- LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp746.489.905.771,04 dan tahun 2024 sebesar Rp617.561.032.393,84 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.132 Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	319.894.726.485,00	214.769.313.287,00	105.125.413.198,00	48,95
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	371.577.169.213,46	355.916.489.694,17	15.660.679.519,29	4,40
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	30.394.939.883,74	29.824.896.122,96	570.043.760,78	1,91
4	Lain – lain PAD Yang Sah - LO	24.623.070.188,84	17.050.333.289,71	7.572.736.899,13	44,41
Jumlah		746.489.905.771,04	617.561.032.393,84	128.928.873.377,20	20,88

5.4.1.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp319.894.726.485,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp214.769.313.287,00 dengan disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.133 Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pajak Reklame	4.470.141.004,00	4.256.442.376,00	213.698.628,00	5,02
2	Pajak Air Tanah	1.268.323.520,00	859.348.360,00	408.975.160,00	47,59
3	Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	(16,67)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.054.785.010,00	365.278.940,00	1.689.506.070,00	462,52
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	60.924.583.997,00	62.788.499.081,00	(1.863.915.084,00)	(2,97)
6	Pajak BPHTB	37.841.830.663,00	49.722.021.979,00	(11.880.191.316,00)	(23,89)
7	Pajak PBJT	101.200.260.048,00	96.373.954.551,00	4.826.305.497,00	5,01
8	Opsen PKB	66.046.969.243,00	400.768.000,00	65.646.201.243,00	16.380,10
9	Opsen BBNKB	46.085.333.000,00	0,00	46.085.333.000,00	-
	Jumlah	319.894.726.485,00	214.769.313.287,00	105.125.413.198,00	48,95

5.4.1.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp371.577.169.213,46 dan Tahun 2024 sebesar Rp355.916.489.694,17 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.134 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	325.909.548.566,02	318.785.905.338,47	7.123.643.227,55	2,23
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	3.194.380.500,00	4.307.157.437,00	(1.112.776.937,00)	(25,84)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	602.429.200,00	622.180.000,00	(19.750.800,00)	(3,17)
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	7.167.128.906,00	6.740.545.595,00	426.583.311,00	6,33
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	451.030.000,00	439.112.500,00	11.917.500,00	2,71
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.875.891.638,27	2.895.928.375,03	(20.036.736,76)	(0,69)
11	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	59.095.720,00	82.666.140,00	(23.570.420,00)	(28,51)
12	Retribusi Terminal - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	785.396.000,00	753.557.000,00	31.839.000,00	4,23
14	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	58.015.000,00	54.020.000,00	3.995.000,00	7,40



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	13.015.503.300,00	10.783.792.400,00	2.231.710.900,00	20,70
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	15.309.500,00	7.207.500,00	8.102.000,00	112,41
17	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	0,00	132.795.145,00	(132.795.145,00)	(100,00)
18	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	127.572.600,00	114.568.000,00	13.004.600,00	11,35
19	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	2.261.242.052,17	1.676.232.838,67	585.009.213,50	34,90
20	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	11.759.532.549,00	6.939.473.299,00	4.820.059.250,00	69,46
21	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	3.295.093.682,00	1.581.348.126,00	1.713.745.556,00	108,37
Jumlah		371.577.169.213,46	355.916.489.694,17	15.660.679.519,29	4,40

5.4.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp30.394.939.883,74 dan TA 2024 sebesar Rp29.824.896.122,96 berupa bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD).

5.4.1.1.d. Lain – lain PAD Yang Sah - LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp24.623.070.188,84 dan Tahun 2024 sebesar Rp17.050.333.289,71 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 135 Pendapatan lain-lain PAD yang Sah – LO

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	367.682.200,00	1.436.779.570,00	(1.069.097.370,00)	(74,41)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	307.219.500,00	416.552.833,00	(109.333.333,00)	(26,25)
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	719.098.773,00	719.235.120,00	(136.347,00)	(0,02)
4	Jasa Giro-LO	1.466.237.073,00	2.178.867.317,00	(712.630.244,00)	(32,71)
5	Pendapatan Bunga-LO	7.796.438.278,00	6.889.541.572,00	906.896.706,00	13,16
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	-
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	416.695.736,00	441.287.840,00	(24.592.104,00)	(5,57)
8	Pendapatan Denda atas	86.614.965,00	2.360.383.656,00	(2.273.768.691,00)	(96,33)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
	Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO				
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	988.330.284,84	803.185.548,71	185.144.736,13	23,05
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	50.512.377,00	0,00	50.512.377,00	-
11	Pendapatan dari Pengembalian-LO	12.385.841.002,00	1.804.499.833,00	10.581.341.169,00	586,39
	Jumlah	24.623.070.188,84	17.050.333.289,71	7.572.736.899,13	44,41

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.058.412.513.375,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.075.110.586.095,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.136 Pendapatan Transfer - LO

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.886.042.182.217,00	1.805.534.288.120,00	80.507.894.097,00	4,46
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	7.231.265.000,00	12.930.103.000,00	(5.698.838.000,00)	(44,07)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	165.139.066.158,00	256.646.194.975,00	(91.507.128.817,00)	(35,65)
	Jumlah	2.058.412.513.375,00	2.075.110.586.095,00	(16.698.072.720,00)	(0,80)

5.4.1.1.2.a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Kabupaten Tegal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.893.273.447.217,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.818.464.391.120,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.137 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dana Perimbangan-LO	0,00	1.805.534.288.120,00	(1.805.534.288.120,00)	(100,00)
2	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	33.709.756.600,00	0,00	33.709.756.600,00	-
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.303.491.093.061,00	0,00	1.303.491.093.061,00	-
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	548.841.332.556,00	0,00	548.841.332.556,00	-
5	Insentif Fiskal-LO	7.231.265.000,00	12.930.103.000,00	(5.698.838.000,00)	(44,07)
	Jumlah	1.893.273.447.217,00	1.818.464.391.120,00	74.809.056.097,00	4,11



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO terdiri dari Dana Perimbangan-LO, Dana Bagi Hasil-LO, Dana Alokasi Umum-LO dan Dana Alokasi Khusus-LO. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.138 Dana Perimbangan - LO

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) -LO	33.709.756.600,00	34.416.977.000,00	(707.220.400,00)	(2,05)
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.303.491.093.061,00	1.235.995.119.000,00	67.495.974.061,00	5,46
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	37.844.328.871,00	79.999.415.685,00	(42.155.086.814,00)	(52,69)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	510.997.003.685,00	455.122.776.435,00	55.874.227.250,00	12,28
Jumlah		1.886.042.182.217,00	1.805.534.288.120,00	80.507.894.097,00	4,46

5.4.1.1.2.b. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp165.139.066.158,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp256.646.194.975,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.139 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	156.390.404.992,00	233.464.096.475,00	(77.073.691.483,00)	(33,01)
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	8.748.661.166,00	23.182.098.500,00	(14.433.437.334,00)	(62,26)
Jumlah		165.139.066.158,00	256.646.194.975,00	(91.507.128.817,00)	(35,65)

5.4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah –LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp14.414.338.296,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp78.707.071.270,00 berupa Pendapatan Hibah – LO.

5.4.1.1.3.a. Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp14.414.338.296,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp78.707.071.270,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.140 Pendapatan Hibah – LO

No.	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	11.041.579.594,00	11.668.285.296,00	(626.705.702,00)	(5,37)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	853.000.000,00	950.405.585,00	(97.405.585,00)	(10,25)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	2.519.758.702,00	66.088.380.389,00	(63.568.621.687,00)	(96,19)
Jumlah		14.414.338.296,00	78.707.071.270,00	(64.292.732.974,00)	(81,69)

Terjadi perbedaan angka antara pendapatan LRA Rp3.110.318.788.047,02 dan Pendapatan LO Rp2.771.378.689.758,84 sebesar Rp2.819.316.757.442,04. Rincian perbedaan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.141 Selisih pendapatan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Pajak Daerah	319.347.793.179,00	319.894.726.485,00	(546.933.306,00)
2	Retribusi Daerah	365.021.543.160,02	371.577.169.213,46	(6.555.626.053,44)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.993.196.214,00	30.394.939.883,74	(7.401.743.669,74)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.330.200.497,00	24.623.070.188,84	(292.869.691,84)
5	Transfer Pemerintah Pusat	2.215.004.070.217,00	1.893.273.447.217,00	321.730.623.000,00
6	Transfer Pemerintah Provinsi	163.621.984.780,00	165.139.066.158,00	(1.517.081.378,00)
7	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	14.414.338.296,00	(14.414.338.296,00)
JUMLAH		3.110.318.788.047,02	2.819.316.757.442,04	291.002.030.604,98

1) Pendapatan Pajak Daerah LO Rp319.894.726.485,00 terdiri dari:

- Pendapatan LRA sebesar Rp319.347.793.179,00;
- Penambahan piutang 2025 Rp68.416.120.212,00;
- Penambahan Pendapatan Diterima dimuka 2024 Rp1.525.594.391,00;
- Penambahan penghapusan piutang Rp7.880.390.207,00;
- Pengurangan Piutang Tahun 2024 Rp75.803.559.221,00;
- Pengurangan Pendapatan diterima dimuka 2025 Rp1.471.612.283,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar Rp371.577.169.213,46 terdiri dari:

- Pendapatan LRA Rp365.021.543.160,02
- Penambahan piutang 2025 Rp25.653.579.029,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Penambahan Pendapatan Diterima dimuka 2024 Rp6.014.532.916,91;
 - Pengurangan Piutang Tahun 2024 Rp20.486.418.854,00;
 - Pengurangan Pendapatan diterima dimuka 2025 Rp4.626.067.038,47.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LO Rp30.394.939.883,74 terdiri:
- Pendapatan LRA sebesar Rp22.993.196.214,00;
 - Penambahan pencatatan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp7.401.743.669,74.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah LO Rp24.623.070.188,84 terdiri dari:
- Pendapatan LRA sebesar Rp24.330.200.497,00;
 - Penambahan piutang 2025 Rp19.233.978.567,02;
 - Penambahan Pendapatan Diterima dimuka 2024 Rp328.789.208,33;
 - Penambahan penghapusan piutang Rp3.785.461.986,61;
 - Penambahan Piutang TP TGR Rp38.400.000,00
 - Pengurangan Piutang Tahun 2024 Rp23.064.390.361,79;
 - Pengurangan Pendapatan diterima dimuka 2025 Rp21.569.708,33;
 - Pengurangan piutang dari pendapatan dana bergulir Rp1.500.000,00;
 - Pengurangan piutang dari penerimaan TP TGR Rp6.300.000,00.
- 5) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO berupa Dana Desa tidak Dicatat di LO karena merupakan Transitoris tetapi dicatat di LRA Rp321.730.623.000,00.
- 6) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Rp163.621.984.780,00 terdiri dari:
- Pendapatan LRA sebesar Rp163.621.984.780,00;
 - Penambahan piutang 2025 Rp16.315.489.447,00;
 - Pengurangan Piutang Tahun 2024 Rp14.798.408.069,00;
- 7) Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO Rp14.414.338.296,00 yang berasal dari penerimaan hibah penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp11.041.579.594,00, hibah dari kelompok masyarakat sebesar Rp853.000.000,00 dan Hibah dari Badan/Lembaga sebesar Rp2.519.758.702,00



5.4.1.2. Beban

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.675.889.620.419,30 dan TA 2024 sebesar Rp2.699.995.653.857,48 dengan rincian disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.142 Beban

No.	Beban	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Operasi	2.508.809.526.419,30	2.519.154.916.753,48	(10.345.390.334,18)	(0,41)
2	Beban Transfer	167.080.094.000,00	180.840.737.104,00	(13.760.643.104,00)	(7,61)
	Jumlah	2.675.889.620.419,30	2.699.995.653.857,48	(24.106.033.438,18)	(0,89)

5.4.1.2.1. Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.508.809.526.419,30 dan TA 2024 sebesar Rp2.519.154.916.753,48 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.143 Beban Operasi

No.	Beban Operasi	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.192.101.928.462,00	1.165.245.286.847,00	26.856.641.615,00	2,30
2	Beban Barang dan Jasa	919.985.622.636,06	943.742.923.650,23	(23.757.301.014,17)	(2,52)
3	Beban Hibah	92.587.598.939,00	130.417.060.834,00	(37.829.461.895,00)	(29,01)
4	Beban Bantuan Sosial	22.280.692.500,00	29.235.400.000,00	(6.954.707.500,00)	(23,79)
5	Beban Penyisihan Piutang	6.446.124.091,36	6.553.686.437,15	(107.562.345,79)	(1,64)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	275.407.559.790,88	243.960.558.985,10	31.447.000.805,78	12,89
	Jumlah	2.508.809.526.419,30	2.519.154.916.753,48	(10.345.390.334,18)	(0,41)

5.4.1.2.1.a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.192.101.928.462,00 dan TA 2025 sebesar Rp1.165.245.286.847,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.144 Beban Pegawai

No.	Beban Pegawai	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	723.994.644.932,00	727.980.320.245,00	(3.985.675.313,00)	(0,55)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	90.829.539.146,00	97.686.458.700,00	(6.856.919.554,00)	(7,02)
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	310.117.699.011,00	271.376.007.336,00	38.741.691.675,00	14,28
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	37.305.287.040,00	36.672.251.220,00	633.035.820,00	1,73
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.077.213.938,00	1.298.866.322,00	(221.652.384,00)	(17,07)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.448.263.400,00	1.117.696.350,00	330.567.050,00	29,58
7	Beban Pegawai BLUD	27.329.280.995,00	29.113.686.674,00	(1.784.405.679,00)	(6,13)
	Jumlah	1.192.101.928.462,00	1.165.245.286.847,00	26.856.641.615,00	2,30



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

1) Beban Gaji dan Tunjangan – LO

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan - LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp723.994.644.932,00 dan TA 2024 sebesar Rp727.980.320.245,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.145 Beban Gaji dan Tunjangan

No.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	553.326.720.416,00	557.268.014.468,00	(3.941.294.052,00)	(0,71)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	51.668.261.159,00	51.878.207.899,00	(209.946.740,00)	(0,40)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.729.754.936,00	5.351.825.000,00	(622.070.064,00)	(11,62)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	30.510.647.000,00	33.696.801.460,00	(3.186.154.460,00)	(9,46)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.756.577.000,00	4.171.812.000,00	(415.235.000,00)	(9,95)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	29.894.084.970,00	29.744.559.740,00	149.525.230,00	0,50
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.115.160.930,00	7.837.131.686,00	2.278.029.244,00	29,07
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	7.046.700,00	7.757.756,00	(711.056,00)	(9,17)
9	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	35.427.881.197,00	33.450.094.886,00	1.977.786.311,00	5,91
10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.139.637.091,00	1.143.534.041,00	(3.896.950,00)	(0,34)
11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	3.418.873.533,00	3.430.581.309,00	(11.707.776,00)	(0,34)
Jumlah		723.994.644.932,00	727.980.320.245,00	(3.985.675.313,00)	(0,55)

2) Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO

Jumlah Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp90.829.539.146,00 dan TA 2024 sebesar Rp97.686.458.700,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.146 Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO

No.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN - LO	90.595.839.146,00	97.463.258.700,00	(6.867.419.554,00)	(7,05)
2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN - LO	178.500.000,00	188.700.000,00	(10.200.000,00)	(5,41)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	55.200.000,00	34.500.000,00	20.700.000,00	60,00
Jumlah		90.829.539.146,00	97.686.458.700,00	(6.856.919.554,00)	(7,02)

3) Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp310.117.699.011,00 dan TA 2024 sebesar Rp271.376.007.336,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.147 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya LO

No.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.916.619.298,00	8.054.907.489,00	(1.138.288.191,00)	(14,13)
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	900.917.018,00	1.099.585.352,00	(198.668.334,00)	(18,07)
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	182.308.741.759,00	208.253.189.980,00	(25.944.448.221,00)	(12,46)
4	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.062.821.100,00	2.116.783.700,00	(53.962.600,00)	(2,55)
5	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	202.500.000,00	875.912.500,00	(673.412.500,00)	(76,88)
6	Beban Honorarium	0,00	11.480.853.189,00	(11.480.853.189,00)	(100,00)
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	1.118.990.000,00	(1.118.990.000,00)	(100,00)
8	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	115.259.063.036,00	27.988.509.126,00	87.270.553.910,00	311,81
9	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	1.723.536.800,00	1.617.026.000,00	106.510.800,00	6,59
10	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	743.500.000,00	8.770.250.000,00	(8.026.750.000,00)	(91,52)
Jumlah		310.117.699.011,00	271.376.007.336,00	38.741.691.675,00	14,28

4) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan DPRD untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp37.305.287.040,00 dan TA 2024 sebesar Rp36.672.251.220,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.148 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

No.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.112.580.000,00	1.680.000,00	0,15
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	119.000.700,00	116.499.600,00	2.501.100,00	2,15
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	132.890.700,00	134.990.880,00	(2.100.180,00)	(1,56)
4	Beban Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.340.000,00	168.000,00	0,18
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.612.023.000,00	3.654.000,00	0,23
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	148.717.800,00	111.172.950,00	37.544.850,00	33,77
7	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00	0,00
8	Beban Tunjangan Reses DPRD	2.131.500.000,00	1.470.000.000,00	661.500.000,00	45,00
9	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	495.396,00	412.830,00	82.566,00	20,00
10	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	14.597.864.528,00	14.684.528.560,00	(86.664.032,00)	(0,59)
11	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	8.529.372.916,00	8.048.188.400,00	481.184.516,00	5,98
12	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	466.515.000,00	(466.515.000,00)	(100,00)
Jumlah		37.305.287.040,00	36.672.251.220,00	633.035.820,00	1,73

5) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKD untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.077.212.858,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.298.866.322,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.149 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	3.900.000,00	39.000.000,00	1.000,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.148.000,00	336.000,00	4.812.000,00	1.432,14
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	7.020.000,00	70.200.000,00	1.000,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.779.720,00	506.940,00	4.272.780,00	842,86
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.039.710,00	63.421,00	976.289,00	1.539,38
6	Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.555.200,00	450.240,00	4.104.960,00	911,73
7	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	9.360,00	84.240,00	900,00
8	Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	28.080,00	252.720,00	900,00
9	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	885.482.055,00	1.126.561.620,00	(241.079.565,00)	(21,40)
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	55.713.773,00	159.990.661,00	(104.276.888,00)	(65,18)
Jumlah		1.077.212.858,00	1.298.866.322,00	(221.653.464,00)	(17,07)

6) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO

Jumlah Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.448.263.400,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.117.696.350,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.150 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH –LO

No.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1)	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	360.360.000,00	32.760.000,00	9,09
2)	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.055.143.400,00	757.336.350,00	297.807.050,00	39,32
Jumlah		1.448.263.400,00	1.117.696.350,00	330.567.050,00	29,58

7) Beban Pegawai BLUD

Jumlah Beban Pegawai BLUD- LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp27.329.280.995,00 dan TA 2024 sebesar Rp29.113.686.674,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.151 Beban Pegawai BLUD – LO

No.	Beban Pegawai BLUD - LO	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Puskesmas Danasari	287.069.161,00	309.675.500,00	(22.606.339,00)	(7,30)
2	Puskesmas Kesamiran	157.650.000,00	216.230.000,00	(58.580.000,00)	(27,09)
3	Puskesmas Margasari	399.938.000,00	492.813.000,00	(92.875.000,00)	(18,85)
4	Puskesmas Kesambi	286.600.000,00	372.520.000,00	(85.920.000,00)	(23,06)
5	Puskesmas Bumijawa	756.875.000,00	789.889.600,00	(33.014.600,00)	(4,18)
6	Puskesmas Bojong	470.450.000,00	547.150.000,00	(76.700.000,00)	(14,02)
7	Puskesmas Balapulang	878.450.000,00	907.640.000,00	(29.190.000,00)	(3,22)
8	Puskesmas Kalibakung	199.850.000,00	271.920.000,00	(72.070.000,00)	(26,50)
9	Puskesmas Pagerbarang	421.200.000,00	533.240.000,00	(112.040.000,00)	(21,01)
10	Puskesmas Lebaksiu	408.400.000,00	486.010.000,00	(77.610.000,00)	(15,97)
11	Puskesmas Kambangan	202.500.000,00	245.060.000,00	(42.560.000,00)	(17,37)
12	Puskesmas Jatinegara	524.950.000,00	690.560.000,00	(165.610.000,00)	(23,98)
13	Puskesmas Kedungbanteng	366.850.000,00	424.480.000,00	(57.630.000,00)	(13,58)
14	Puskesmas Pangkah	426.700.000,00	518.450.000,00	(91.750.000,00)	(17,70)
15	Puskesmas Penusupan	266.630.000,00	297.760.000,00	(31.130.000,00)	(10,45)
16	Puskesmas Slawi	315.400.000,00	328.600.000,00	(13.200.000,00)	(4,02)
17	Puskesmas Adiwerna	249.250.000,00	332.950.000,00	(83.700.000,00)	(25,14)
18	Puskesmas Pagiyanten	203.640.000,00	280.910.000,00	(77.270.000,00)	(27,51)
19	Puskesmas Talang	215.700.000,00	280.440.000,00	(64.740.000,00)	(23,09)
20	Puskesmas Kaladawa	219.385.000,00	288.074.410,00	(68.689.410,00)	(23,84)
21	Puskesmas Dukuhturi	292.850.000,00	371.420.000,00	(78.570.000,00)	(21,15)
22	Puskesmas Kupu	174.400.000,00	208.550.000,00	(34.150.000,00)	(16,37)
23	Puskesmas Dukuwaru	290.100.000,00	391.710.000,00	(101.610.000,00)	(25,94)
24	Puskesmas Tarub	489.050.000,00	621.550.000,00	(132.500.000,00)	(21,32)
25	Puskesmas Kramat	191.550.000,00	253.300.000,00	(61.750.000,00)	(24,38)
26	Puskesmas Bangungalih	201.829.272,00	256.995.232,00	(55.165.960,00)	(21,47)
27	Puskesmas Suradadi	235.187.981,00	299.807.056,00	(64.619.075,00)	(21,55)
28	Puskesmas Jatibogor	314.653.000,00	385.723.000,00	(71.070.000,00)	(18,43)
29	Puskesmas Warurejo	468.507.500,00	536.431.500,00	(67.924.000,00)	(12,66)
30	RSUD dr Soeselo Slawi	17.274.754.081,00	17.007.387.376,00	267.366.705,00	1,57
31	RSUD Suradadi	138.912.000,00	166.440.000,00	(27.528.000,00)	(16,54)
Jumlah		27.329.280.995,00	29.113.686.674,00	(1.784.405.679,00)	(6,13)

5.4.1.2.1.b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp919.985.622.636,06 dan TA 2024 sebesar Rp943.742.923.650,23 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.152 Beban Barang dan Jasa

No.	Beban Barang dan Jasa	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Barang	134.329.706.685,93	137.041.584.412,50	(2.711.877.726,57)	(1,98)
2	Beban Jasa	265.119.779.021,00	256.344.966.741,00	8.774.812.880,00	3,42
3	Beban Pemeliharaan	47.461.952.560,00	37.859.919.889,00	9.602.032.671,00	25,36
4	Beban Perjalanan Dinas	31.625.501.172,00	54.287.560.729,00	(22.662.059.557,00)	(41,74)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.792.295.353,00	17.284.043.200,00	(491.747.847,00)	(2,85)
6	Beban Barang Ekstra Komptable	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	142.209.263.801,00	(142.209.263.801,00)	(100,00)
8	Beban Barang dan Jasa BOSP	118.943.343.345,99	0,00	118.943.343.345,99	-
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	285.405.421.345,14	277.040.241.965,73	8.365.179.379,41	3,02
9	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	20.307.623.153,00	21.675.342.912,00	(1.367.719.759,00)	(6,31)
Jumlah		919.985.622.636,06	943.742.923.650,23	(23.757.301.014,17)	(2,52)

1) Beban Barang

Jumlah Beban Barang untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp134.329.706.685,93 dan TA 2024 sebesar Rp137.041.584.412,50 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.153 Beban Barang

No.	Beban Barang	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Beban Barang Pakai Habis	127.153.187.341,91	121.198.824.294,50	5.954.363.047,41	4,91
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	130.832.501,00	392.744.235,00	(261.911.734,00)	(66,69)
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.045.686.843,02	15.450.015.883,00	(8.404.329.039,98)	(54,40)
Jumlah		134.329.706.685,93	137.041.584.412,50	(2.711.877.726,57)	(1,98)

a) Beban Barang Pakai Habis

Jumlah Beban Barang Pakai Habis untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp127.153.187.341,91 dan TA 2024 sebesar Rp121.198.824.294,50 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.12

b) Beban Barang Tak Habis Pakai

Jumlah Beban Barang Tak Habis Pakai untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp130.832.501,00 dan TA 2024 sebesar Rp392.744.235,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.154 Beban Barang Tak Habis Pakai

No.	Beban Barang Tak Habis Pakai	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	11.265.501,00	5.240.000,00	6.025.501,00	114,99
2	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	40.872.000,00	186.034.235,00	(145.162.235,00)	(78,03)
3	Beban Komponen-Komponen Lainnya	78.695.000,00	201.470.000,00	(122.775.000,00)	(60,94)
4	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		130.832.501,00	392.744.235,00	(261.911.734,00)	(66,69)



c) Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Jumlah Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.045.686.843,02 dan TA 2024 sebesar Rp15.450.015.883,00.

2) Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp265.119.779.021,00 dan TA 2024 sebesar Rp256.344.966.741,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.155 Beban Jasa

No.	Beban Jasa	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Beban Jasa Kantor	182.590.760.840,00	172.758.079.210,00	9.832.681.630,00	5,69
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	41.949.944.408,00	45.956.390.971,00	(4.006.446.563,00)	(8,72)
3.	Beban Sewa Tanah	41.475.000,00	54.900.000,00	(13.425.000,00)	(24,45)
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.150.892.556,00	9.203.430.772,00	(2.052.538.216,00)	(22,30)
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	775.941.000,00	851.360.000,00	(75.419.000,00)	(8,86)
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	350.555.000,00	315.395.000,00	35.160.000,00	11,15
7.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	149.640.210,00	0,00	149.640.210,00	-
8.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.956.981.633,00	6.916.242.932,00	2.040.738.701,00	29,51
9.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.375.099.113,00	5.497.972.800,00	2.877.126.313,00	52,33
10.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.778.489.261,00	14.791.195.056,00	(12.705.795,00)	(0,09)
Jumlah		265.119.779.021,00	256.344.966.741,00	8.774.812.280,00	3,42

a) Beban Jasa Kantor

Jumlah Beban Jasa Kantor untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp182.590.760.840,00 dan TA 2024 sebesar Rp172.758.079.210,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.13

b) Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Jumlah Beban Premi Asuransi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 41.949.944.408,00 dan TA 2024 sebesar Rp45.956.390.971,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.156 Beban luran Jaminan/Asuransi

No.	Beban luran Jaminan/Asuransi	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.024.116.428,00	2.975.245.752,00	48.870.676,00	1,64
2	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.581.614.400,00	35.287.551.600,00	(4.705.937.200,00)	(13,34)
3	Beban Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.089.736.800,00	5.978.070.000,00	111.666.800,00	1,87
4	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.340.984.514,00	1.361.957.903,00	(20.973.389,00)	(1,54)
5	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	378.967.252,00	351.351.198,00	27.616.054,00	7,86
6	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12.155.798,00	2.214.518,00	9.941.280,00	448,91
7	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	489.000,00	0,00	489.000,00	-
8	Beban luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	2.075.256,00	0,00	2.075.256,00	-
9	Beban luran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	1.121.760,00	0,00	1.121.760,00	-
10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	308.740.000,00	0,00	308.740.000,00	-
11	Beban luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	209.943.200,00	0,00	209.943.200,00	-
Jumlah		41.949.944.408,00	45.956.390.971,00	(4.006.446.563,00)	(8,72)

c) Beban Sewa Tanah

Jumlah Beban Sewa Tanah untuk periode 1 januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp41.475.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp54.900.000,00 dengan rincian disajikan dalam table berikut :

Tabel 5.157 Sewa Tanah

No.	Beban luran Jaminan/Asuransi	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	41.475.000,00	27.650.000,00	13.825.000,00	50,00
2	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	27.250.000,00	(27.250.000,00)	(100,00)
Jumlah		41.475.000,00	54.900.000,00	(13.425.000,00)	(24,45)

d) Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Jumlah Beban Sewa Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.150.892.556,00 dan TA 2024 sebesar Rp9.203.430.772,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.158 Beban Sewa Peralatan Mesin

No.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
No.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Sewa Tractor	1.876.000.000,00	1.879.350.000,00	(3.350.000,00)	(0,18)
2	Beban Sewa Excavator	847.245.906,00	1.387.485.000,00	(540.239.094,00)	(38,94)
3	Beban Sewa Aggregate and Concrete Equipment	69.344.000,00	102.928.000,00	(33.584.000,00)	(32,63)
4	Beban Sewa Alat Pengangkat	0,00	159.736.000,00	(159.736.000,00)	(100,00)
5	Beban Sewa Mesin Proses	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	-
6	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
7	Beban Sewa Alat Besar Apung Lainnya	300.000,00	900.000,00	(600.000,00)	(66,67)
8	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	10.800.000,00	11.640.000,00	(840.000,00)	(7,22)
9	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.666.070.600,00	2.283.014.000,00	(616.943.400,00)	(27,02)
10	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	127.400.000,00	150.410.000,00	(23.010.000,00)	(15,30)
11	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	-
12	Beban Sewa Peralatan Las	0,00	3.808.000,00	(3.808.000,00)	(100,00)
13	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	49.950.000,00	249.470.572,00	(199.520.572,00)	(79,98)
14	Beban Sewa Mebel	359.736.000,00	806.472.000,00	(446.736.000,00)	(55,39)
15	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.084.642.150,00	1.836.756.200,00	247.885.950,00	13,50
16	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	194.460.000,00	(164.460.000,00)	(84,57)
17	Beban Sewa Personal Computer	0,00	108.000.000,00	(108.000.000,00)	(100,00)
19	Beban Sewa Peralatan Jaringan	9.003.900,00	9.001.000,00	2.900,00	0,03
Jumlah		7.150.892.556,00	9.203.430.772,00	(2.052.538.216,00)	(22,30)

e) Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Jumlah Beban Sewa Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp775.941.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp851.360.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.159 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

No.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
2	Beban Sewa Bangunan Gudang	39.960.000,00	39.500.000,00	460.000,00	1,16
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	706.262.000,00	783.010.000,00	(76.748.000,00)	(9,80)
4	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00	-
5	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Taman	7.900.000,00	8.000.000,00	(100.000,00)	(1,25)
7	Beban Sewa Asrama	18.750.000,00	17.250.000,00	1.500.000,00	8,70
Jumlah		775.941.000,00	851.360.000,00	(75.419.000,00)	(8,86)

f) Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Jumlah Beban Sewa Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp350.555.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp315.395.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.160 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

No.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
3	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	77.855.000,00	55.645.000,00	22.210.000,00	39,91
4	Beban Sewa Tanaman	272.700.000,00	259.750.000,00	12.950.000,00	4,99
Jumlah		350.555.000,00	315.395.000,00	35.160.000,00	11,15

g) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Jumlah Beban Jasa Konsultansi Konstruksi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 8.956.981.633,00 dan TA 2024 sebesar Rp6.916.242.932,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.161 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

No.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	12.281.000,00	24.947.000,00	(12.666.000,00)	(50,77)
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	91.192.000,00	0,00	91.192.000,00	-
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	379.778.124,00	(379.778.124,00)	(100,00)
4	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	14.713.000,00	22.948.600,00	(8.235.600,00)	(35,89)
5	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	17.537.600,00	9.387.189,00	8.150.411,00	86,82
6	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	6.075.000,00	5.060.000,00	1.015.000,00	20,06
7	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	8.815.183.033,00	6.474.122.019,00	2.341.061.014,00	36,16
Jumlah		8.956.981.633,00	6.916.242.932,00	2.040.738.701,00	29,51

h) Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi

Jumlah Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.375.099.113,00 dan TA 2024 sebesar Rp5.497.972.800,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.162 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	264.074.450,00	330.071.500,00	(65.997.050,00)	(19,99)
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	27.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	125,00
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	8.084.024.663,00	5.155.901.300,00	2.928.123.363,00	56,79
Jumlah		8.375.099.113,00	5.497.972.800,00	2.877.126.313,00	52,33



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

i) Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp14.778.489.261,00 dan TA 2024 sebesar Rp14.791.195.056,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.163 Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan)

No.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	3.192.142.746,00	2.582.622.102,00	609.520.644,00	23,60
2	Beban Sosialisasi	5.164.088.532,00	6.301.707.064,00	(1.137.618.532,00)	(18,05)
3	Beban Bimbingan Teknis	6.422.257.983,00	5.906.865.890,00	515.392.093,00	8,73
Jumlah		14.778.489.261,00	14.791.195.056,00	(12.705.795,00)	(0,09)

3) Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp47.461.952.560,00 dan TA 2024 sebesar Rp37.859.919.889,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.164 Beban Pemeliharaan

No.	Beban Pemeliharaan	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	238.119.000,00	398.514.000,00	(160.395.000,00)	(40,25)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.396.528.892,00	10.133.010.214,00	263.518.678,00	2,60
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.187.801.478,00	7.344.064.825,00	3.843.736.653,00	52,34
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.487.958.240,00	19.962.530.850,00	5.525.427.390,00	27,68
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	151.544.950,00	21.800.000,00	129.744.950,00	595,16
Jumlah		47.461.952.560,00	37.859.919.889,00	9.602.032.671,00	25,36

4) Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp31.625.501.172 dan TA 2024 sebesar Rp54.287.560.729,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.165 Beban Perjalanan Dinas

No.	Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.625.501.172,00	54.287.560.729,00	(22.662.059.557,00)	(41,74)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		31.625.501.172,00	54.287.560.729,00	(22.662.059.557,00)	(41,74)

5) Beban Uang/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Jumlah Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp16.792.295.353,00 dan TA 2024 Rp17.284.043.200,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.166 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No.	Beban Uang/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.315.835.000,00	15.691.691.000,00	(375.856.000,00)	(2,40)
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.476.460.353,00	1.592.352.200,00	(115.891.847,00)	(7,28)
Jumlah		16.792.295.353,00	17.284.043.200,00	(491.747.847,00)	(2,85)

6) Beban Barang Ekstrakomptabel

Jumlah Beban Barang Ekstrakomptabel untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 tidak ada dan TA 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.167 Beban Barang Ekstrakomptabel

No.	Beban Barang Ekstrakomptabel	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Barang Ekstra Komptable Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

7) Beban Barang dan Jasa BOS

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOSP untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 118.943.343.345,99 dan TA 2024 sebesar 142.209.263.801,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

8) Beban Barang dan Jasa BLUD

Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp285.405.421.345,14 dan TA 2024 sebesar Rp277.040.241.965,73 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.168 Beban Barang dan Jasa BLUD

No.	Beban Barang dan Jasa BLUD	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Puskesmas Danasari	1.124.790.148,87	1.104.427.165,31	20.362.983,56	1,84
2	Puskesmas Kesamiran	1.119.204.254,92	1.109.647.116,01	9.557.138,91	0,86
3	Puskesmas Margasari	3.224.532.092,91	3.235.155.798,16	(10.623.705,25)	(0,33)
4	Puskesmas Kesambi	1.511.040.854,68	1.572.395.012,03	(61.354.157,35)	(3,90)
5	Puskesmas Bumijawa	5.253.458.440,34	5.234.137.450,70	19.320.989,64	0,37
6	Puskesmas Bojong	2.385.646.059,17	2.367.068.122,53	18.577.936,64	0,78
7	Puskesmas Balapulung	3.997.700.780,20	3.585.246.543,65	412.454.236,55	11,50
8	Puskesmas Kalibakung	1.863.582.977,23	1.799.213.546,98	64.369.430,25	3,58
9	Puskesmas Pagerbarang	2.840.642.588,35	2.340.252.242,73	500.390.345,62	21,38
10	Puskesmas Lebaksiu	1.966.994.091,42	1.848.313.328,28	118.680.763,14	6,42
11	Puskesmas Kambangan	1.574.586.902,46	1.630.135.182,23	(55.548.279,77)	(3,41)
12	Puskesmas Jatinegara	4.688.956.658,69	3.855.883.685,85	833.072.972,84	21,61
13	Puskesmas Kedungbanteng	2.247.219.135,66	1.965.037.686,59	282.181.449,07	14,36
14	Puskesmas Pangkah	2.122.499.883,87	2.351.009.965,20	(228.510.081,33)	(9,72)
15	Puskesmas Penusupan	1.685.075.716,69	1.485.824.942,62	199.250.774,07	13,41
16	Puskesmas Slawi	1.861.202.307,64	2.083.818.818,49	(222.616.510,85)	(10,68)
17	Puskesmas Adiwerna	2.533.980.235,27	2.142.373.626,72	391.606.608,55	18,28
18	Puskesmas Pagiyanten	2.263.719.214,70	1.916.867.233,42	346.851.981,28	18,09
19	Puskesmas Talang	1.872.191.207,73	1.452.023.698,96	420.167.508,77	28,94
20	Puskesmas Kaladawa	1.874.302.032,88	1.216.685.101,51	657.616.931,37	54,05
21	Puskesmas Dukuhturi	1.972.240.978,16	1.753.251.455,32	218.989.522,84	12,49
22	Puskesmas Kupu	1.080.387.899,11	1.072.660.881,03	7.727.018,08	0,72
23	Puskesmas Dukuhwaru	2.489.853.819,75	2.322.429.441,50	167.424.378,25	7,21
24	Puskesmas Tarub	2.260.171.559,48	2.278.373.103,27	(18.201.543,79)	(0,80)
25	Puskesmas Kramat	1.579.589.495,84	1.269.214.428,99	310.375.066,85	24,45
26	Puskesmas Bangungalih	1.234.661.020,43	1.201.142.195,84	33.518.824,59	2,79
27	Puskesmas Suradadi	1.693.273.045,84	1.557.840.358,65	135.432.687,19	8,69
28	Puskesmas Jatibogor	1.532.783.502,16	1.574.701.597,06	(41.918.094,90)	(2,66)
29	Puskesmas Warurejo	3.662.876.226,91	2.996.976.596,54	665.899.630,37	22,22
30	RSUD dr Soeselo Slawi	176.712.982.274,00	170.945.103.155,00	5.767.879.119,00	3,37
31	RSUD Suradadi	43.175.275.939,78	45.773.032.484,56	(2.597.756.544,78)	(5,68)
	Jumlah	285.405.421.345,14	277.040.241.965,73	8.365.179.379,41	3,02



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

9) Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp20.307.623.153,00 dan TA 2024 sebesar Rp21.675.342.912,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.169 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

No.	Beban Barang dan Jasa BLUD	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Puskesmas Danasari	543.435.275,00	561.113.343,00	-17.678.068,00	(3,15)
2	Puskesmas Kesamiran	410.609.120,00	437.196.852,00	-26.587.732,00	(6,08)
3	Puskesmas Margasari	701.464.318,00	880.523.165,00	-179.058.847,00	(20,34)
4	Puskesmas Kesambi	598.505.148,00	541.016.037,00	57.489.111,00	10,63
5	Puskesmas Bumijawa	1.537.322.335,00	1.377.706.948,00	159.615.387,00	11,59
6	Puskesmas Bojong	849.112.437,00	735.167.067,00	113.945.370,00	15,50
7	Puskesmas Balapulang	667.117.279,00	727.784.987,00	-60.667.708,00	(8,34)
8	Puskesmas Kalibakung	653.117.813,00	692.323.197,00	-39.205.384,00	(5,66)
9	Puskesmas Pagerbarang	652.375.475,00	847.399.250,00	-195.023.775,00	(23,01)
10	Puskesmas Lebaksiu	730.127.272,00	665.249.720,00	64.877.552,00	9,75
11	Puskesmas Kambangan	620.814.946,00	563.706.676,00	57.108.270,00	10,13
12	Puskesmas Jatinegara	904.046.500,00	1.120.933.950,00	-216.887.450,00	(19,35)
13	Puskesmas Kedungbanteng	612.515.925,00	675.008.308,00	-62.492.383,00	(9,26)
14	Puskesmas Pangkah	1.091.583.686,00	1.081.542.782,00	10.040.904,00	0,93
15	Puskesmas Penusupan	622.038.533,00	696.690.137,00	-74.651.604,00	(10,72)
16	Puskesmas Slawi	681.186.416,00	889.956.159,00	-208.769.743,00	(23,46)
17	Puskesmas Adiwerna	761.711.884,00	827.747.311,00	-66.035.427,00	(7,98)
18	Puskesmas Pagiyanten	599.286.821,00	819.671.557,00	-220.384.736,00	(26,89)
19	Puskesmas Talang	599.664.765,00	641.379.529,00	-41.714.764,00	(6,50)
20	Puskesmas Kaladawa	656.904.068,00	747.751.085,00	-90.847.017,00	(12,15)
21	Puskesmas Dukuhturi	621.397.547,00	787.949.112,00	-166.551.565,00	(21,14)
22	Puskesmas Kupu	573.137.552,00	585.545.772,00	-12.408.220,00	(2,12)
23	Puskesmas Dukuwaru	706.590.287,00	755.937.662,00	-49.347.375,00	(6,53)
24	Puskesmas Tarub	634.944.016,00	649.833.400,00	-14.889.384,00	(2,29)
25	Puskesmas Kramat	724.023.985,00	780.581.526,00	-56.557.541,00	(7,25)
26	Puskesmas Bangungalih	584.884.939,00	590.801.944,00	-5.917.005,00	(1,00)
27	Puskesmas Suradadi	661.072.336,00	629.509.021,00	31.563.315,00	5,01
28	Puskesmas Jatibogor	565.531.500,00	627.686.010,00	-62.154.510,00	(9,90)
29	Puskesmas Warurejo	743.100.975,00	737.630.405,00	5.470.570,00	0,74
Jumlah		20.307.623.153,00	21.675.342.912,00	-1.367.719.759,00	(6,31)

5.4.1.2.1.c. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp92.587.598.939,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp130.417.060.834,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.170 Beban Hibah

No.	Beban Hibah	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	2.122.738.000,00	51.782.973.000,00	(49.660.235.000,00)	(95,90)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	36.728.151.152,00	75.848.250.000,00	(39.120.098.848,00)	(51,58)
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.766.543.500,00	2.785.837.834,00	(19.294.334,00)	(0,69)
4	Beban Hibah Dana BOS	245.000.000,00	0,00	245.000.000,00	-
5	Beban Hibah Dana BOSP	50.725.166.287,00	0,00	50.725.166.287,00	-
Jumlah		92.587.598.939,00	130.417.060.834,00	(37.829.461.895,00)	(29,01)

5.4.1.2.1.d. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp22.280.692.500,00 dan TA 2024 sebesar Rp29.235.400.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 171 Beban Bantuan Sosial

No.	Beban Bantuan sosial	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.419.600.000,00	13.005.000.000,00	(5.585.400.000,00)	(42,95)
2	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	14.861.092.500,00	16.230.400.000,00	(1.369.307.500,00)	(8,44)
Jumlah		22.280.692.500,00	29.235.400.000,00	(6.954.707.500,00)	(23,79)

5.4.1.2.1.e. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2025 sebesar Rp6.446.124.091,36 dan TA 2024 sebesar Rp6.553.686.437,15 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 172 Beban Penyisihan Piutang

No.	Beban Penyisihan Piutang	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	3.978.504.614,12	3.935.691.320,22	42.813.293,90	1,09
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.203.960.004,84	1.557.847.352,26	646.112.652,58	41,47
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	258.659.472,40	1.055.147.764,67	(796.488.292,27)	(75,49)
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		6.446.124.091,36	6.553.686.437,15	(107.562.345,79)	(1,64)



5.4.1.2.1.f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp275.407.559.790,88 dan TA 2025 Rp243.960.558.985,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.173 Beban penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95.505.799.706,56	90.081.734.482,00	5.424.065.224,56	6,02
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.624.372.694,00	31.352.608.329,20	17.271.764.364,80	55,09
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	130.823.051.980,32	122.330.965.263,90	8.492.086.716,42	6,94
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	207.615.410,00	195.250.910,00	12.364.500,00	6,33
JUMLAH		275.407.559.790,88	243.960.558.985,10	31.049.138.617,90	12,73

5.4.1.2.2. Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk tahun 2025 sebesar Rp167.080.094.000,00 dan TA 2025 sebesar Rp180.840.737.104,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.174 Beban Transfer

No	Beban Transfer	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	17.771.217.000,00	23.589.737.104,00	(5.818.520.104,00)	(24,67)
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	149.308.877.000,00	157.251.000.000,00	(7.942.123.000,00)	(5,05)
JUMLAH		167.080.094.000,00	180.840.737.104,00	(13.760.643.104,00)	(7,61)

5.4.2. KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.2.1. Defisit Non Operasional

Jumlah Defisit Non Operasional ini merupakan defisit atas penjualan dan penghapusan aset yaitu sebesar nilai buku aset saat dihapuskan, untuk tahun 2025 sebesar Rp21.277.039.121,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp3.380.324.573,34.

5.4.3. POS LUAR BIASA

5.4.3.1 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas pemerintah daerah. Beban Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp2.151.147.271,00 dan tahun 2024 sebesar Rp1.706.027.596,00 merupakan beban yang berasal dari belanja tidak terduga.



5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan kas dan pengeluaran kas selama Tahun 2025 dan 2024, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Saldo akhir kas TA 2025 sebesar Rp166.080.706.985,65 dan TA 2024 sebesar Rp168.352.361.032,63 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.175 Laporan Arus Kas

Arus Kas dari :	2025	2024
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Aktivitas Operasi	403.656.770.905,02	264.663.144.049,67
2. Aktivitas Investasi	(406.429.556.316,00)	(334.051.805.615,00)
3. Aktivitas Pendanaan	501.131.364,00	1.609.046.563,00
4. Aktivitas Transitoris	0,00	(92.837.189,00)
Kenaikan /Penurunan Kas	(2.271.654.046,98)	(67.872.452.191,33)
Saldo Awal Kas	168.352.361.032,63	236.224.813.223,96
Saldo Akhir Kas	166.080.706.985,65	168.352.361.032,63
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	323.326,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	3.839.750,00	598.434.550,00
Saldo Akhir Kas	166.080.706.985,65	168.352.361.032,63

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2025 surplus sebesar Rp403.656.770.905,02 dan tahun 2024 surplus sebesar Rp264.663.144.049,67 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas TA 2025 adalah sebesar Rp3.109.951.105.847,02 dan TA 2024 adalah sebesar Rp2.992.264.817.520,47 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.176 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	319.347.793.179,00	208.450.106.295,00
Pendapatan Retribusi Daerah	365.021.543.160,02	356.132.261.707,47
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.993.196.214,00	19.597.159.894,00
Lain-lain PAD yang Sah	23.962.518.297,00	17.220.234.318,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Arus Masuk Kas		2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.886.042.182.217,00	1.809.126.435.120,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	328.961.888.000,00	329.169.928.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	163.621.984.780,00	249.497.044.186,00
	Pendapatan Hibah	0,00	3.071.648.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.109.951.105.847,02	2.992.264.817.520,47

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2025 adalah sebesar Rp2.706.294.334.942,00 dan TA 2024 adalah sebesar Rp2.727.601.673.470,80 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.177 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Belanja Pegawai	1.199.553.911.642,00	1.165.882.185.148,00
Belanja Barang dan Jasa	900.910.267.590,00	903.280.437.788,80
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	92.587.598.939,00	130.417.060.834,00
Belanja Bantuan Sosial	22.280.692.500,00	29.235.400.000,00
Belanja Tak Terduga	2.151.147.271,00	1.706.027.596,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	17.771.217.000,00	23.589.737.104,00
Transfer Bantuan keuangan	471.039.500.000,00	473.490.825.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	2.706.294.334.942,00	2.727.601.673.470,80

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2025 defisit sebesar Rp406.429.556.316,00 dan tahun 2024 defisit sebesar Rp334.051.805.615,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas yang terdiri dari :

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas TA 2025 adalah sebesar Rp367.682.200,00 dan TA 2024 adalah sebesar Rp35.236.779.570,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.178 Arus Masuk Kas Dari Investasi

Arus Masuk Kas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	33.800.000.000,00
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	270.407.200,00	1.104.679.570,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	45.681.000,00	114.200.000,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	196.500.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	19.700.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	44.094.000,00	1.700.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	367.682.200,00	35.236.779.570,00

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2025 adalah sebesar Rp406.797.238.516,00 dan TA 2024 adalah sebesar Rp369.288.585.185,00 engan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.179 Arus Keluar Kas Dari Investasi

Arus Keluar Kas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Belanja Tanah	3.749.375.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	112.650.087.395,00	93.915.643.627,00
Belanja Gedung dan Bangunan	80.023.255.964,00	117.628.988.778,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	176.193.275.755,00	131.886.142.737,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	26.388.086.692,00	20.849.910.043,00
Belanja Aset Lainnya	293.157.710,00	7.900.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	406.797.238.516,00	369.288.585.185,00

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2025 surplus sebesar Rp501.131.364,00 dan tahun 2024 surplus sebesar Rp1.609.046.563,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pembiayaan, yaitu:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas berupa penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang TA 2025 sebesar Rp1.501.131.364,00 dan TA 2024 sebesar Rp2.609.046.563,00.



Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 berupa pemberian pinjaman daerah.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris TA 2025 sebesar Rp0,00 dan TA 2024 defisit sebesar Rp92.837.189,00 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas TA 2025 adalah sebesar Rp147.262.425.325,00 dan TA 2024 adalah sebesar Rp170.731.344.983,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.180 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
~ Iuran wajib Pegawai	66.170.364.885,00	77.793.559.014,00
~ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.145.106.708,00	1.238.445.803,00
~ Jaminan Kematian (JKM)	3.428.600.259,00	3.437.756.603,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	23.339.628.389,00	38.244.951.261,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	2.120.592.992,00	1.813.756.131,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	960.537.853,00	616.043.051,00
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	5.222.665.601,00	4.630.292.478,00
~ Pajak Penghasilan Badan Usaha (0,5%)	0,00	0,00
~ Jaminan Hari Tua	0,00	0,00
~ Jaminan Pensiun	0,00	0,00
~ Pajak PPN	44.874.928.638,00	42.956.540.642,00
Penerimaan Koreksi	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	147.262.425.325,00	170.731.344.983,00

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2025 adalah sebesar Rp147.262.425.325,00 dan TA 2024 adalah sebesar Rp170.824.182.172,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.181 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas.	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		
~ luran wajib Pegawai	66.170.364.885,00	77.793.559.014,00
~ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.145.106.708,00	1.238.445.803,00
~ Jaminan Kematian (JKM)	3.428.600.259,00	3.437.756.603,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	23.339.628.389,00	38.244.951.261,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	2.120.592.992,00	1.813.756.131,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	960.537.853,00	616.043.051,00
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	5.222.665.601,00	4.630.292.478,00
~ Pajak Penghasilan Badan Usaha (0,5%)	0,00	0,00
~ Jaminan Hari Tua	0,00	0,00
~ Jaminan Pensiun	0,00	0,00
~ Pajak PPn	44.874.928.638,00	42.956.540.642,00
Pengeluaran Koreksi	0,00	92.837.189,00
Jumlah Arus Keluar Kas	147.262.425.325,00	170.824.182.172,00

Posisi Kas akhir TA 2025 sebesar Rp166.080.706.985,65 dan TA 2024 sebesar Rp168.352.361.032,63 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.182. Saldo Akhir Kas

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kenaikan /Penurunan Kas	(2.271.654.046,98)	(67.872.452.191,33)
Saldo Awal Kas	168.352.361.032,63	236.224.813.223,96
Saldo Awal Kas BUD	101.690.420.177,00	182.221.149.433,00
Saldo Awal Kas di BLUD	64.613.540.934,63	51.932.138.693,96
Saldo Awal Kas BOS	43.159.557,00	162.679.247,00
Saldo Awal Kas lainnya	0,00	17.840.663,00
Saldo Awal Kas Dana BOK Puskesmas	1.406.482.488,00	1.819.530.521,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	323.326,00	2.405.500,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	598.434.550,00	69.069.166,00
Saldo Akhir Kas	166.080.706.985,65	168.352.361.032,63
Saldo Akhir Kas BUD (Kas Daerah)	121.510.200.960,00	101.690.420.177,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	44.339.937.814,65	64.613.540.934,63
Saldo Akhir Kas BOSP	30.281.624,00	43.159.557,00
Saldo Akhir Kas lainnya	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	196.446.837,00	1.406.482.488,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	323.326,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	3.839.750,00	598.434.550,00
Saldo Akhir Kas	166.080.706.985,65	168.352.361.032,63



5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Tahun 2025 sebesar Rp4.015.622.629.466,25.

5.6.2. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit-LO merupakan saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp119.998.950.630,74.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulasi Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi kurang ekuitas yaitu sebesar Rp44.091.795.588,64 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.183 Koreksi Ekuitas

No	Uraian	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
1	Koreksi piutang	0,00	11.665.852.193,61	(11.665.852.193,61)
2	Koreksi Ekuitas penyisihan piutang	12.989.320.726,73	0,00	12.989.320.726,73
3	Koreksi Ekuitas Aset Tetap	556.653.058,00	0,00	556.653.058,00
4	Koreksi ekuitas akumulasi penyusutan Aset Tetap	42.567.759.012,52	0,00	42.567.759.012,52
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	287.097.885,00	0,00	287.097.885,00
6	Koreksi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	643.795.000,00	(643.795.000,00)
7	Koreksi Nilai Persediaan	612.100,00	0,00	612.100,00
JUMLAH		56.401.442.782,25	12.309.647.193,61	44.091.795.588,64

- a) Koreksi Piutang yang mengurangi ekuitas piutang berupa penghapusan piutang Pajak sebesar Rp7.880.390.207,00 dan Piutang denda pajak sebesar Rp3.785.461.986,61.
- b) Koreksi penyisihan piutang yang menambah ekuitas sebesar Rp12.989.320.726,73 berupa pelunasan piutang atas penyisihan piutang 2024 dan penghapusan piutang, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Piutang pajak daerah sebesar Rp8.988.360.087,23
 - 2) Piutang retribusi daerah sebesar Rp1.305.973.928,01
 - 3) Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp2.684.855.347,49



- 4) Piutang lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp2.631.364,00
- 5) Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD sebesar Rp7.500.000,00.
- c) Koreksi ekuitas Aset tetap menambah aset atas penerimaan hibah aset sebesar Rp556.653.058,00 yang baru dicatat pada tahun 2025.
- d) Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan yang mengurangi ekuitas sebesar Rp8.992.306.483,61 atas koreksi hasil inventarisasi Rp42.567.759.012,52
- e) Koreksi ekuitas Persediaan yang menambah ekuitas berupa Persediaan Bibit ikan sebesar Rp612.100,00.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp4.179.713.375.685,63 merupakan jumlah Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit – LO ditambah dengan koreksi-koreksi.



BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

7.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi umum Kabupaten Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di kota Slawi. Terletak di pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai utara (Pantura) yang berada pada persilangan arus transportasi Semarang-Tegal-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Purwokerto. Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108°57'06" BT - 109°21'30" BT dan 6°50'41" LS - 7°15'03" LS, dengan luas wilayah daratan 87.878,56 ha atau 878,79 km² dan Lautan seluas 121,50 Km², Panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan daerah lain adalah 27 Km. Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut : batas wilayah sebelah Utara adalah Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) katagori daerah, yaitu :

- a. Daerah pantai, dengan kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-2⁰) seluas 24.547,52 ha meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja;
- b. Daerah dataran rendah, dengan kemiringan lahan tipe bergelombang/dataran (2-15⁰) seluas 35.847,22 ha meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhhuri, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksui sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah;
- c. Daerah dataran tinggi/pegunungan, dengan kemiringan lahan tipe curam/berbukit-bukit (15-40⁰) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>40⁰) seluas 7.099,97 ha meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 mdpl, kawasan dengan ketinggian 500-750 mdpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 mdpl.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 114,03 mm, suhu udara rata-rata setiap tahunnya berkisar pada 26,5 - 28,8 °C, dengan kelembaban udara rata-rata 68 - 86 %, tekanan udara rata-ratanya adalah 1.009,9 mb, kecepatan angin rata-ratanya adalah 1,6 - 3 knot dan Sinar matahari rata-ratanya 41.603 joule/cm² serta penguapan rata-ratanya 150,11 mm/tahun.

Secara administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa, 6 kelurahan, yaitu : Kecamatan Margasari (13 desa), Kecamatan Bumijawa (18 desa), Kecamatan Bojong (17 desa), Kecamatan Balapulang (20 desa), Kecamatan Pagerbarang (13 desa), Kecamatan Lebaksiu (15 desa), Kecamatan Jatinegara (17 desa), Kecamatan Kedungbanteng (10 desa), Kecamatan Pangkah (23 desa), Kecamatan Slawi (5 desa, 5 kelurahan), Kecamatan Dukuwaru (10 desa), Kecamatan Adiwerna (21 desa), Kecamatan Dukuhturi (18 desa), Kecamatan Talang (19 desa), Kecamatan Tarub (20 desa), Kecamatan Kramat (19 desa, 1 kelurahan), Kecamatan Suradadi (11 desa), dan Kecamatan Warureja (12 desa).

2. Demografis

Penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk interim 2020-2024 sebanyak 1.674.803 jiwa yang terdiri atas 848.602 jiwa penduduk laki-laki dan 826.201 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan 2023, penduduk Tegal mengalami pertumbuhan sebesar 1,21 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,71.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal Tahun 2024 mencapai 1.702 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Dukuhturi dengan kepadatan sebesar 6.109 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 564 jiwa/km².

3. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2024 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 mengalami kenaikan menjadi 5,07 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,94 persen, namun perannya terhadap PDRB hanya sekitar 3,38 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sektor yang memiliki laju pertumbuhan terendah sebesar 0,29 persen.

Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 36,45 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,87 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi



Kabupaten Tegal yaitu sebesar 11,53 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 0,29 persen.

Adapun angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar 29.444,38 milyar rupiah dan Atas Harga Berlaku mencapai 47.721,31 milyar rupiah.

7.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, telah ditetapkan susunan perangkat daerah yang terdiri dari:

- A. Sekretariat Daerah;
- B. Sekretariat DPRD;
- C. Inspektorat;
- D. Dinas Daerah;
- E. Badan Daerah;
- F. Kecamatan

Perangkat daerah tersebut di atas dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- A. Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ;
- B. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal;
- C. Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal;
- D. Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan
 5. Satpol PP
 6. Dinas Sosial
 7. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Dinas Lingkungan Hidup
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 12. Dinas Perhubungan
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 15. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



18. Dinas Perikanan
 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
- E. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 2. Badan Pendapatan Daerah
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- F. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Margasari
 2. Kecamatan Bumijawa
 3. Kecamatan Bojong
 4. Kecamatan Balapulang
 5. Kecamatan Pagerbarang
 6. Kecamatan Lebaksiu.
 7. Kecamatan Jatinegara
 8. Kecamatan Kedungbanteng
 9. Kecamatan Pangkah
 10. Kecamatan Slawi
 11. Kecamatan Dukuhwaru
 12. Kecamatan Adiwerna
 13. Kecamatan Dukuhturi
 14. Kecamatan Talang
 15. Kecamatan Tarub
 16. Kecamatan Kramat
 17. Kecamatan Suradadi
 18. Kecamatan Warureja
- Dalam wilayah kecamatan Kramat dan Kecamatan Slawi dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB VII

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan ini diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pengguna laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H